



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kebijakan berbasis bukti, dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, diperlukan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan yang terarah, terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3);

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, dan tahapan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di Daerah dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
11. Sumber Daya Manusia adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi, keahlian, atau peran dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
12. Kelembagaan adalah aturan, mekanisme, dan/atau organisasi yang mendukung pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabilitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keberlanjutan; dan
- e. berbasis bukti.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, strategi, sasaran, dan tahapan pelaksanaan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; mengintegrasikan Riset dan Inovasi dengan prioritas pembangunan Daerah; meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta memperkuat ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya;
 - b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
 - c. rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi provinsi;
 - d. isu strategis yang berkembang;
 - e. kebijakan nasional; dan
 - f. ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. bab iii : tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. bab iv : analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. bab v : strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. bab vi : peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. bab vii : penutup.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNA FRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 11



BRIDA

BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH

KOTA MAKASSAR

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN

PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAERAH KOTA MAKASSAR

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Kota Makassar ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai pijakan strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengarahkan pengembangan dan pemajuan iptek serta inovasi secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Rencana induk dan peta jalan ini diharapkan menjadi dokumen rujukan utama dalam pengembangan ekosistem riset, teknologi, dan inovasi di Kota Makassar, yang selaras dengan visi pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, serta kebijakan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara substansi, laporan ini memuat analisis situasi dan potensi iptek di Kota Makassar, perumusan visi, misi, dan sasaran pemajuan iptek, arah kebijakan dan strategi, penyelesaian permasalahan prioritas daerah, skenario dan tahapan implementasi peta jalan. Seluruh rangkaian penyusunan dilakukan melalui pengumpulan data, telaah kebijakan, analisis empiris, serta serangkaian diskusi, lokakarya, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, komunitas inovasi, dan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Makassar, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha/industri, serta berbagai komunitas dan jejaring inovasi yang telah memberikan dukungan, data, masukan, dan kontribusi pemikiran selama proses penyusunan dokumen ini. Tanpa dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, laporan ini tidak mungkin tersusun secara komprehensif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan sangat terbuka terhadap saran, kritik konstruktif, dan penyempurnaan di masa mendatang. Harapannya, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kota Makassar ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan program dan kegiatan, serta sinergi kolaboratif lintas sektor demi terwujudnya Kota Makassar yang lebih inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Makassar, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	6
C. TUJUAN	7
D. SASARAN.....	8
BAB II	
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET INOVASI KOTA MAKASSAR.....	9
A. GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR	9
1. Aspek Geografi	9
2. Aspek Kependudukan.....	11
3. Aspek Ketenagakerjaan	12
4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	13
5. Aspek Produk Unggulan Kota Makassar	18
B. GAMBARAN/KONDISI RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR	20
1. Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy). 20	
2. Penentuan Tema Prioritas.....	20
3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar Sesuai Tema Prioritas	30
BAB III	
TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI	34
A. TANTANGAN RISET DAN INOVASI	34
1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Peneliti Masih Belum Merata.....	35
2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Riset	36
3. Minimnya Anggaran untuk Kegiatan Riset dan Inovasi	36
4. Rendahnya Literasi Riset dan Inovasi di Kalangan Pemerintah dan Publik.....	36
5. Belum Terbangunnya Sistem Informasi Riset Daerah	37
B. PELUANG RISET DAN INOVASI.....	38
1. Transformasi Kelembagaan.....	38
2. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat	39
3. Posisi Strategis Kota Makassar	39
4. Potensi Kemitraan Melalui Kolaborasi Quadruple Helix.....	40

BAB IV	
ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI	42
1. KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI	42
2. KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI	45
3. KEMITRAAN RISET DAN INOVASI	47
4. BUDAYA RISET DAN INOVASI	50
5. KETERPADUAN RISET DAN INOVASI	52
6. PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL	54
BAB V	
STRATEGI RISET DAN INOVASI	57
A. STRATEGI MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE-BASED POLICY)	57
B. STRATEGI PENGEMBANGAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PRIORITAS DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH	102
BAB VI	
PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR.....	136
A. SASARAN STRATEGIS DAN FOKUS KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE-BASED POLICY)	136
B. SASARAN STRATEGIS DAN FOKUS PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH, TERKAIT PENYELESAIAN PERMASALAHAN PRIORITAS DAERAH	174
BAB VII	
RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR	186
A. PROGRAM DAN TARGET TAHUNAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE-BASED POLICY)	186
B. PROGRAM DAN TARGET TAHUNAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PRIORITAS DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH	222
BAB VIII	
PENUTUP	232
A. KESIMPULAN.....	232
B. SARAN	232

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024	9
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Makassar, Tahun 2024	12
Tabel 2. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar Tahun 2020-2024	12
Tabel 2. 4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar.....	14
Tabel 2. 5 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 6 Sarana Pendidikan Per Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024	15
Tabel 2. 7 Sarana Kesehatan Per Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024	16
Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2023-2024	17
Tabel 2. 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Sanitasi di Kota Makassar Tahun 2023-2024	17
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota Makassar (Per-BRIN No. 5/2023)	43
Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Kota Makassar	45
Tabel 4. 3 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi di Kota Makassar	48
Tabel 4. 4 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi di Kota Makassar.....	50
Tabel 4. 5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Kota Makassar	52
Tabel 4. 6 Analisis Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah	55
Tabel 5. 1 Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>).....	61
Tabel 5. 2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	103
Tabel 6. 1 Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>)	137
Tabel 6. 2 Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar, Terkait Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah.....	176

Tabel 7. 1 Matriks Program Riset dan Inovasi dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas yang Berbasis Bukti (<i>Evidence- Based Policy</i>) di Kota Makassar	190
Tabel 7. 2 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Kota Makassar ..	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kota Makassar.....	11
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memegang peranan strategis dalam mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat daerah. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, penguatan pemanfaatan IPTEK bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah daerah untuk tetap relevan dan kompetitif. IPTEK menjadi fondasi utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi melalui inovasi, efisiensi proses produksi, serta diversifikasi sektor ekonomi berbasis potensi lokal. Di sisi lain, dalam sektor infrastruktur, pemanfaatan teknologi mampu mempercepat pembangunan fisik maupun digital yang lebih efisien, inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan.

Transformasi menuju pembangunan berbasis IPTEK juga sejalan dengan arah kebijakan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menekankan pentingnya integrasi IPTEK dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 juga menempatkan penguatan riset, teknologi, dan inovasi sebagai prioritas utama untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan infrastruktur cerdas (*smart infrastructure*). Organisasi internasional seperti UNESCO (2021) juga menekankan bahwa investasi pada IPTEK di tingkat lokal merupakan kunci bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam konteks ini, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK di daerah seperti Kota Makassar menjadi sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan daya saing UMKM, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, hingga penyediaan infrastruktur kota yang cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang terencana, berbasis data, serta sinergis antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan utama di Kawasan Timur Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur regional. Dengan posisi geografis yang sangat menguntungkan sebagai simpul konektivitas antara wilayah barat dan timur Indonesia, Makassar telah tumbuh menjadi kota metropolitan yang menjadi pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan logistik. Peran vital ini menjadikan Makassar sebagai penggerak utama roda ekonomi di kawasan timur, serta sebagai gerbang masuk bagi investasi dan distribusi barang serta jasa ke wilayah sekitarnya.

Namun, seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, Kota Makassar dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masih dominannya pendekatan pembangunan konvensional yang belum sepenuhnya berbasis pada pemanfaatan teknologi dan inovasi. Hal ini menyebabkan rendahnya efisiensi, keterbatasan adaptasi terhadap perubahan global, serta belum optimalnya peningkatan daya saing ekonomi lokal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang riset dan teknologi, serta rendahnya literasi IPTEK di kalangan pelaku usaha, aparat pemerintah, dan masyarakat menjadi hambatan serius dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam bidang infrastruktur, tantangan muncul dari belum optimalnya penerapan teknologi dalam perencanaan dan pengelolaan

infrastruktur perkotaan yang cerdas, ramah lingkungan, dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Adapun, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas masyarakat (*quadruple helix*) masih terbatas, sehingga hasil-hasil riset dan inovasi belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah. Kesenjangan digital, keterbatasan akses terhadap teknologi tepat guna, dan minimnya regulasi serta pendanaan khusus untuk mendukung agenda inovasi juga memperparah tantangan ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kota Makassar perlu mengintegrasikan pendekatan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tantangan yang semakin kompleks dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi dapat diatasi melalui penguatan strategi pembangunan jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan global dan dinamika lokal. Salah satu pendekatan strategis yang kini menjadi fokus adalah transisi menuju pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), yaitu sistem ekonomi yang tidak semata-mata bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi didorong oleh penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemampuan teknologi. Model ekonomi ini menuntut peran aktif daerah dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia unggul, memperkuat ekosistem penelitian dan pengembangan (litbang), serta mendukung penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Transformasi ini menjadi penting mengingat tantangan era digital dan revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap ekonomi global dan lokal secara fundamental. Daerah yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini akan semakin tertinggal dalam hal produktivitas, daya saing, dan ketahanan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator bagi pengembangan inovasi lokal khususnya yang dapat meningkatkan

nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian modern, industri kreatif, pariwisata berbasis teknologi, serta digitalisasi layanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, cerdas dan berkelanjutan merupakan elemen fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai pengungkit utama konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat dan barang, serta akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Pembangunan infrastruktur yang tangguh menjadi prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Namun, tantangan terhadap pembangunan infrastruktur saat ini semakin kompleks, mulai dari keterbatasan anggaran, tekanan urbanisasi, hingga ancaman perubahan iklim dan bencana alam. Untuk itu, pendekatan konvensional dalam pembangunan infrastruktur perlu diubah menjadi pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pemanfaatan IPTEK dalam seluruh siklus infrastruktur mulai dari perencanaan, desain, pelaksanaan, hingga pemeliharaan mampu menghadirkan sistem infrastruktur yang lebih efisien biaya, berbasis data (*data driven*), dan adaptif terhadap risiko iklim dan geobencana.

Penerapan konsep *smart infrastructure*, misalnya memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi sensor, sistem pemantauan *real time*, hingga kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola lalu lintas, memantau kualitas air dan udara, mendeteksi kerusakan jalan, hingga merespons kejadian darurat secara cepat. Selain itu, *Building Information Modeling* (BIM) dan sistem informasi geografis (GIS) kini menjadi alat penting dalam merancang infrastruktur secara presisi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas proyek.

Kebijakan nasional juga telah mendorong integrasi IPTEK dalam pembangunan infrastruktur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan infrastruktur sebagai prioritas nasional dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, laporan *World Economic Forum* (2021) juga menekankan bahwa negara dan daerah yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pengembangan infrastruktur akan memiliki ketahanan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis di masa depan.

Bagi daerah seperti Kota Makassar, yang merupakan kota metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang terus meningkat, penerapan infrastruktur cerdas dan berkelanjutan sangat penting untuk menghindari tekanan pada sistem transportasi, sanitasi, perumahan, dan lingkungan. Oleh karena itu, peran IPTEK menjadi kunci dalam menciptakan sistem infrastruktur kota yang tidak hanya fungsional, tetapi juga responsif, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan teknologi dan inovasi, sebagaimana tercermin dalam berbagai program digitalisasi layanan pemerintahan. Namun demikian, upaya ini masih memerlukan arah kebijakan yang lebih terintegrasi dan terencana untuk memastikan bahwa pengembangan IPTEK benar-benar mendukung prioritas pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah.

Untuk itu, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Kota Makassar menjadi langkah strategis guna:

- 1) Menyelaraskan arah pengembangan IPTEK dengan visi pembangunan jangka menengah dan panjang Kota Makassar.

- 2) Menentukan fokus riset, pengembangan, dan inovasi daerah yang relevan dan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi dan infrastruktur.
- 3) Membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong ekosistem inovasi yang kuat.
- 4) Menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program, dan penganggaran yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta berbasis teknologi dan inovasi.

Dengan rencana induk dan peta jalan yang terarah, diharapkan Kota Makassar dapat memperkuat perannya sebagai kota modern, berdaya saing global, dan berkelanjutan, dengan ekonomi yang tangguh dan infrastruktur yang cerdas serta berwawasan lingkungan juga mampu meningkatkan kapasitas inovasi, mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi dan infrastruktur, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Khususnya dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur disusun mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017–2045
- 4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- 6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

- 7) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- 8) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Daerah
- 9) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 1 Tahun 2021
- 10) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026
- 12) Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penerapan Inovasi Daerah
- 13) Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Sistem Inovasi Daerah

C. Tujuan

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur bertujuan untuk:

- 1) Mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
- 2) Mengakselerasi pengembangan sektor ekonomi unggulan dengan dukungan teknologi dan inovasi
- 3) Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang cerdas, adaptif, dan berkelanjutan
- 4) Memperkuat ekosistem inovasi daerah yang mendukung kolaborasi antar sektor
- 5) Menjadi acuan strategis bagi pengembangan program riset dan teknologi daerah
- 6) Meningkatkan efisiensi tata kelola pembangunan ekonomi dan infrastruktur berbasis data dan teknologi

D. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data dan pemetaan potensi riset dan inovasi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi dan infrastruktur
- 2) Meningkatnya sinergi antara BRIDA, Bappeda, Dinas teknis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program IPTEK yang aplikatif
- 3) Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasi capaian inovasi di bidang ekonomi dan infrastruktur, sebagai bagian dari sistem tata kelola pembangunan berbasis IPTEK.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET INOVASI KOTA MAKASSAR

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Aspek Geografi

Kota Makassar merupakan salah satu kota strategis di Indonesia timur sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, kota ini terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, tepatnya pada koordinat Koordinat 5°8' Lintang Selatan 119°25' Bujur Timur. Kota ini memiliki batas wilayah yang strategis dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Kota Makassar memiliki luas wilayah sekitar 175,77 Km², berikut pembagian luas wilayah per-kecamatan:

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan
di Kota Makassar Tahun 2024**

No	Kecamatan	Luas Area (Km²)	Presentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	4,40	2,50
10	Kepulauan Sangkarrang	1,54	0,88
11	Tallo	5,83	3,32

No	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Presentase Terhadap Luas Kota Makassar
12	Panakukang	17,05	9,70
13	Manggala	24,14	13,73
14	Biringkanaya	48,22	27,43
15	Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar		175,77	100,00

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

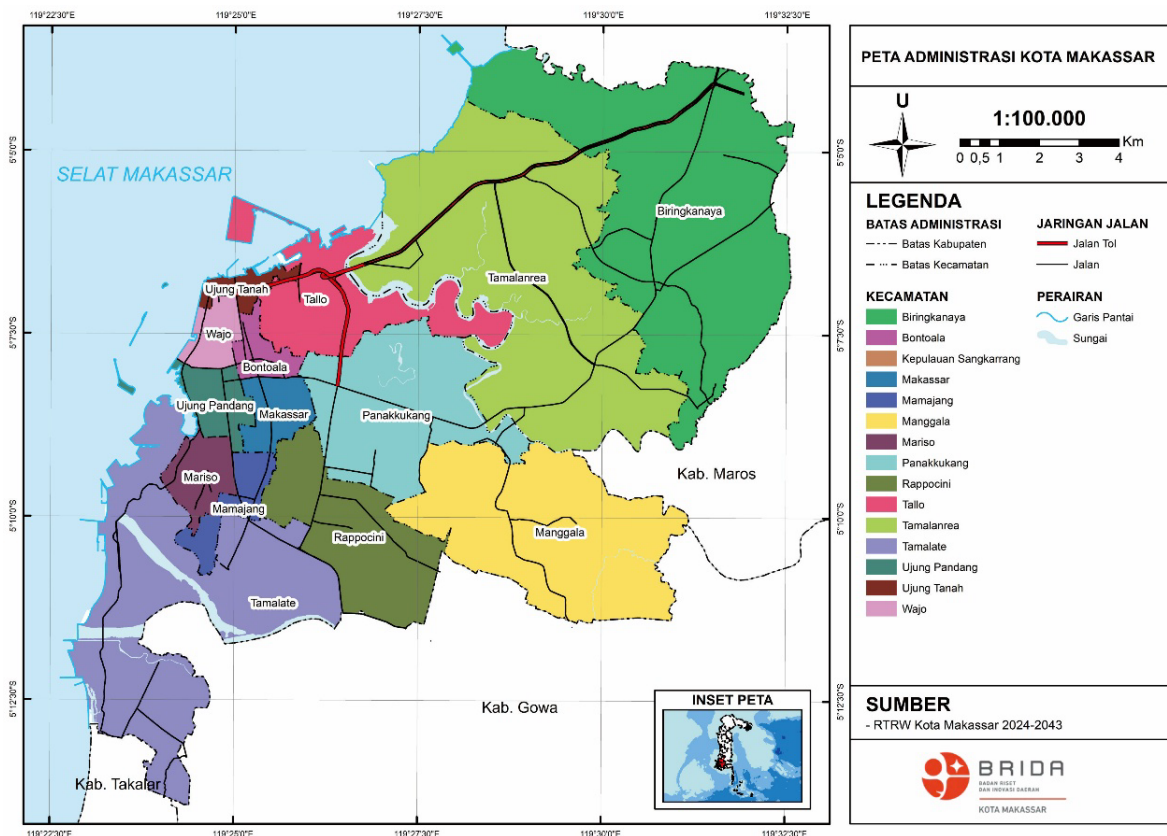
Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km² atau mencakup 27,43% dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan luas 1,54 Km² atau hanya sebesar 0,88% dari luas Kota Makassar.

Secara topografi Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “*Waterfront City*” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian lahan yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui produk DEMNAS, diperkirakan Kota Makassar berada pada ketinggian +0,00 s.d. +25,00. Kota Makassar didominasi oleh lahan dengan elevasi rendah (+0,00 s.d. +5,00)

Iklim di Makassar tergolong tropis basah, dengan dua musim utama yaitu musim hujan yang berlangsung dari sekitar bulan November hingga April, serta musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Suhu udara rata-rata berada di kisaran 27 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang tinggi hampir sepanjang tahun.

Dari aspek hidrografi, Makassar dilintasi beberapa sungai kecil seperti Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Selain itu, kota ini memiliki garis pantai yang cukup panjang serta dikelilingi oleh beberapa pulau kecil, seperti Pulau Lae-Lae dan Pulau Samalona, yang berada di kawasan perairan Selat Makassar.

Dengan letaknya yang strategis di tepi laut dan berada di jalur pelayaran utama, Makassar memegang peranan penting sebagai pintu gerbang menuju kawasan Indonesia timur. Kondisi geografis ini menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan, jasa, transportasi, dan pelabuhan yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.



Gambar 2. 1 Peta Kota Makassar

2. Aspek Kependudukan

Penduduk Kota Makassar tahun 2024 tercatat sebanyak 1.477.861 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 734.008 jiwa laki-laki dan 743.853 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 98,68, angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 98 - 99 penduduk laki-laki dengan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.408 jiwa per Km², berikut rincian jumlah penduduk Kota Makassar menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduknya:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Makassar, Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Mariso	29.316	29.481	58.797	32.306
2	Mamajang	28.516	29.559	58.075	25.811
3	Tamalate	94.368	94.854	189.222	9.363
4	Rappocini	73.744	77.125	150.869	16.346
5	Makassar	40.638	41.338	81.976	32.530
6	Ujung Pandang	12.071	12.805	24.876	9.459
7	Wajo	14.440	14.951	29.391	14.769
8	Bontoala	27.414	27.830	55.244	26.307
9	Ujung Tanah	18.381	18.340	36.721	8.346
10	Kepulauan Sangkarrang	7.501	7.506	15.007	9.745
11	Tallo	74.560	73.448	148.008	25.387
12	Panakukang	71.682	72.694	144.376	8.468
13	Manggala	80.434	81.393	161.827	6.704
14	Biringkanaya	107.869	108.835	216.704	4.494
15	Tamalanrea	53.074	53.694	106.768	3.353
Kota Makassar		734.008	743.853	1.477.861	8.408

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Makassar dengan 32.530 jiwa per Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Tamalanrea yaitu 3.353 per Km².

3. Aspek Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar adalah sebesar 62,04%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nya adalah sebesar 9,7%. Sebanyak 41,30% Penduduk Usia Kerja berpendidikan SMA dan menurut status pekerjaannya 55,64% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Tabel 2. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	696.158	629.933	643.368	-	629.183

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja ≥15 tahun	1.199.282	1.215.200	1.230.996	651.832	1.123.229
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58,05 %	59,70 %	59,27	58,72	62,04

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020-2024, masih tergolong rendah dan mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada beberapa tahun, namun secara umum angkanya masih berada di kisaran 58–62%. Artinya, masih terdapat sebagian besar penduduk usia kerja yang belum tergabung dalam angkatan kerja, baik karena menganggur, belum mencari pekerjaan, atau terlibat dalam aktivitas non-produktif.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Makassar, mengingat rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan terbatasnya produktivitas daerah. Rendahnya TPAK juga mencerminkan adanya hambatan struktural, seperti kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang layak, rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, serta belum optimalnya sistem informasi pasar kerja di tingkat lokal.

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek diantaranya kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak dan sanitasi.

a. Kemiskinan

Salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Makassar cenderung mengalami penurunan meskipun masih ada fluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19. Kota Makassar menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Makassar berada

di bawah rata-rata nasional, yang mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mencapai tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu yang signifikan, terutama antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran. Adapun data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2020	442.513	69.980	4,54
2	2021	475.444	74.690	4,82
3	2022	511.081	71.830	4,58
4	2023	570.286	80.320	5,07
5	2024	592.753	79.530	4,97

Sumber: Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2024

Garis kemiskinan di Kota Makassar tahun 2024 adalah sebesar 592.753 per kapita per bulan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 79.530 ribu jiwa atau 4,97% dari populasi penduduk miskin di Kota Makassar, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun demikian, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin masih mengalami fluktuasi.

b. Pendidikan

Dari sisi pendidikan, Makassar memiliki infrastruktur pendidikan yang relatif baik dengan banyaknya institusi pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan akses pendidikan yang belum merata di seluruh kecamatan. Tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah menunjukkan tren positif, tetapi peningkatan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperhatikan.

Tabel 2. 5 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

No	Kelompok Umur	2023	2024
1	15-24	99,88	100,00
2	15-59	99,72	99,83
3	15+	99,15	99,12

No	Kelompok Umur	2023	2024
4	60+	94,32	93,29

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

Angka melek huruf merupakan suatu visualisasi data yang menyajikan kemampuan individu atau kelompok dalam kegiatan membaca dan memahami sesuatu. Kemampuan membaca, menulis, mendengarkan aktif, dan memahami informasi. Setiap orang semestinya memiliki kemampuan ini karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-harinya.

Untuk mendukung peningkatan literasi ini, keberadaan sarana pendidikan menjadi faktor yang sangat krusial. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kota Makassar terbagi atas SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi. Sarana pendidikan tingkat SD, SMP, SMA persebarannya merata di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Terdapat 57 Perguruan Tinggi di Kota Makassar, hanya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang tidak memiliki Perguruan Tinggi dan SMK. Berikut data disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 6 Sarana Pendidikan Per Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan				
		SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1	Mariso	6	5	4	2	2
2	Mamajang	10	7	6	3	5
3	Tamalate	11	11	8	6	8
4	Rappocini	10	8	6	8	6
5	Makassar	14	11	8	3	2
6	Ujung Pandang	8	8	6	2	5
7	Wajo	5	5	3	1	2
8	Bontoala	11	10	7	3	3
9	Ujung Tanah	9	6	6	1	-
10	Kepulauan Sangkarrang	3	3	3	-	-
11	Tallo	14	12	6	2	2
12	Panakukang	11	11	9	6	8
13	Manggala	8	8	8	5	6
14	Biringkanaya	11	10	8	5	3
15	Tamalanrea	8	6	6	3	5
Kota Makassar		139	121	94	50	57

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

c. Kesehatan

Pada aspek kesehatan, Makassar memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang cukup lengkap dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Sarana kesehatan di Kota Makassar terdiri atas rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu dan apotek, Berikut data disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 7 Sarana Kesehatan Per Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024

No	Kecamatan	Sarana Kesehatan					
		Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Mariso	1	1	4	3	1	7
2	Mamajang	2	1	4	2	1	12
3	Tamalate	3	1	8	4	1	10
4	Rappocini	4	3	7	4	1	11
5	Makassar	-	1	2	3	1	11
6	Ujung Pandang	3	5	6	1	1	8
7	Wajo	2	2	2	2	-	7
8	Bontoala	2	1	5	2	3	7
9	Ujung Tanah	1	-	1	2	2	5
10	Kepulauan Sangkarrang	-	-	-	2	1	-
11	Tallo	1	-	8	3	3	11
12	Panakukang	4	1	6	4	2	10
13	Manggala	1	2	6	5	2	8
14	Biringkanaya	5	-	7	5	4	10
15	Tamalanrea	1	1	4	5	1	7
Kota Makassar		30	19	70	47	24	124

Sumber: Kota Makassar dalam Angka Tahun 2025

Jumlah rumah sakit umum di Kota Makassar tahun 2024 sebanyak 30, rumah sakit bersalin sebanyak 19, poliklinik sebanyak 70, puskesmas sebanyak 47, pustu sebanyak 24 dan apotek sebanyak 124. Persebaran sarana kesehatan hampir merata di seluruh kecamatan kecuali Kepulauan Sangkarrang yang hanya memiliki puskesmas dan puskesmas pembantu saja.

d. Perumahan Layak dan Sanitasi

Kesejahteraan juga dapat dilihat dari akses terhadap perumahan layak dan sanitasi. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina

kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program, di antaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR). Namun di beberapa wilayah pinggiran, permasalahan perumahan tidak layak huni dan kurangnya infrastruktur dasar masih menjadi tantangan.

Secara umum tempat tinggal di Kota Makassar menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk yang ada di Kota Makassar menempati rumah dengan luas di atas 50 m². Jika diasumsikan satu rumah tangga dihuni oleh 4-5 orang, maka lebih dari 50% rumah tangga yang ada di Kota Makassar menghuni rumah yang luas lantainya cukup layak.

Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kota Makassar Tahun 2023-2024

No	Luas Lantai	2023	2024
1	< 50	29,18	25,29
2	50 - 99	41,97	38,75
3	100 - 149	14,83	21,14
4	150+	14,01	14,82

Sumber: Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2024

Adapun fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Tabel 2. 9 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Sanitasi di Kota Makassar Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023	2024
1	Fasilitas Tempat Buang Air Besar		
	- Sendiri	92,76	92,31
	- Lainnya	7,24	7,69
2	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		

No	Uraian	2023	2024
	- Tangki/IPAL/SPAL	99,61	98,52
	- Lainnya	0,39	1,48

Sumber: Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa presentase rumah tangga dalam menggunakan fasilitas buang air besar mayoritas rumah tangga di Kota Makassar menggunakan tangki/ IPAL/ SPAL sebagai tempat pembuangan akhir, yaitu sebesar 98,52%.

5. Aspek Produk Unggulan Kota Makassar

Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan dukungan pemerintah, berbagai sektor strategis di Makassar menunjukkan potensi besar untuk menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing secara regional hingga internasional. Potensi tersebut tersebar dalam empat sektor utama: pertanian & perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

a. Sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Meskipun wilayah Makassar didominasi oleh kawasan perkotaan, sektor pertanian dan perikanan tetap memainkan peran penting dalam penyediaan bahan pangan serta penggerak ekonomi lokal. Hasil laut seperti ikan tuna, cakalang, dan bandeng menjadi komoditas unggulan yang disuplai melalui pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti Pelabuhan Paotere dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Makassar.

Selain itu, potensi budidaya rumput laut dan hasil peternakan seperti sapi potong dan ayam pedaging turut mendukung kebutuhan kuliner dan industri olahan pangan di kota ini. Kegiatan *urban farming*, hidroponik, dan pertanian kota mulai berkembang sebagai solusi pangan lokal berkelanjutan.

b. Sektor Industri

Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat industri pengolahan dan logistik untuk kawasan Indonesia Timur. Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan pembangunan Pelabuhan Makassar *New Port* (MNP) mendukung tumbuhnya industri berbasis pengolahan

makanan, hasil laut, kerajinan tangan, hingga tekstil lokal seperti tenun Bombang dan Lontara.

Produk-produk UMKM dari sektor industri kreatif juga turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di bidang kuliner, *fashion*, kerajinan serat alam, dan percetakan. Industri ini memiliki peluang besar untuk naik kelas melalui peningkatan kualitas, kemasan, serta akses pasar digital dan ekspor.

c. Sektor Perdagangan dan Jasa

Sebagai kota dagang utama di Indonesia Timur, Makassar menjadi pusat aktivitas distribusi barang dan jasa. Berbagai pusat perdagangan tradisional dan modern seperti Pasar Butung, Trans Studio Mall, dan pusat grosir lainnya menjadi motor perputaran ekonomi regional.

Jasa transportasi, ekspedisi, keuangan, serta jasa digital berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan *e-commerce* dan *startup* lokal. Makassar juga menjadi pusat layanan pendidikan dan kesehatan unggulan, dengan kehadiran institusi besar seperti Universitas Hasanuddin dan RS Wahidin Sudirohusodo. Hal ini memperkuat posisi Makassar sebagai kota jasa yang menopang kawasan timur Indonesia.

d. Sektor Pariwisata

Di sektor pariwisata, Makassar memiliki potensi besar yang terus dikembangkan. Destinasi ikonik seperti Pantai Losari, Benteng Rotterdam, serta pulau-pulau kecil seperti Samalona dan Kodingareng Keke menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.

Selain keindahan alam, kekuatan budaya lokal Bugis-Makassar juga menjadi nilai jual utama. Wisata kuliner yang tidak asing seperti Coto Makassar, Es Pisang Ijo, dan Jalangkote telah menjadi identitas kota yang sangat digemari.

B. Gambaran/Kondisi Riset dan Inovasi di Kota Makassar

1. Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Makassar memiliki fondasi kuat untuk mengeksekusi kebijakan berbasis bukti terlihat dari kultur inovasi yang diakui (IGA), lonjakan kematangan SPBE, serta infrastruktur dan literasi digital warga yang kian merata. Namun, dua celah krusial masih menghambat akselerasi:

- a. *interoperabilitas* data banyak sistem layanan dan sensor berjalan sendiri-sendiri tanpa standar API, SSO, dan katalog data terpadu;
- b. *pipeline* kajian → *pilot* → adopsi lintas OPD yang belum baku, sehingga temuan teknis sering berhenti di laporan, bukan menjadi regulasi, SOP, atau penganggaran.

Solusinya adalah membangun *Policy Lab* di bawah Bappeda sebagai orkestrator proses bukti:

- 1) menetapkan *intake* masalah, metodologi evaluasi, desain uji coba, dan *after action review*;
- 2) menerbitkan standar *interoperabilitas* (API-first, SSO, data catalog, BIM/GIS) agar data dapat dipakai ulang lintas sektor; dan
- 3) mengikat implementasi dengan KPI adopsi rekomendasi yang ketat misalnya persentase rekomendasi yang masuk Perwali/SOP, waktu tempuh dari *policy brief* ke keputusan, dan dampak terukur pada indikator layanan.

Dengan tiga hal ini bekerja serempak, kemampuan kota bukan hanya menghasilkan rekomendasi yang solid, tetapi juga mengonversinya menjadi perubahan nyata, layanan publik lebih cepat dan terintegrasi, daya saing ekonomi naik lewat produktivitas dan efisiensi logistik, serta kualitas lingkungan membaik melalui intervensi yang terarah dan terukur.

2. Penentuan Tema Prioritas

Penentuan tema prioritas riset dan inovasi yang disusun sebagai Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan iptek bidang ekonomi dan

infrastruktur Kota Makassar Tahun 2025–2029 merujuk pada arahan RPJMD Kota Makassar terbaru khususnya kerangka “*Penguatan Landasan Transformasi*” serta indikator kinerja yang sudah dipantau di dokumen daerah

a. Tema Prioritas dan Arah Implementasi

1) Transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi terapan

Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan diarahkan melalui tiga faktor utama yang saling menguatkan:

- a) Peningkatan kualitas SDM dengan kurikulum vokasi terapan, *upskilling/reskilling digital*, serta sertifikasi berbasis kompetensi yang langsung terhubung ke kebutuhan pabrik, bengkel, gudang, dan *back office* niaga
- b) Pengembangan kawasan industri terintegrasi yang menyatukan ruang produksi, logistik, layanan perizinan satu pintu, *testing dan certification lab*, serta *supplier development* agar IKM/UMKM dapat masuk rantai pasok
- c) Adopsi teknologi dan inovasi yang pragmatis dan terapan untuk perbaikan proses, otomasi ringan (misal *computer vision* untuk *quality control*, sensor sederhana untuk *preventive maintenance*), dan AI ringan untuk UMKM/IKM (peramalan permintaan, *inventory reorder point*, *dynamic pricing*, dan *copilot desain* kemasan). Iptek yang akan diterapkan di Makassar Creative Hub setiap kecamatan sebagai simpul pelatihan, klinik sertifikasi, *maker space*/laboratorium mini, serta inkubasi produk dan jasa berbasis teknologi, sehingga pelaku usaha memperoleh keterampilan, standar mutu, akses alat, mentor, dan jalur ke pasar dalam satu ekosistem yang konsisten.

2) Digitalisasi layanan publik & infrastruktur cerdas (*Smart Infrastructure*)

Arah transformasi layanan publik difokuskan pada peningkatan proporsi layanan online yang benar-benar terintegrasi end-to-end dari permohonan hingga pelacakan status dan

pembayaran. Langkah kuncinya: merapikan katalog layanan dan proses (BPMN), menetapkan satu system secara terpadu dengan API *gateway* dan standar pertukaran data (metadata, skema, SSO), lalu menghubungkan aplikasi lintas OPD agar tidak lagi berdiri sendiri. Hal ini dibarengi penguatan SDM TIK (*product owner*, arsitek data, analis proses) dan peremajaan infrastruktur (jaringan, *server/cloud*, IAM, *observabilitas*), serta tata kelola keamanan (audit TIK berkala, *zero trust*, enkripsi data) dan *change management* supaya adopsi pengguna baik aparatur maupun warga naik secara konsisten.

Untuk infrastruktur kota, implementasi iptek diarahkan pada *asset management* jalan jembatan berbasis IoT/GIS: registrasi aset digital (lengkap dengan geotag), sensor kondisi/getaran di jembatan terpilih, serta pengukuran beban lalu lintas untuk memprediksi umur layanan. *Computer vision* diterapkan pada citra jalan/trotoar (kamera mobile/edge) guna menilai retak, deformasi, dan hambatan fungsional secara objektif dan berkala. Semua aliran data masuk ke *decision dashboard* pengadaan dan pemeliharaan, sehingga prioritas pekerjaan dan belanja (*capex/opex*) dapat ditentukan berbasis risiko dan kinerja aset, bukan sekadar laporan manual. Ke depan, penganggaran bisa menggunakan kontrak berbasis kinerja (SLA/penalti) yang ditautkan langsung ke indikator kondisi di *dashboard*.

Dengan kombinasi integrasi layanan, *asset intelligence* dan tata kelola data yang kuat, kota mendapatkan siklus perbaikan berkelanjutan: data → prioritas → eksekusi → evaluasi → perbaikan proses yang pada akhirnya memangkas waktu layanan, meningkatkan keandalan infrastruktur, dan menumbuhkan kepercayaan publik.

3) Peningkatan kualitas & ketahanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air & sanitasi)

Perbaikan Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan dan Keciptakaryaannya perlu dimulai dari disiplin *lifecycle management*

aset. Baseline menunjukkan panjang jalan kondisi baik 1.411,90 km pada tahun 2024 bersamaan dengan tren penurunan indeks indikasi bahwa kualitas pelaksanaan, ketepatan pemeliharaan, dan manajemen genangan belum optimal. Resepnya:

- a) *Planning* berbasis data risiko;
- b) *Delivery* dengan kendali mutu yang ketat;
- c) Preventif dan Prediktif; serta
- d) Evaluasi berbasis kinerja.

Di tahap perencanaan dan konstruksi, terapkan BIM GIS terintegrasi: setiap ruas jalan, jembatan, drainase, trotoar, dan hidran kebakaran memiliki sistem digital yang tertaut lokasi (GIS) dan spesifikasi teknis (BIM). Hal ini memungkinkan asset register yang lengkap, *condition rating* yang seragam, serta *traceability* dari desain konstruksi pemeliharaan. Untuk operasi, gunakan sistem prioritisasi pemeliharaan berbasis risiko banjir yang menggabungkan skenario hujan, elevasi, kapasitas drainase, dan intensitas lalu lintas untuk menyusun *ranked list* pekerjaan (overlay ruas rawan genangan dengan nilai strategis jaringan).

Pada sisi air permukaan dan drainase, bangun *digital twin* drainase kawasan: model hidraulik yang dikalibrasi data curah hujan dan sensor genangan untuk mensimulasikan kapasitas, *bottleneck* (misal pelebaran saluran, sumur resapan, *permeable pavement*, atau penjadwalan sedot lumpur). Hasil simulasi memberi “*heatmap* risiko” yang langsung terhubung dengan paket pekerjaan pemeliharaan dan penganggaran tahunan. Di layanan air minum dan sanitasi, jalankan *non revenue water (NRW) analytics* per zona DMA guna menargetkan *pressure management*, deteksi kebocoran, metering akurat, dan *pipe replacement* yang paling berdampak ke reliabilitas layanan permukiman. Untuk ruang pejalan kaki dan keselamatan, lakukan audit trotoar fungsional & aksesibilitas (lebar bersih, bebas hambatan, *ramp*, *tactile paving*) dan proteksi kebakaran (jarak jangkauan hidran, tekanan layanan), lalu *closing the loop* lewat perbaikan desain standar dan inspeksi berkala.

4) Ekonomi hijau dan biru berbasis iptek

Percepatan kenaikan Indeks Ekonomi Hijau ditunjang factor yang saling terkait. Pertama, efisiensi energi pada industri/jasa dan aset publik melalui *energy analytics*, audit IKE (intensitas konsumsi energi), pemantauan beban puncak, otomatisasi HVAC pencahayaan, *retrofit* berbiaya rendah (*seal* pintu, *variable speed drive*, *power factor correction*), dan pemanfaatan PLTS atap untuk gedung layanan dan area pelabuhan.

Kedua, pengelolaan kualitas udara air berbasis data: jaringan sensor PM_{2.5}/PM₁₀-NO₂-SO₂ di koridor padat serta stasiun kualitas air (pH, DO, BOD, COD, amonia) di muara kanal pelabuhan, yang terintegrasi ke dasbor kebijakan untuk menetapkan ambang intervensi (misal pembatasan truk pada jam tertentu, skema *low emission zone*, jadwal pengerukan/sedot lumpur).

Ketiga, ekonomi sirkular: skema *extended producer responsibility* (EPR) lokal untuk kemasan, *material recovery facility* kecamatan, dan *industrial symbiosis* (panas buang/purging air proses dimanfaatkan pelaku lain) agar laju timbunan dan emisi turun seiring kenaikan *recovery rate material*.

Di sisi Ekonomi Biru, potensi Sulsel terutama logistik pelabuhan, pariwisata bahari, dan perikanan akuakultur diakselerasi melalui teknologi. Pada pelabuhan, terapkan *energy analytics* dan elektrifikasi peralatan bongkar muat, *shore power* (*cold ironing*) bagi kapal sandar, serta pengaturan arus dan antrean berbasis data agar konsumsi BBM dan emisi menurun. Untuk perikanan akuakultur, dorong budidaya ramah lingkungan (RAS/bioflok, sensor kualitas air kolam, pakan presisi, aerasi efisien) dan *cold chain* cerdas: reefer dengan sensor suhu kelembapan, pelacakan waktu nyata, dan optimasi rute agar *post harvest loss* turun dan mutu produk ekspor naik. Pariwisata bahari diarahkan ke *eco tourism* yang melindungi mangrove, lamun, terumbu, dengan standar operasional rendah jejak karbon (kapal rendah emisi,

pengelolaan sampah berbasis sumber) sehingga jasa ekosistem tetap terjaga.

Implementasi iptek menjadi sangat penting:

- a) monitoring lingkungan real-time (udara/air) dengan data lake dan alert otomatis;
- b) *energy analytics* untuk gedung/pelabuhan mendeteksi anomali, *peak shaving*, dan *predictive maintenance*;
- c) teknologi budidaya ramah lingkungan (sensor IoT, algoritme kontrol kualitas air, RAS/bioflok);
- d) *cold chain* cerdas yang mengikat sensor, rute, SOP penanganan dingin dalam satu dasbor. Seluruh alur data diberi *governance* (katalog data, SSO, API) sehingga kebijakan bisa data-driven dan investasi tepat sasaran.

5) Kawasan industri dan logistik terintegrasi (hub dan koridor nilai tambah)

Pengembangan kawasan industri terintegrasi diarahkan menjadi ekosistem produksi logistik yang menyatu dengan jaringan kota dan pelabuhan. Tata letaknya menggabungkan zona manufaktur bernilai tambah/teknologi tinggi, *shared utilities* (air, listrik andal, pengolahan limbah), pusat distribusi, *customs facilitation/one stop service*, serta multimodal hub (jalan arteri, jalur truk, kedekatan ke pelabuhan) sehingga biaya logistik turun dan lead time produksi dan ekspor menyusut. Kawasan didesain dengan persiapan lahan siap bangun, standar bangunan modular, *green/energy-ready*, dengan insentif yang mengaitkan keteraturan lingkungan dan transfer teknologi ke IKM lokal. Orientasi utamanya: menaikkan nilai tambah lokal lewat proses hilirisasi, *precision manufacturing*, dan otomasi, sekaligus memperkuat jejaring pemasok di sekitar kawasan agar *import content* menurun.

Implementasi iptek menjadi poin utama dalam integrasi. Industrial Data Hub mengonsolidasikan data perizinan, profil tenant, kapasitas mesin, kebutuhan bahan baku, dan dokumen sehingga pemerintah/administrator kawasan bisa merencanakan

infrastruktur, memantau kinerja, dan menghubungkan permintaan pasokan secara cepat. Sistem Manajemen Logistik Kota Pelabuhan menyediakan *tracking* arus barang, *slotting* bongkar muat, dan *service level agreement* (SLA) antarpelaku mengurangi antrean, *dwell time*. Program *supplier development* menyiapkan IKM lokal (sertifikasi mutu, *process upgrade*, keandalan pengiriman) agar masuk rantai pasok tenant utama; *toolboxnya* mencakup audit proses, pendampingan teknis, kontrak payung, dan vendor rating berbasis data dari Data Hub dan sistem logistik.

Dengan kombinasi layout kawasan yang tepat, data yang kuat, dan peningkatan kapabilitas pemasok lokal, kawasan industri berfungsi sebagai mesin pertumbuhan menarik investasi, memperbaiki produktivitas, dan memperpendek jarak antara pabrik, pasar, serta pelabuhan.

6) Mobilitas perkotaan & drainase cerdas berketahanan iklim

Peningkatan konektivitas kota, keselamatan, dan ketahanan terhadap genangan/banjir harus dikelola sebagai satu ekosistem operasi jaringan jalan. Pada sisi lalu lintas, diterapkan *adaptive traffic control* (ATC) di koridor kunci dengan detektor volume kecepatan antrian pada tiap lengan simpang; pengaturan *cycle split offset* yang otomatis menyesuaikan beban; serta prioritas terukur untuk angkutan umum dan penyeberang jalan pada zona sekolah/pasar.

ATC terhubung ke papan pesan dinamis (VMS) dan modul manajemen kejadian agar insiden, pekerjaan jalan, atau acara besar segera memicu skenario sinyal alternatif dan *re-routing* koridor. Pada sisi hidrologi kota, dibangun peta kerentanan banjir dinamis melalui fusi data sensor genangan (ultrasonik/tekanan), radar hujan beresolusi tinggi, DEM/kemiringan, dan kapasitas saluran; peta ini memicu peringatan dini dan, jika ambang terlampaui, mengirim perintah ke ATC untuk melakukan detour otomatis serta ke tim lapangan untuk intervensi cepat (pengerukan sedimen, pembukaan inlet tersumbat).

Layanan harian kota terutama angkut sampah dan air limbah dioptimalkan dengan perencanaan rute berbasis GIS (VRP) yang mempertimbangkan kapasitas armada, *time windows* TPS/IPLT, kondisi jalan terkini, dan titik genangan, sehingga jarak tempuh, BBM, serta keterlambatan layanan turun signifikan.

Sistem operasi ditopang pusat komando terpadu dengan dashboard yang menyatukan tiga lapis data:

- a) Status simpang/koridor (LOS, antrian, travel time),
- b) *Heatmap* risiko genangan *real time* dan prakiraan 1–3 jam,
- c) Telemetri armada (posisi, muatan, kepatuhan rute).

Tata kelola keselamatan menerapkan prinsip *Safe System*: penetapan kecepatan aman berbasis fungsi jalan, *traffic calming* di lingkungan rentan, *protected crossing* dan penerangan standar, serta *black-spot treatment* berbasis rekam insiden. Siklus kerja ditetapkan data → keputusan → aksi → evaluasi: sinyal menyesuaikan dalam menit, rute armada berubah dalam jam, dan paket pemeliharaan drainase dieksekusi dalam hari semuanya terekam untuk *after action review* dan peningkatan SOP.

Dengan orkestrasi ATC, intelijen *hidrometeorologi* dan *smart routing* layanan kota, jejaring jalan menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, sekaligus menekan biaya operasi harian.

7) Penguatan ekosistem riset inovasi dan talenta (triple helix)

Penguatan talenta dan inovasi diarahkan lewat *vocational alignment* yang benar-benar menyatu dengan kebutuhan industri serta pendorongan industri berbasis teknologi tinggi/nilai tambah. Kurikulum vokasi dipetakan ke standar kompetensi jabatan (*occupational map*) dan standar industri (ISO, IATF, HACCP, GMP), lalu diterjemahkan ke *micro credentials* (otomasi, kontrol kualitas, data dan AI terapan, keselamatan kerja), mekanisme *Recognition of Prior Learning* (RPL) dan *upskilling/reskilling* dipakai agar pekerja eksisting cepat naik kelas ke peran teknologis (operator robotik ringan, teknisi instrumentasi, *process analyst*). Untuk

menumbuhkan industri teknologi tinggi, pemerintah daerah menyiapkan lab bersama/*maker space* (CNC, printer 3D, elektronik), fasilitas uji dan sertifikasi, serta insentif berbasis kinerja (pengurangan retribusi/kemudahan lahan bagi tenant yang melakukan transfer teknologi, dan menyerap tenaga tersertifikasi).

Sinergi kampus, BUMD, pelaku usaha difokuskan pada proyek percontohan (*pilots*) yang cepat diuji dan di scale: *smart water* (NRW *analytics*) bersama Perumda, *energy analytics* di gedung layanan/RS BUMD, *predictive maintenance* alat pelabuhan, *cold chain* cerdas perikanan, serta route optimization layanan sampah. Setiap pilot punya paket lengkap: masalah yang jelas, spesifikasi *outcome*, data pipe (API), *sandbox* regulasi bila perlu, dan rencana replikasi. Selanjutnya, dilembagakan *procurement-driven innovation*: pengadaan berbasis *outcome* (kinerja/IKE/MTBF), *pre-commercial procurement* (PCP), *challenge based procurement* untuk mencari teknologi terbaik lintas penyedia, dan kontrak berbasis kinerja yang membayar berdasarkan capaian indikator, bukan sekadar serah terima barang. Dengan demikian, belanja pemerintah menjadi terarah bagi teknologi lokal sekaligus jaminan *adoption* yang terukur.

b. Peta Jalan (2025–2029)

1) 2025 (Konsolidasi dan *Quick Wins*)

Fokus umum: penyelarasan Renstra OPD, penguatan basis data, regulasi turunan, dan pelaksanaan *quick wins* awal sesuai visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”.

- Misi 1 Ekonomi dan kerja: *kick off* ekosistem UMKM/ekraf (*creative hub*, akses modal, gerai UMKM), stabilisasi harga dan dorong PAD.
- Misi 2 SDM: percepatan akses dan kualitas layanan pendidikan kesehatan dasar.
- Misi 3 Infrastruktur dan tata ruang: penyusunan prioritas proyek berkeadilan dan penguatan integrasi dengan RTRW.

- Misi 4 Inovasi, budaya, pariwisata: desain ekosistem inovasi dan transformasi digital daerah.
- Misi 5 Tata kelola dan ketertiban: penguatan reformasi birokrasi dan layanan publik adaptif.
- Misi 6 Inklusi sosial: penguatan layanan dan perlindungan kelompok rentan.
- Misi 7 Lingkungan dan bencana: baseline IKLH/ RTH/ persampahan dan rencana penguatan mitigasi.

2) 2026 (Percepatan Layanan Dasar dan Ekosistem Ekonomi)

Fokus umum: memperluas cakupan program prioritas yang sudah berjalan.

- Misi 1: *scale up* pusat-pusat UMKM, PKL tertata, ekonomi pesisir pulau (mangrove, budidaya).
- Misi 2: peningkatan kualitas SDM lewat program pemerataan layanan dasar.
- Misi 3: percepatan infrastruktur layanan kota dan konektivitas kawasan.
- Misi 4: penguatan kapasitas inovasi dan ekonomi kreatif pendukung pariwisata.
- Misi 5 – Misi 7: peningkatan ketertiban umum, layanan inklusif, dan program lingkungan.

3) 2027 (Integrasi Kawasan & Penguatan Daya Saing)

Fokus umum: integrasi lintas OPD dan pendekatan kewilayahan.

- Misi 1: investasi kompetitif, penguatan rantai nilai sektor unggulan, ketahanan pangan perkotaan.
- Misi 3: proyek infrastruktur strategis yang menutup ketimpangan antar kawasan.
- Misi 4: paket event dan destinasi berbasis budaya/ekraf.
- Misi 5: penguatan integritas dan digitalisasi layanan.

4) 2028 (Pematangan Inovasi, Inklusi, dan Resiliensi)

Fokus umum: konsolidasi dampak dan penguatan kualitas.

- Misi 2 dan Misi 6: penguatan program inklusi sosial, gender, disabilitas, kepemudaan-olahraga.

- Misi 7: akselerasi RTH, pengelolaan sampah, adaptasi iklim dan mitigasi bencana berbasis komunitas.
- Misi 4: peningkatan kontribusi ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap PDRB.

5) 2029 (Puncak Capaian dan Fondasi Periode Berikutnya)

Fokus umum: memastikan indikator utama mencapai target 2029 serta menyiapkan jembatan kebijakan menuju RPJMD berikutnya.

- Penyempurnaan sistem monitoring–evaluasi RPJMD.
- Penguatan keberlanjutan program yang paling berdampak pada 4 pokok visi.

3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar Sesuai Tema Prioritas

Sebagai kota pesisir yang menjadi simpul perdagangan dan layanan publik di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki modal inovasi yang kuat (budaya pemerintahan inovatif, kemajuan SPBE, dan literasi digital yang kian merata). Namun, agar riset benar-benar menjadi mesin kebijakan berbasis bukti dan pengungkit daya saing, ekosistemnya perlu ditata

Kondisi ekosistem riset dan inovasi Kota Makassar yang dipetakan menurut tema prioritas, setiap tema menyoroti modal yang sudah ada, tantangan kunci, peluang riset/teknologi, serta implikasi kebijakan dan indikator dampak sebagai landasan penyusunan rencana aksi yang terukur dan mudah direplikasi lintas-OPD.

a. Transformasi ekonomi berbasis inovasi & teknologi terapan

Makassar memiliki basis IKM/UMKM yang besar, jaringan kampus inkubator yang aktif, dan mulai mempraktikkan otomasi/AI ringan pada proses produksi serta pemasaran. Namun, produktivitas rata-rata masih rendah dan sertifikasi mutu belum merata menandakan perlunya industrial & innovation data hub sebagai “peta” permintaan pasokan teknologi, serta Klinik Transformasi IKM untuk legalitas, standardisasi, dan *go to market*. Riset terapan diarahkan pada *process improvement* (QC berbasis *computer vision*, *predictive maintenance* sederhana) dan desain produk/kemasan yang lebih

kompetitif. Implikasi kebijakannya adalah insentif berbasis kinerja (sertifikasi, *local content*, *supplier readiness*) dan orkestrasi program lintas OPD. Dampaknya diukur melalui kenaikan produktivitas per tenaga kerja subsektor unggulan, jumlah pelaku tersertifikasi/terinkubasi, kontrak rantai pasok lokal, dan nilai tambah manufaktur.

b. Digitalisasi layanan publik & infrastruktur cerdas

Kematangan SPBE meningkat dan hampir separuh layanan sudah online, tetapi integrasi antar aplikasi dan pemanfaatan data *real time* masih timpang. Ekosistem perlu arsitektur data terpadu (API *gateway*, SSO, katalog data) sebagai tulang punggung riset kebijakan dan pengambilan keputusan operasional. Pada infrastruktur, *asset management* jalan-jembatan berbasis IoT/GIS dan *computer vision* kondisi perkerasan/trotoar memberi “sensorium” kota yang objektif untuk prioritisasi pemeliharaan. Agenda riset menyorot model *interoperabilitas*, tata kelola data, dan *decision dashboard* lintas OPD. Implikasi kebijakan: penetapan standar teknis (API-first, SSO), kontrak layanan berbasis SLA, dan *change management* pengguna. Indikator dampak: persentase layanan terintegrasi, MTBF/MTTR aset, tingkat pemakaian data *real time*, dan skor SPBE domain Layanan & Tata Kelola.

c. Peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur dasar

Modal utama kota adalah jaringan jalan yang luas dan unit teknis yang berpengalaman, tetapi disiplin *lifecycle management* aset dan prioritisasi pemeliharaan berbasis risiko banjir belum konsisten; NRW pada sebagian zona air minum juga masih tinggi. Ekosistem riset menitikberatkan BIM-GIS terintegrasi untuk *as built*, digital twin drainase kawasan rawan genangan, serta NRW analytics perDMA. Hasil kajian menjadi dasar paket pekerjaan yang jelas mulai dari sedot lumpur adaptif hingga penggantian pipa strategis. Implikasi kebijakan: *stage gate* proyek (desain-konstruksi-O&M), spesifikasi teknis standar, dan budget tagging tematik (banjir, keselamatan, akses pejalan). Dampak dipantau via indeks layanan kebinamargaan/keciptakarya,an,

persentase jalan kondisi baik, panjang trotoar fungsional & aksesibel, jumlah jembatan layak fungsi, serta penurunan NRW.

d. Ekonomi hijau dan biru berbasis IPTEK

Kenaikan indeks ekonomi hijau dan posisi strategis pelabuhan perikanan memberikan momentum untuk menggabungkan efisiensi energi, perbaikan kualitas udara-air, dan hilirisasi sumber daya maritim. Riset dan inovasi berfokus pada monitoring lingkungan real time, *energy analytics* gedung/pelabuhan, budidaya RAS/bioflok ber-sensor, serta *cold chain* cerdas untuk menekan post-harvest loss. Temuan riset mendorong kebijakan *low-emission operations* dan *eco tourism* berbasis konservasi. Indikator dampak: skor indeks hijau & kontribusi sektor biru, intensitas energi (IKE) gedung/pelabuhan, penurunan *post harvest loss*, dan *recovery rate material* sirkular.

e. Kawasan industri dan logistik terintegrasi

Dekatnya kota dengan pelabuhan dan ekosistem perikanan/manufaktur ringan adalah keunggulan, namun *dwell time*, biaya logistik, dan kesiapan pemasok lokal masih menjadi kendala. Ekosistem riset menyiapkan Industrial Data Hub untuk transparansi kapasitas permintaan, Sistem Manajemen Logistik Kota Pelabuhan serta program supplier development (sertifikasi, process upgrade) agar IKM masuk rantai pasok tenant utama. Kebijakan perlu mengakomodasi *plug and play estate* (utilitas bersama, testing lab, OSS) dan customs facilitation yang memperlancar arus barang. Dampak diukur lewat pertumbuhan PMTB, kenaikan share industri pengolahan dalam PDRB, pemangkasan *dwell time & truck turn around*, dan meningkatnya kontrak pemasok lokal.

f. Mobilitas perkotaan dan drainase cerdas berketahanan iklim

Kinerja jaringan jalan ditentukan oleh konektivitas, keselamatan, dan ketahanan terhadap genangan tiga aspek yang perlu dikelola sebagai satu ekosistem operasi. Riset diarahkan pada *adaptive traffic control* di koridor kunci, peta kerentanan banjir berbasis sensor & radar hujan yang menyatu dengan manajemen kejadian, dan optimasi rute layanan kota (sampah/air limbah) dengan VRP. Hasil riset memberi

playbook respons mulai dari *detour* otomatis saat genangan hingga penjadwalan armada dinamis. Implikasi kebijakan: pusat komando terpadu (traffic-drainase-armada), SOP lintas-dinas, dan kontrak berbasis *outcome* (waktu tempuh, durasi genangan). Dampak dipantau via waktu tempuh koridor kunci, durasi/luas genangan, serta indeks keselamatan jalan (fatal/berat per 100 jt km + skor audit).

g. Ekosistem riset inovasi dan talenta (*triple helix*)

Kapasitas kampus, BUMD layanan, dan budaya inovasi pemerintahan adalah modal kuat, tetapi *vocational alignment* ke standar industri dan kanal “riset → kebijakan → operasi” belum sepenuhnya mapan. Agenda penguatan meliputi *micro credentials*/RPL untuk peran teknologis (data, IoT, BIM, asset management), pendirian *Policy Lab* di Bappeda untuk mengelola *pipeline* kajian-pilot-adopsi, serta *procurement-driven innovation* (PCP, challenge-based) agar belanja publik menjadi mesin adopsi teknologi. Dampak dievaluasi dari jumlah proyek iptek bersama, paten/model/proses inovatif yang benar-benar diadopsi, serapan tenaga kerja tersertifikasi, dan *wage uplift* sebagai indikator nilai tambah kompetensi.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI

Riset dan inovasi memegang peranan krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, terutama dalam konteks pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui riset, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang belum tergarap secara optimal, seperti komoditas unggulan, sektor jasa, ekonomi kreatif, maupun potensi kawasan strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Riset juga berfungsi sebagai alat diagnostik untuk memahami akar masalah, hambatan struktural, serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Hasil-hasil riset ini kemudian menjadi landasan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Sementara itu, inovasi sebagai turunan dari proses riset berperan penting dalam menciptakan solusi kreatif, efisien, dan kontekstual terhadap berbagai tantangan ekonomi lokal, baik dalam skala mikro maupun makro. Inovasi memungkinkan pengembangan teknologi tepat guna, model bisnis baru, serta pendekatan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dalam jangka panjang, sinergi antara riset dan inovasi tidak hanya mampu mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat di daerah menjadi keharusan strategis untuk mewujudkan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

A. Tantangan Riset dan Inovasi

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan serta akselerasi inovasi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar yang kini bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi

Daerah (BRIDA) Kota Makassar memegang peranan strategis dalam menjembatani kebutuhan pembangunan daerah dengan pendekatan berbasis riset dan inovasi.

Peran ini semakin penting seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Dalam menjalankan fungsinya, BRIDA Kota Makassar diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian ilmiah, tetapi juga mampu memastikan bahwa hasil riset dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan, program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, BRIDA Kota Makassar dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah.

Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya peran dan fungsi Balitbangda sebagai motor penggerak ekosistem riset dan inovasi daerah yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Peneliti Masih Belum Merata

Salah satu tantangan utama dalam penguatan riset dan inovasi di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Saat ini, jumlah peneliti masih tergolong rendah dibandingkan dengan kebutuhan nasional, terutama di luar Pulau Jawa. Ketimpangan distribusi ini menyebabkan daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ilmu pengetahuan kesulitan mengembangkan potensi riset secara mandiri.

Selain itu, banyak peneliti menghadapi kendala internal di lingkungan kerja mereka. Alih-alih fokus pada kegiatan penelitian, tidak sedikit yang justru terbebani oleh tugas-tugas administratif dan birokrasi yang menyita waktu dan energi. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan kualitas luaran riset yang dihasilkan. Di sisi lain, kesempatan untuk mengikuti pelatihan,

peningkatan kapasitas, dan pembinaan karier juga masih sangat terbatas.

2. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Riset

Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas penunjang riset menjadi salah satu tantangan nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Banyak perguruan tinggi dan lembaga litbang di Makassar, belum memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium yang lengkap, ruang inkubasi teknologi, maupun *co-working space* yang mendukung kolaborasi antar peneliti masih sangat terbatas. Padahal, ruang-ruang kolaboratif semacam ini sangat penting dalam membangun ekosistem inovasi yang dinamis dan kreatif.

Sehingga peneliti tidak memiliki akses terhadap fasilitas riset yang mutakhir, baik dalam bentuk peralatan laboratorium, teknologi pendukung, maupun jaringan kerja sama internasional. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas dan skala riset yang bisa dilakukan, terutama dalam bidang teknologi terapan dan inovasi produk lokal.

3. Minimnya Anggaran untuk Kegiatan Riset dan Inovasi

Tantangan lain muncul dari rendahnya anggaran daerah (APBD) yang dialokasikan secara khusus untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, sehingga membatasi ruang gerak Balitbangda dalam melakukan penelitian yang bersifat aplikatif dan solutif terhadap isu-isu strategis pembangunan Kota Makassar. Keterbatasan integrasi antara hasil riset dan perumusan kebijakan publik juga masih menjadi hambatan, di mana hasil kajian Balitbangda seringkali belum dijadikan sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah teknis.

4. Rendahnya Literasi Riset dan Inovasi di Kalangan Pemerintah dan Publik

Rendahnya literasi riset dan inovasi di kalangan pemerintah dan publik menjadi salah satu tantangan mendasar dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Di tingkat

pemerintah, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya riset menyebabkan kebijakan publik sering kali tidak berbasis data dan bukti ilmiah, sehingga berpotensi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Selain itu, minimnya alokasi anggaran untuk penelitian mencerminkan rendahnya prioritas terhadap pengembangan inovasi dalam agenda pembangunan nasional.

Sementara itu, di kalangan masyarakat, rendahnya apresiasi terhadap hasil riset dan minimnya akses terhadap literatur ilmiah mengakibatkan kurangnya partisipasi publik dalam proses inovasi. Hal ini diperparah oleh keterbatasan sistem pendidikan dalam menumbuhkan budaya berpikir kritis dan ilmiah sejak dini. Akibatnya, kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat tidak berjalan optimal, dan potensi inovasi lokal yang seharusnya bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa pun kurang tergali dan terimplementasi dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi riset dan inovasi melalui kebijakan edukatif, peningkatan akses informasi, serta pembudayaan riset di berbagai lapisan masyarakat.

5. Belum Terbangunnya Sistem Informasi Riset Daerah

Belum terbangunnya sistem informasi riset daerah yang terpadu dan efektif menjadi kendala serius dalam pengembangan riset dan inovasi di tingkat lokal. Banyak daerah masih menghadapi kesulitan dalam mengelola dan mengakses data riset yang relevan dengan kebutuhan mereka, sehingga informasi yang tersedia seringkali tersebar, tidak terstruktur, dan sulit dijangkau oleh para peneliti, pembuat kebijakan, maupun pelaku inovasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera membangun dan mengintegrasikan sistem informasi riset yang mudah diakses, transparan, dan terstandarisasi agar dapat mendukung percepatan inovasi dan pemberdayaan potensi lokal secara optimal.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BRIDA Kota Makassar tidak hanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi riset dan

inovasi, tetapi juga menjadi cerminan dari perlunya transformasi sistemik dalam tata kelola penelitian dan pengembangan di tingkat daerah. Kompleksitas permasalahan yang mencakup aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, hingga rendahnya kolaborasi lintas sektor, menuntut adanya pendekatan strategis dan adaptif. Oleh karena itu, identifikasi dan pemahaman atas tantangan-tantangan tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi penguatan riset dan inovasi daerah ke depan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas BRIDA sebagai lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa riset dan inovasi mampu menjadi pendorong utama pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

B. Peluang Riset dan Inovasi

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, BRIDA Kota Makassar juga memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Peluang ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran nasional akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, yang tercermin dalam berbagai regulasi, dukungan fiskal, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Berikut peluang-peluang riset dan inovasi meliputi:

1. Transformasi Kelembagaan

Transformasi kelembagaan menjadi BRIDA membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan fungsi riset dan inovasi yang tidak hanya terbatas pada kajian teknokratis, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi tepat guna, penguatan ekosistem inovasi, dan kolaborasi multi-pihak. BRIDA kini memiliki mandat yang lebih besar untuk berinovasi secara lintas sektor dan lintas disiplin, termasuk dalam hal pengembangan teknologi tepat guna yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dalam konteks

ini, BRIDA tidak hanya menjadi lembaga penghasil rekomendasi kebijakan, tetapi juga sebagai pusat sinergi inovasi yang mampu menjembatani kebutuhan lapangan dengan kapasitas riset yang tersedia. Dengan demikian, perubahan kelembagaan ini menjadi peluang penting untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan riset dan inovasi dalam mendorong daya saing serta kemandirian pembangunan daerah, khususnya di Kota Makassar.

2. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat

Meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan inovasi daerah menjadi peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, termasuk oleh BRIDA Kota Makassar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Litbang, Program Inovasi Daerah, hingga insentif melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mendorong daerah untuk mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Skema-skema ini tidak hanya menyediakan sumber pendanaan yang lebih terarah, tetapi juga menghadirkan peluang pendampingan teknis, pelatihan, serta akses pada jaringan riset nasional yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan BRIDA. Selain itu, inisiatif pemerintah pusat yang mendorong transformasi Balitbangda menjadi BRIDA juga menciptakan ruang bagi harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan riset dan inovasi. Jika peluang ini dikelola secara proaktif, BRIDA Kota Makassar tidak hanya dapat meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan riset, tetapi juga memperluas jangkauan dampak program inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

3. Posisi Strategis Kota Makassar

Posisi strategis Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia menjadikannya memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang sebagai pusat riset dan inovasi

regional. Sebagai kota metropolitan yang menjadi simpul konektivitas laut dan darat, serta pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan, Makassar memiliki infrastruktur dasar dan jejaring ekonomi yang lebih maju dibandingkan wilayah sekitarnya. Hal ini menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan sektor-sektor strategis seperti ekonomi maritim, pengolahan hasil laut, logistik, dan pelabuhan cerdas (*smart port*).

Selain itu, pertumbuhan pesat sektor UMKM digital di kota ini, yang ditopang oleh kecakapan digital masyarakat yang meningkat dan akses terhadap teknologi informasi, juga membuka peluang besar untuk pengembangan inovasi berbasis teknologi tepat guna dan ekonomi kreatif. Di sisi lain, tantangan urbanisasi dan perubahan iklim menuntut pembangunan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan, sehingga riset dan inovasi dalam bidang tata ruang, transportasi cerdas, energi terbarukan, serta pengelolaan lingkungan menjadi sangat relevan. Dengan memperkuat peran BRIDA dan membangun kolaborasi lintas sektor, Kota Makassar berpotensi menjadi *innovation hub* yang tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi referensi bagi pengembangan riset dan inovasi di wilayah timur Indonesia secara lebih luas.

4. Potensi Kemitraan Melalui Kolaborasi *Quadruple Helix*

Keberadaan sejumlah perguruan tinggi ternama, komunitas startup yang dinamis, serta sektor industri yang tumbuh secara progresif di Kota Makassar dapat membentuk ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi BRIDA untuk mengambil peran sebagai penghubung antar pemangku kepentingan melalui penguatan model *quadruple helix*, yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, BRIDA dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, penyusunan agenda riset bersama, pengembangan teknologi tepat guna, hingga

implementasi inovasi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Lebih dari itu, kemitraan strategis ini juga membuka peluang untuk mendorong hilirisasi hasil riset, mempercepat adopsi inovasi oleh sektor industri dan UMKM, serta memperluas dampak riset terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat jejaring kolaboratif ini, BRIDA Kota Makassar memiliki peluang besar untuk tidak hanya mempercepat pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, tetapi juga memperkuat perannya sebagai simpul inovasi regional yang relevan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal, BRIDA dapat menjadi motor penggerak transformasi pembangunan Kota Makassar yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

Riset dan inovasi di daerah merupakan pangkal dari perencanaan dan implementasi Pemerintah Daerah. Kebijakan yang berlandaskan pada riset dan inovasi diharapkan mampu membangun efektivitas (tepat sasaran) dan efisiensi (penghematan) anggaran. Efektivitas dan efisiensi ini yang seharusnya bisa diukur melalui riset sebelum kebijakan direncanakan dan diimplementasikan. Sedangkan, inovasi berperan memberikan dampak optimal karena adanya peran rekayasa dan teknologi kebijakan publik. Hal ini merupakan definisi kebijakan berbasis bukti bahwa riset dan inovasi menjadi landasan perencanaan dan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Sebagaimana Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah pada pasal 23 memuat enam elemen ekosistem yang wajib diperkuat dengan (1) kebijakan dan infrastruktur riset inovasi di daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset inovasi di daerah, (3) kemitraan riset inovasi di daerah, (4) budaya riset inovasi di daerah, (5) keterpaduan riset inovasi di daerah dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Berikut pemaparan masing-masing ekosistem:

1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Saat ini, Pemerintah Kota Makassar memiliki kerangka kebijakan yang mengatur riset dan inovasi melalui:

- Perda Kota Makassar No. 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah payung hukum inovasi sektor publik dan kolaborasi ekosistem.
- Perwali No. 37 Tahun 2019 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kerangka pengembangan SIDa dan aktor-aktor kunci lokal.
- Perwali No. 41 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah mekanisme inkubasi/eksperimen kebijakan dan layanan.

- Perwali No. 53 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah aturan operasional adopsi dan replikasi inovasi di perangkat daerah.
- Perwali No. 64 Tahun 2023 (organisasi Balitbangda/BRIDA) penataan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat riset daerah sebagai tulang punggung rencana dan inovasi pemda
- RPJMD Kota Makassar 2025–2029 (Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029)

Untuk menilai tingkat kesesuaian ekosistem riset dan inovasi yang telah berjalan di daerah antara kondisi realitas saat ini dengan standar nasional, digunakan indikator yang dipedomani dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 3. Di dalamnya terdapat 6 indikator yang terkait dengan kebijakan dan infrastruktur tersebut. Melalui 6 indikator ini, pemerintah daerah dapat memperoleh panduan yang memadai untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara standar kebijakan dan infrastruktur riset inovasi dengan situasi yang sebenarnya di daerah, berikut disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kota Makassar (Per-BRIN No. 5/2023)

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Reformasi kebijakan riset dan inovasi	• BRIDA aktif • Penyusunan arah riset dan inovasi pernah difasilitasi, namun RIPJPID belum terpublikasi final • Integrasi ke RPJMD/Renja belum kuat.	• RIPJPID disahkan dan terintegrasi ke RPJPD/RPJMD/Renja • Tersedia PERDA/Perkada pemajuan IPTEK.	• Payung hukum dan dokumen arah jangka menengah (RIPJPID/Perkada) belum final • Integrasi ke RPJMD/Renja belum kuat.
Penataan basis data riset dan inovasi	Portal Satu Data Kota Makassar sudah ada, namun belum ada sub-katalog khusus riset dan inovasi yang memuat hasil kajian/penelitian OPD/kampus.	Tersedia sub katalog riset dan inovasi ber metadata standar, memuat hasil kajian/riset, dilengkapi Application Programming Interface dasar.	• Belum ada arsitektur data dan sub katalog Riset dan Inovasi • Standar metadata dan Application Programming Interface belum tersedia.
Infrastruktur dasar riset	• Laboratorium ada, tetapi kualitas dan	• Fasilitas bersama lintas lembaga	• Peralatan ganda, • pemanfaatan rendah,

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
	• pemeliharaan tidak seragam • Akses bersama terbatas.	• dengan sistem pemesanan • Ada pembagian biaya operasi dan pemeliharaan.	• akses publik terbatas
Pengelolaan kebun raya	• Tidak ada kebun raya kota, • Riset/edukasi biodiversitas bergantung pada mitra provinsi (Kebun Raya Pucak, Kab. Maros).	Program riset dan edukasi melalui kemitraan kebun raya, atau pengembangan taman tematik perkotaan untuk riset/edukasi.	• Kemitraan riset-edukasi dan kurasi ilmiah di level kota belum terstruktur • Belum ada masterplan
Pendanaan riset dan inovasi	• Bergantung APBD kecil dan proyek • Akses ke LPDP/BRIN/CSR belum terstruktur • Belum ada hibah kota.	Pendanaan campuran dari APBD, LPDP, BRIN, CSR dengan program hibah kota "Makassar Innovation Grants (MIG)".	Pendanaan tidak rutin, hanya satu sumber utama.
Kekayaan intelektual	• Kesadaran kekayaan intelektual rendah • Pengurusan paten/HAKI masih jarang • Belum ada layanan pendampingan dan pembagian royalti.	Ada layanan pendampingan terpadu untuk kekayaan intelektual	• Output Kekayaan intelektual rendah • Proses lisensi lambat.

Ekosistem riset dan inovasi Kota Makassar telah memiliki pondasi melalui keberadaan BRIDA dan praktik kebijakan berbasis bukti, namun masih ada celah yang perlu ditutup. Di sisi kebijakan, RIPJPID belum terpublikasi sebagai dokumen final dan belum terintegrasi kuat ke RPJPD/RPJMD/Renja. Di sisi infrastruktur, belum ada katalog data riset dan inovasi terstandar pada portal Satu Data <https://data.makassarkota.go.id/> yang bisa melacak temuan ilmiah lintas OPD dan kampus, kemudian dari segi infrastrukturnya laboratorium ada, tetapi kualitas dan pemeliharaan tidak seragam, serta kemitraan riset dan edukasi biodiversitas di level kota masih bergantung pada mitra provinsi di Kebun Raya Pucak, Kab. Maros. Dari sisi pembiayaan Bergantung APBD kecil dan proyek, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesadaran kekayaan intelektual masih rendah, pengurusan paten/HAKI masih jarang.

Kondisi yang diharapkan adalah RIPJPID disahkan dan menjadi rujukan lintas OPD, hadirnya sub katalog riset dan inovasi dengan metadata, layanan fasilitas riset yang terdigitalisasi, program riset

edukasi melalui kemitraan kebun raya atau taman tematik sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan konservasi alam perlu konsepsi ulang dalam penyediaannya, skema pendanaan multi sumber dari APBD, LPDP, BRIN, CSR dengan program hibah kota “*Makassar Innovation Grants (MIG)*”, serta perlindungan kekayaan intelektual yang mendorong pendaftaran kekayaan intelektual, lisensi, dan komersialisasi inovasi.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Ekosistem kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di Kota Makassar telah memiliki landasan melalui penetapan BRIDA dalam Perwali dan praktik kebijakan berbasis bukti, namun penguatan tata kelola masih diperlukan. Indikator untuk mengukur kesenjangan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi Kota Makassar diturunkan dari Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 4, analisis kesenjangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 2 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Kota Makassar

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	- Kolaborasi riset antar pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat sudah ada seperti riset terapan, KKN tematik, pembimbingan, namun belum menjadi platform tetap lintas OPD, - Perencanaan topik dan pendanaan multi tahun belum baku.	- Platform triple helix formal pemda dan Perguruan Tinggi seperti agenda riset tahunan - Pendanaan bersama, pembimbingan, publikasi bersama, dan skema hilirisasi.	- Koordinasi belum terinstitusi - Belum ada proposal tahunan bertema prioritas - Insentif publik untuk riset bersama masih terbatas.
	- Kolaborasi riset antar pemerintah daerah dengan BRIN bersifat sementara saat ada pendampingan - Akses fasilitas dan keahlian BRIN belum termanfaatkan optimal untuk isu daerah	- Nota kesepahaman kerja bersama (MoU/MoA) dengan rencana kerja 2-3 tahun - Akses fasilitas/ peneliti BRIN, dan join lab/ pembelajaran lapangan intensif untuk prioritas daerah.	- Belum ada rencana kerja multi tahun, - Kanal permintaan problem statement dan mekanisme rujukan ke BRIN belum baku.

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
	Kolaborasi riset antar pemerintah daerah dengan pelaku usaha dalam perumusan kebutuhan riset/standar kompetensi masih terbatas.	• Kemitraan industri terstruktur • Penyusunan kebutuhan teknologi, uji coba, pengadaan sebelum komersialisasi, dan dukungan pembelajaran berbasis kerja bersertifikasi.	Belum ada tata kelola resmi untuk menjalankan dan mengembangkan klaster inovasi/ekonomi dan insentif pengadaan inovasi.
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	• Belum tersedia inventaris terpadu lab/ inkubator/ peralatan lintas OPD dan kampus • Tingkat pemanfaatannya belum termonitor • Kemampuan sistem untuk bertukar data belum terbangun.	• Standar sarpras sesuai kemampuan fiskal keselamatan, kalibrasi standar, aturan, prosedur, dan tolak ukur berkelanjutan • Inventaris terpadu • Kemampuan sistem untuk bertukar data riset, program dan anggaran.	• Ketidadaan peta sarpras dan SOP operasi dan keselamatan • Belum ada indikator tingkat pemanfaatan dan integrasi data lintas sistem.

Pada Indikator penguatan kolaborasi riset dan inovasi, kemitraan Pemda dan perguruan tinggi setempat saat ini sudah ada dalam bentuk riset terapan, KKN tematik, hingga pembimbingan, namun masih bersifat sporadis dan belum menjadi platform lintas OPD yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan adalah hadirnya platform *triple-helix* yang formal antara pemerintah daerah, kampus, BRIN, dan industri, dengan agenda kolaborasi tahunan, mulai dari pendanaan bersama, pembimbingan bersama, hingga proyek bersama yang terjadwal. Kesenjangan utamanya terletak pada belum adanya koordinasi resmi serta ketidadaan proposal berbasis prioritas daerah. Artinya, perlu dibentuk forum resmi dengan rencana kerja multi tahun, dan skema insentif agar kolaborasi tidak berhenti pada individu atau proyek sementara.

Kolaborasi Pemda dan BRIN memperlihatkan pola serupa yakni akses kerja sama cenderung sementara. Kondisi idealnya ialah MoU/MoA multi tahun yang memuat rencana kerja 2–3 tahun, akses laboratorium dan peneliti BRIN, serta *joint lab* atau pembelajaran lapangan intensif untuk isu prioritas daerah. Kesenjangannya adalah ketidadaan kanal resmi permintaan riset dari Pemda, belum ada mekanisme rujukan yang baku, dan belum ada penentuan titik

pencapaian bersama. Karena itu, perlu disusun rangkaian tahapan kerja masalah prioritas bersama yang dapat diaudit.

Kolaborasi antara Pemda dan pelaku usaha industri masih sporadis dan keterlibatan pelaku usaha dalam merumuskan kebutuhan riset serta standar kompetensi belum kuat. Kondisi yang diharapkan adalah kemitraan industri terstruktur, mulai dari perumusan kebutuhan teknologi, uji coba serta dukungan skema pembelajaran berbasis kerja dan sertifikasi. Kesenjangan utamanya ialah belum adanya badan pengarah, sekretariat, *working groups* dan ketiadaan insentif pengadaan inovasi maupun perjanjian kontrak yang jelas.

Kedua, pada indikator penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi, kebutuhan laboratorium, inkubator, dan peralatan meningkat, tetapi inventaris terpadu lintas OPD dan kampus belum tersedia, standar operasi dan pemeliharaan juga tingkat pemanfaatannya belum termonitor. Kondisi yang diharapkan adalah standar sarpras yang realistis terhadap kemampuan fiskal daerah dan inventaris terintegrasi. Kesenjangannya merupakan tata kelola yang belum ada penanggung jawab data atau sarpras yang jelas.

Secara keseluruhan, kesenjangannya menunjukkan pola yang konsisten: (1) kelembagaan kolaborasi belum permanen, (2) sarpras belum terpetakan dan distandarisasi, (3) alur riset, prototipe, pilot, adopsi inovasi belum ada dalam rencana kerja dan penganggaran. Arah perbaikannya adalah membangun *platform* kolaborasi formal (*triple-helix*), menyiapkan panduan kerja praktis, menata standar operasi dan pemeliharaan, serta menghubungkan seluruh indikator ke pusat data agar keputusan pendanaan berbasis bukti. Dengan langkah ini, kemampuan kelembagaan dan daya dukung Rencana dan Inovasi Kota Makassar menjadi lebih terukur, relevan dengan kebutuhan publik, dan berkelanjutan dari sisi pembiayaan maupun penerapan.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Ekosistem riset dan inovasi di daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat daerah yang solid dan harmonis, kemitraan

yang baik memungkinkan setiap perangkat daerah berperan sesuai mandatnya, BRIDA mengorkestrasi agenda riset dan inovasi, OPD teknis menyediakan masalah riil dan data sektoral, sementara OPD keuangan dan perencanaan memastikan riset tersebut terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Pola kerja seperti ini akan menciptakan alur yang utuh mulai dari identifikasi isu, perumusan topik riset, pelaksanaan kajian bersama mitra kampus atau industri, sampai hilirisasi menjadi program atau regulasi sehingga riset benar-benar menjadi instrumen pemecahan masalah pembangunan daerah, bukan aktivitas yang terpisah dari kebutuhan kota.

Berikut indikator kemitraan riset dan inovasi disarikan dari pedoman teknis BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 5 yang menekankan tata kelola kolaboratif.

Tabel 4. 3 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi di Kota Makassar

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	- Kolaborasi lintas pihak antara pemda, Perguruan Tinggi, BRIN, industri dan komunitas sudah ada namun sporadis dan berorientasi proyek - Belum ada platform tetap akan sekretariat dan proposal tahunan, dan SOP bersama.	- Terbentuk platform triple-helix yang permanen seperti rencana kerja multi-tahun - Agenda tahunan dengan paket riset, prototipe, pilot, adopsi/pengadaan, mekanisme evaluasi.	- Kelembagaan belum terinstitusi - Standar kemitraan dan perjanjian kontrak belum baku - Belum ada kalender kolaborasi dan indikator kunci kinerja bersama.
Peningkatan difusi inovasi	- Hasil riset tersebar di banyak tempat terpisah seperti OPD, lab kampus, tim proyek maupun mitra industri - Belum ada arus hilirisasi yang konsisten - Repository dan pusat data lintas OPD belum optimal - Kelayakan produk inovasi terbatas.	Tersedia alur terstruktur seperti repository dan katalog solusi, ruang uji coba, kelayakan produk inovasi dan adopsi pengadaan inovasi	- Tidak ada jalur baku dari simulasi ke kondisi nyata dan adopsi inovasi, - Kurangnya standar data untuk berbagi hasil - Minimnya insentif dan pembiayaan difusi.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset Inovasi	Diseminasi masih berbasis pekan ilmiah	Panduan operasional yang praktis baik per tema dengan format seragam seperti	Format dokumen dan kanal diseminasi belum baku

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
kepada pelaku inovasi	- Dokumentasi praktik baik pengambilan keputusan, catatan teknis, template implementasi belum distandarkan - Keterlibatan OPD pengguna tidak konsisten.	konteks, metode, biaya, dan risiko, pengambilan keputusan siap pakai, capaian, kemitraan diseminasi dengan asosiasi industri/komunitas.	- Tidak ada sistem pengendalian mutu layanan untuk mengukur pengadaan - Pertemuan rutin berkala dan kebijakan belum berjalan.

Pada kemitraan antar kelembagaan, kolaborasi antara Pemda dan perguruan tinggi maupun BRIN dan industri sudah berlangsung tetapi masih sporadis dan berorientasi proyek. Belum ada wadah tetap dengan tim dan sekretariat resmi, jadwal pengajuan proposal tiap tahun, dan aturan kerja (SOP) bersama. Kondisi yang diharapkan ialah platform *triple helix* yang resmi, struktur kerangka pembagian peran, dan rencana kerja multi tahun seperti agenda tahunan dibiayai bersama dan mengalir dengan mekanisme evaluasi yang jelas. Kesenjangannya terletak pada belum adanya struktur resmi, aturan kerja sama dan belum ada indikator kinerja yang disepakati bersama. Artinya, kota perlu segera menetapkan forum resmi, menunjuk manajemen program, menerbitkan SOP kolaborasi, dan menyusun kalender program beserta indikator kinerja lintas pihak.

Kedua, pada difusi inovasi, hasil riset masih tersebar di tersebar di banyak tempat terpisah seperti OPD, lab kampus, tim proyek maupun mitra industri tanpa satu portal bersama. Kondisi ideal adalah terbentuknya alur terstruktur yang lengkap diantaranya *repository* dan katalog solusi, ruang uji coba, kelayakan produk inovasi, serta tahap pendampingan untuk adopsi inovasi, didukung insentif seperti pengadaan inovasi. Kesenjangannya adalah lemahnya standar data untuk berbagi hasil, dan minimnya pembiayaan difusi. Tindak lanjut yang dibutuhkan adalah menetapkan standar data, memilih koridor uji coba inovasi terbatas, menyiapkan dokumen kebutuhan fungsional, dan mengalokasikan dana insentif adopsi inovasi.

Ketiga, peningkatan praktik baik dan diseminasi, kegiatan diseminasi masih berbasis *event* dan belum menghasilkan format

seragam yang memuat konteks, metode, biaya, Indikator kunci, risiko. Akibatnya, hasil tidak mudah dipakai oleh OPD/mitra. Kondisi yang diharapkan ialah ada panduan operasional yang praktis baik per tema, kebijakan bulanan, dan kemitraan diseminasi dengan asosiasi industri dilengkapi sistem pengendalian mutu layanan untuk mengukur tingkat adopsi inovasi. Kesenjangannya mencakup belum bakunya format dokumen dan kanal diseminasi, dan belum adanya mekanisme pertemuan rutin. Langkah perbaikannya adalah standarkan format dokumen, jadwalkan pertemuan bulanan, bangun sistem pengendalian mutu layanan per OPD, dan libatkan asosiasi atau komunitas sebagai mitra penyelenggara diseminasi.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi adalah kondisi ketika organisasi dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar dan para mitranya secara sadar dan berulang menjadikan riset, data, dan uji coba sebagai cara utama untuk memecahkan masalah pembangunan. Di dalam budaya ini, setiap persoalan layanan publik, tata ruang, pesisir atau kemiskinan tidak langsung dijawab dengan proyek, tetapi lebih dulu didefinisikan, dikaji, dan diuji solusinya secara sistematis.

Aktor-aktornya seperti BRIDA, OPD, kampus, komunitas, dan dunia usaha terbiasa berbagi pengetahuan, mendokumentasikan hasil riset, lalu mendorong penerapannya agar tidak berhenti di laporan. Ciri pentingnya adalah adanya penghargaan dan insentif bagi mereka yang menghasilkan inovasi yang dipakai, dengan begitu, riset dan inovasi bukan aksesoris program, tetapi menjadi pola pikir dan pola kerja harian pemerintah daerah. Adapun indikator budaya riset dan inovasi disarikan dari pedoman teknis BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi di Kota Makassar

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi masih insidental dan berbasis event	Kalender kampanye tahunan multi kanal di media sosial, pameran, roadshow ke	Belum ada rencana promosi tahunan, mitra,

Indikator	Kondisi Saat Ini (Kota Makassar)	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
	- Kanal digital/medsos belum terintegrasi - Pesan belum menarget komunitas dengan OPD, kampus, industri, komunitas	sekolah, kampus, komunitas, yang membawa pesan tematik seperti energi, air, pangan, sanitasi, ekonomi hijau	dan anggaran khusus Tidak ada partisipasi, konversi proposal.
Apresiasi prestasi inovasi	- Penghargaan ada tetapi tidak rutin/terstandar - Belum mengaitkan hadiah dengan tindak lanjut insentif seperti karier/dana.	- Skema apresiasi tahunan dengan kategori jelas dari riset terapan, layanan publik, startup, komunitas - Hadiah berupa dana adopsi inovasi, atau promosi karier, publikasi praktik baik.	- Tidak ada kerangka penghargaan baku, mekanisme pendampingan - Belum ada dana insentif berbasis kinerja.
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	- Pendampingan sporadis, mentor industri dan jalur uji coba di OPD terbatas - Perizinan dan pengadaan inovasi belum ramah untuk pemula	Program pendampingan maupun akselerasi terstruktur ada mentor, bimbingan bersama, zona uji coba inovasi di OPD dan panduan praktis pengadaan inovasi.	- Akses pembiayaan awal dan mentor masih kurang - Belum ada aturan pengadaan inovasi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/teknologi masyarakat	- Dokumentasi pengetahuan lokal dan teknologi rakyat tersebar - Minim dukungan perlindungan HAKI belum ada keterhubungan ke kurikulum dan pasar	- Katalog digital terkurasi - Perlindungan HAKI, uji mutu seperti integrasi ke kurikulum vokasi/UMKM dan pasar lokal.	- Belum ada registry terpadu dan SOP kurasi - Minim dukungan perlindungan HAKI - Belum ada jembatan ke pendidikan/pasar - Pendanaan pengembangan sangat terbatas.

Secara umum, praktik promosi dan kampanye inovasi masih sporadis, penghargaan prestasi inovasi yang tidak diikuti tindak lanjut, dukungan untuk pemula yang tidak sistemik, dukungan HAKI untuk pengetahuan teknologi masyarakat belum disusun secara sistemik menyebabkan peluang inovasi gagal diterjemahkan menjadi layanan publik yang berkelanjutan, sehingga talenta dan ide tidak terkonversi menjadi produk atau layanan.

Untuk memperbaiki kondisi ini perlu langkah prioritas yang cepat dan terukur, penguatan budaya inovasi melalui kampanye terukur, penghargaan yang bermakna, serta dukungan nyata bagi pemula. Bila hal ini dijalankan kemungkinan besar banyak hasil riset

yang saat ini terhenti akan berubah menjadi solusi yang memberi manfaat nyata bagi layanan publik dan ekonomi lokal.

5. Keterpaduan Riset dan Inovasi

Keterpaduan riset dan inovasi adalah keselarasan antara kebutuhan pembangunan daerah dengan kegiatan riset yang dilakukan oleh BRIDA, OPD, perguruan tinggi, industri, dan komunitas, sehingga apa yang diteliti benar-benar menjawab masalah layanan publik dan bisa langsung diwujudkan menjadi inovasi. Keselarasan ini tampak bila sumber masalahnya jelas dari OPD atau masyarakat, topik risetnya mengikuti masalah itu, pendanaannya mendukung, datanya terbagi antar perangkat daerah, dan hasil akhirnya dipakai sebagai kebijakan, aplikasi, atau model layanan.

Berikut indikator budaya riset dan inovasi disarikan dari pedoman teknis BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 7 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Kota Makassar

Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah	• Inisiatif ada namun masih bergantung proyek • Belum ada peta jalan bersama • Koordinasi lintas OPD, kampus, industri belum rutin • Pendanaan kecil dan tahunan.	• Adanya peta jalan Riset dan Inovasi kota (2025–2029) • Forum rutin triple-helix dengan sekretariat • Tema riset mengikuti kebutuhan layanan publik dan ekonomi • Ada skema hibah kota atau pendanaan bersama	• Belum ada peta jalan dan sekretariat • Koordinasi bersifat sementara • Tema riset belum sinkron • Tidak ada skema pendanaan berkelanjutan.
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	• Produk unggulan sudah dikenal tetapi ekosistem klaster belum lengkap • Akses laboratorium, sertifikasi, pembiayaan, dan pasar belum terhubung • Inkubasi bisnis belum rutin.	• Klaster berjalan dengan aktor lengkap diantaranya UKM/industri, kampus, OPD dan perbankan • Ada inkubator/akselerator, layanan uji/sertifikasi, dukungan branding dan pemasaran digital • Ada kontrak pembelian dan paket pembiayaan.	• Rantai nilai belum terhubung • Layanan uji/sertifikasi terbatas • Kurang program inkubasi dan akses pasar • Belum ada pembiayaan khusus klaster.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat	• Arah pusat sudah ada, namun dokumen daerah	• Dokumen daerah mengadopsi kebijakan pusat diantaranya	• Tidak ada matriks penyaluran,

Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
dan Pemerintah Daerah	belum sepenuhnya mengadopsi indikator kerja/kode program • Pelaporan dan standar data berbeda.	tujuan, indikator, kode program • Ada matriks penyalarsan, pelaporan dan standar data seragam • Ada helpdesk regulasi.	indikator belum sinkron • Standar data dan pelaporan berbeda sehingga koordinasi dan akses pendanaan pusat kurang optimal.

Saat ini inisiatif riset dan inovasi di Kota Makassar sudah muncul di berbagai OPD, kampus, dan komunitas, namun masih bergantung pada proyek, dan belum memiliki peta jalan bersama. Koordinasi lintas OPD, kampus, industri belum rutin sehingga topik riset sering tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan publik dan penguatan ekonomi daerah, besaran pendanaan pun kecil dan bersifat tahunan. Ke depan, yang diharapkan adalah adanya forum *triple-helix* yang bertemu secara terjadwal dengan dukungan sekretariat, tema riset yang mengikuti prioritas daerah, serta skema hibah kota atau pendanaan bersama yang berkelanjutan. Kesenjangannya terletak pada belum adanya peta jalan dan sekretariat tetap, koordinasi yang masih sementara, ketidaksinkronan tema riset dengan kebutuhan OPD, dan belum tersedianya skema pendanaan yang berkesinambungan.

Untuk Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah. Saat ini produk unggulan Makassar sudah dikenali, tetapi ekosistem klaster belum lengkap diantaranya akses ke laboratorium, sertifikasi mutu, pembiayaan, dan pasar belum terhubung dengan baik, serta program inkubasi bisnis belum berjalan rutin. Kondisi yang diharapkan adalah klaster inovasi yang berdampingan dengan UKM atau industri, kampus, OPD, dan perbankan, dilengkapi layanan uji/sertifikasi, inkubasi/akselerasi, *branding* dan pemasaran digital, serta skema kontrak pembelian dan paket pembiayaan. Kesenjangannya adalah rantai nilai yang belum terhubung, layanan uji/sertifikasi yang terbatas, minimnya inkubasi dan akses pasar, serta belum adanya pembiayaan khusus yang menopang klaster secara konsisten.

Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini arah kebijakan dari pusat sudah ada, namun turunan di daerah belum sepenuhnya diadopsi seperti standar data dan pelaporan, sehingga koordinasi dan akses ke dukungan pusat belum optimal. Kondisi yang diharapkan ialah dokumen daerah yang secara jelas mengadopsi tujuan, indikator, dan kode program nasional, dilengkapi matriks penyelarasan, standar data dan pelaporan yang seragam, serta *helpdesk* regulasi untuk pendampingan implementasi. Kesenjangannya terletak pada belum adanya matriks penyelarasan yang baku, belum sinkronnya kode program dan indikator kerja, dan perbedaan standar data pelaporan yang menghambat integrasi program dan pendanaan lintas level pemerintahan.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Ekosistem riset dan inovasi daerah perlu dirancang agar tidak hanya responsif terhadap persoalan lokal, tetapi juga mampu mengakomodasi isu dan dinamika internasional yang berpotensi memengaruhi kondisi daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional penting bukan semata untuk mengantisipasi krisis global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, atau transformasi digital melainkan juga agar daerah dapat mengadopsi cara pandang, standar, dan praktik terbaik yang sedang berkembang di tingkat global.

Dalam kerangka pikir riset dan inovasi, keterhubungan ini mencakup kemampuan daerah untuk menyerap metode riset terkini, memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir serta menyesuaikan diri dengan pendekatan ilmiah baru yang diakui komunitas internasional. Karena itu, elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu ditempatkan sebagai komponen eksplisit dalam ekosistem riset dan inovasi daerah, supaya proses perumusan topik, pelaksanaan penelitian, hingga hilirisasi kebijakan kaya perspektif, relevan dengan agenda global misalnya *Sustainable Development Goals*, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing pengetahuan daerah.

Adapun indikator budaya riset dan inovasi disarikan dari pedoman teknis BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang tertuang dalam pasal 23 ayat 8 sebagai berikut

Tabel 4. 6 Analisis Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kota Makassar

Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Kesenjangan
Kepedulian isu internasional yang mempengaruhi ekosistem Riset dan Inovasi	• Wawasan global mulai tumbuh namun belum menyatu ke program OPD atau kampus • Isu seperti AI etis, transisi energi dan iklim, keamanan siber/data dan SDGs belum konsisten masuk ke kurikulum, riset prioritas, atau SOP layanan. • Pemantauan tren global masih sporadis.	• Ada mekanisme rutin memantau dan menerjemahkan isu global ke program lokal diantaranya kuliah umum internasional • Agenda riset tematik • Prinsip global AI etis, ESG/SDGs.	• Belum ada ritme kerja untuk pemantauan tren global materi global belum jadi bagian baku kurikulum dan riset prioritas • SOP dan indikator kinerja belum mengacu pada standar/praktik internasional.
Penguatan kerja sama internasional	• Kerja sama luar negeri ada namun terbatas pada kunjungan/MoU, program bersama seperti joint research dan publikasi, pertukaran peneliti/mahasiswa, atau pendanaan bersama masih sedikit • Dukungan bahasa, dan bantuan visa terbatas.	• Kemitraan internasional yang aktif dan terukur dari joint research dan publikasi • Pertukaran peneliti/mahasiswa, kuliah tamu, joint lab, dan akses pendanaan bersama • Ada helpdesk internasional	• Banyak MoU belum produktif • Minim program bersama dan pendanaan • Belum ada helpdesk khusus dan keterbatasan kemampuan bahasa.

Penyelarasan dengan perkembangan global itu menunjukkan bahwa Makassar sebenarnya sudah mulai melihat ke luar, misalnya dengan memasukkan sebagian tema *Sustainable Development Goals* ke dalam program OPD, tetapi belum ada kewajiban yang membuat setiap riset dan inovasi daerah harus ditautkan ke agenda global. Kondisi yang diharapkan adalah adanya mekanisme yang rutin dan terstruktur untuk memantau serta menerjemahkan isu global ke aksi lokal misalnya kuliah umum internasional, dan agenda riset tematik serta adopsi prinsip global seperti AI etis, ESG/SDGs, keamanan data ke SOP dan indikator kinerja OPD/kampus. Kesenjangannya terletak pada

ketiadaan ritme kerja dan unit yang menakhodai pemantauan tren global, belum terintegrasinya materi global ke kurikulum/prioritas riset, serta belum serasinya SOP dengan standar internasional. Artinya, perlu dibentuk fungsi pengamatan tren semacam *global issues desk* dan penguatan kurikulum/SOP agar standar global benar-benar memandu praktik harian.

Kesenjangan paling besar terlihat di tiga titik yang pertama, kerja sama dan proyek inovasi yang benar-benar melibatkan mitra internasional masih sporadis, kedua, standar data dan dokumentasi belum disiapkan dalam format yang diterima global standar sitasi, ketiga, belum ada mekanisme *benchmarking* rutin ke indeks global. Oleh karena itu, yang perlu diperkuat adalah disiplin untuk setiap proposal riset mencantumkan keterhubungan ke isu global dan menyiapkan kanal pendanaan/kemitraan internasional supaya inovasi Makassar tidak hanya relevan di tingkat lokal, tetapi juga bisa direplikasi di level regional maupun global.

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI

A. Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Pengambilan keputusan kebijakan yang efektif dan efisien membutuhkan dasar yang kuat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan kebijakan yang berdasarkan bukti adalah *Evidence Based Policy* atau kebijakan berbasis bukti. Strategi ini menekankan penggunaan bukti-bukti yang kuat dan terpercaya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

Pendekatan *evidence based policy* melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari mengidentifikasi pertanyaan kebijakan yang spesifik, mengumpulkan bukti yang relevan, mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti, melakukan analisis dan sintesis, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan rekomendasi tersebut kepada pemangku kebijakan bahkan memantau implementasi kebijakan serta dampaknya.

Strategi ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang baik tentang masalah yang dihadapi, serta mempertimbangkan bukti-bukti empiris yang ada. Dengan menerapkan pendekatan *evidence based policy*, keputusan kebijakan dapat menjadi lebih transparan, objektif, dan berpotensi menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan mengadopsi strategi *evidence based policy*, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, mengurangi keputusan yang bersifat spekulatif atau didasarkan pada kepentingan politik semata, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh bukti yang kuat.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan manajemen setiap program

kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Makassar, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti di BRIDA Kota Makassar adalah suatu pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti empiris dan data yang akurat dalam proses perumusan kebijakan. Beberapa langkah strategis dan penting yang dilakukan oleh BRIDA untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan didukung oleh informasi yang kuat dan relevan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah dan tujuan kebijakan. Tahap awal ini melibatkan pengidentifikasian permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Makassar dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang diusulkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi kebijakan memiliki fokus yang jelas dan terarah.
2. Pengumpulan data. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya.
3. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang sesuai, seperti analisis statistik, pemodelan ekonomi, atau analisis dampak sosial. Hasil analisis ini membantu mengidentifikasi pola, trend, dan implikasi dari data yang diolah.
4. Evaluasi kebijakan yang ada. Jika ada kebijakan yang sedang berjalan terkait dengan isu yang sama, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan tersebut. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah kebijakan yang ada perlu

disempurnakan atau digantikan.

5. Penyusunan rekomendasi. Berdasarkan analisis data dan evaluasi, rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terukur dirumuskan. Rekomendasi ini mencakup rincian tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Komunikasi dan diseminasi hasil. Hasil analisis dan rekomendasi disajikan dengan jelas kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media, seperti laporan tertulis, presentasi, dan seminar. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman dan dukungan yang lebih luas terhadap rekomendasi kebijakan.
7. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Setelah implementasi, kebijakan dievaluasi secara berkala untuk memantau dampak yang dicapai. Evaluasi ini membantu mengukur keberhasilan dan memungkinkan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Strategi ini memungkinkan BRIDA Kota Makassar untuk menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kebijakan berdasarkan pada bukti-bukti empiris. Dengan menerapkan pendekatan ini, BRIDA berperan sebagai mitra kritis bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, menghasilkan dampak yang positif, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan Kota Makassar. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar, dilaksanakan program-program prioritas pada perangkat daerah yang merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang diuraikan.

Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kota Makassar yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Masih terdapat tingkat kerentanan yang signifikan dalam sektor energi, air, dan pangan
- 2) Belum optimalnya kualitas kesehatan
- 3) Belum optimalnya kualitas pendidikan
- 4) Belum optimalnya kesejahteraan sosial

- 5) Masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan biru
- 6) Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital
- 7) Rendahnya kualitas lingkungan hidup Kota Makassar
- 8) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan integratif
- 9) Sistem hukum dan keamanan ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat
- 10) Masih rendahnya implementasi beragama maslahat dan kurang berkembangnya kebudayaan maju
- 11) Masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda
- 12) Masih rendahnya koperasi yang memenuhi kriteria aktif
- 13) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
- 14) Belum optimalnya kinerja investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 15) Pendapatan perkapita yang tidak merata
- 16) Rendahnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan.

Tabel 5. 1 Strategi Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
		Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)			
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah				Rasio PDRB industri pengolahan (%)	Meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas SDM yang adaptif. Pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kawasan industri terintegrasi,	Dinas Tenaga Kerja	○ Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pekerja berbasis kebutuhan industri pengolahan dan perdagangan untuk meningkatkan peluang pekerja naik kelas dari buruh kasar ke tenaga terampil. ○ Penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan ○ Fasilitas skema upskilling-reskilling untuk sektor makanan-minuman, tekstil, dan ritel agar produktivitas meningkat seiring peningkatan upah. ○ Kemitraan pelatihan berbasis industri melalui <i>link and match</i> dengan kawasan industri dan pelaku usaha besar
	Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi				Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	mendorong adopsi teknologi dan inovasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan deregulasi dan kepastian hukum		
	Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai						Dinas Perdagangan	○ Mendorong modernisasi proses produksi melalui adopsi teknologi industri 4.0 agar produktivitas perusahaan meningkat dan mampu mendorong peningkatan upah. ○ Pengembangan sentra IKM/UMKM berbasis kawasan industri terpadu untuk memperluas kesempatan kerja bernilai tambah.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								○Penguatan rantai pasok (<i>supply chain</i>) industri pengolahan, terutama makanan-minuman yang menjadi basis ekonomi Kota Makassar. ○Deregulasi perizinan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas. ○Revitalisasi sektor perdagangan melalui digitalisasi UMKM dan pengembangan pasar modern-tradisional yang produktif.
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○Perumusan kebijakan penanggulangan ketimpangan pendapatan berbasis data sektoral PDRB, struktur tenaga kerja, & standar upah sektoral. ○Integrasi program lintas-OPD menuju pencapaian sasaran PDRB sektor unggulan (industri pengolahan dan perdagangan). ○Monitoring kontribusi sektor unggulan melalui indikator Rasio PDRB industri pengolahan dan perdagangan. ○Evaluasi kebijakan pro-investasi dan pro-pekerja, termasuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi telah inklusif.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas (jalan industri, akses pelabuhan, kawasan pergudangan) untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi sektor industri dan perdagangan
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○Promosi investasi pada sektor unggulan (industri pengolahan makanan-minuman, perdagangan logistik) yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja terampil ○Simplifikasi perizinan dan pemberian insentif bagi perusahaan yang menyediakan pelatihan dan standar upah layak ○Kemitraan investasi dengan UMKM dan IKM agar pertumbuhan ekonomi merata
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	○Pemberdayaan UMKM produktif melalui akses permodalan, inkubasi bisnis, dan pendampingan digital. ○Pengembangan usaha mikro-kecil sebagai bagian dari rantai nilai industri pengolahan, sehingga tidak hanya sektor besar yang menikmati nilai tambah. ○Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi ketergantungan					

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								pada pekerjaan buruh berupah minimum.
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	Meskipun sudah terjadi trend penurunan untuk tiga tahun terakhir ini, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19% dan tingkat nasional sebesar 4,91% akibat seluruh upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti kembali beroperasi sektor ekonomi, pertumbuhan signifikan pada UMKM serta peningkatan investasi di sektor properti dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan			Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsif. Melalui revitalisasi vokasi kompetensi dan sertifikasi. Penyelarasan kurikulum dengan industri, serta pemberdayaan ekonomi wilayah melalui pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal dan pemberian modal UMKM secara bertahap	Dinas Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	o Revitalisasi sistem vokasi berbasis <i>competency-based training</i> dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan daya serap industri. o Job matching, perluasan <i>job fair</i> digital, dan pemetaan lowongan berbasis data sektor unggulan. o Pengembangan layanan <i>Makassar Labor Market Information System</i> (MLMIS) untuk prediksi kebutuhan tenaga kerja o Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) padat karya dengan teknologi tepat guna. o Fasilitasi ekspansi pasar bagi UMKM agar meningkat serapan tenaga kerjanya. o Penguatan rantai pasok dalam industri makanan-minuman dan perdagangan besar/eceran. o Pengembangan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal (kuliner lokal, kerajinan, jasa kreatif). o Penyaluran modal UMKM bertahap dan pendampingan manajemen usaha. o Digitalisasi UMKM untuk

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								memperluas akses pasar dan meningkatkan produktivitas.
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Promosi investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, kuliner, dan hospitality. ○ Insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal tersertifikasi. ○ Penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum untuk meningkatkan iklim usaha
							Dinas Pekerjaan Umum	○ Pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, logistik) untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. ○ Meningkatkan efisiensi transportasi umum untuk memudahkan akses pencari kerja ke pusat-pusat ekonomi.
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Integrasi kebijakan pengurangan pengangguran melalui <i>policy alignment</i> antar-OPD berbasis target TPT dan PDRB per kapita. ○ Monitoring capaian sasaran (TPT, PDRB per kapita) dan mengevaluasi efektivitas program vokasi serta UMKM
			Tujuan 1.2:		Indeks daya saing daerah			

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
			Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Rasio pajak terhadap PDRB (%)	Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan membangun sistem pengelolaan PAD yang inovatif. Transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah	Dinas Tenaga Kerja	○Mengembangkan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berbasis kebutuhan industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan untuk menggeser pekerja dari posisi buruh berupah rendah ke pekerjaan berkeahlian. ○Memperluas kemitraan penempatan kerja dengan sektor swasta, terutama industri makanan-minuman, tekstil, dan manufaktur ringan. ○Mendorong penguatan <i>job matching system</i> berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan menekan pengangguran
							Dinas Perdagangan	○Fasilitasi <i>value added upgrading</i> pada industri pengolahan (makanan-minuman, tekstil, kerajinan) melalui pelatihan teknologi produksi, sertifikasi mutu, dan akses pembiayaan. ○Memperluas pusat distribusi dan pasar modern/UMKM untuk mendorong pemerataan pendapatan antar pelaku usaha. ○Menyusun insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan
							Badan Perencanaan	○Menyusun peta jalan peningkatan daya saing

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah						Pembangunan Daerah	ekonomi lokal yang menekankan pemerataan pendapatan dan pengurangan pengangguran. ○Mengintegrasikan reformasi pengelolaan PAD dengan dinamika pertumbuhan sektor dominan. ○Memperkuat sistem monitoring Indeks Daya Saing Daerah dan rasio pajak terhadap PDRB melalui data sektoral yang akurat
							Badan Pendapatan Daerah	○Mengembangkan ekosistem pajak daerah berbasis digital yang memudahkan wajib pajak dan meningkatkan akurasi pendataan. ○Mengoptimalkan pajak sektor perdagangan, properti, dan konstruksi sebagai kontributor utama PDRB namun tetap menjaga iklim usaha. ○Mendorong model insentif pajak untuk UMKM produktif dan padat karya guna meningkatkan pemerataan pendapatan
							Dinas Sosial	○Menyusun program pemberdayaan keluarga rentan akibat ketimpangan pendapatan. ○Memperkuat basis data terpadu agar intervensi sosial tepat sasaran.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
Masih terdapat tingkat kerentanan yang signifikan dalam sektor energi, air, dan pangan	Ketergantungan pasokan energi listrik			Sasaran 1.2.2: Terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan	Tingkat inflasi (%)	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan kepada petani	Dinas Perdagangan	oMengoptimalkan Sistem Informasi Harga Pangan untuk memantau fluktuasi harga dan mengintervensi komoditas yang bergejolak. oMemperluas kemitraan distribusi antara pasar tradisional, distributor, dan produsen lokal guna menekan biaya rantai pasok. oMendorong operasi pasar murah berbasis data kerentanan harga.
	Rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan							
	Layanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang belum merata				Indeks ketahanan pangan		Dinas Ketahanan Pangan	
	Keterbatasan produksi pangan lokal sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah							
								oMeningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui fasilitasi akses benih unggul dan teknologi pascapanen. oMengembangkan cadangan pangan kota serta jejaring lumbung pangan di tingkat kelurahan. oMeningkatkan indeks ketahanan pangan melalui

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								koordinasi lintas sektor dan edukasi konsumsi pangan bergizi dan beragam
							Dinas Perikanan dan Pertanian	○Menerapkan teknologi pertanian modern (precision farming, hidroponik, irigasi tetes). ○Menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan kepada petani/keompok tani urban. ○Memperluas kawasan pertanian perkotaan (urban farming) dan budidaya perikanan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar
							Perusda PDAM	○Modernisasi sistem jaringan distribusi dan layanan pelanggan berbasis data. ○Peningkatan kualitas air melalui perbaikan sistem filtrasi dan pengawasan mutu. ○Memperluas jaringan perpipaan air minum pada wilayah yang belum terlayani. ○Optimalisasi produksi dan pengolahan air baku melalui pembangunan reservoir dan peningkatan kapasitas IPA. ○Pengurangan kebocoran (<i>non revenue water</i>) melalui digitalisasi pemantauan jaringan
							Badan Perencanaan	○Menyusun rencana ketahanan energi–air–pangan berbasis

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Dinas Komunikasi dan Informasi	○Mengembangkan sistem pemantauan harga, distribusi pangan, dan kualitas layanan air secara real time. ○Memfasilitasi integrasi data antar-OPD untuk perumusan kebijakan berbasis bukti
Belum optimalnya kinerja investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Ketidakpastian pertumbuhan, minimnya stabilitas kebijakan, dan keterbatasan dukungan infrastruktur sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kontribusi Kota Makassar terhadap total investasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan			Sasaran 1.2.3: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Mewujudkan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi. Bersinergi dengan sektor swasta dan institusi syariah untuk menarik investasi padat karya dan berwawasan lingkungan melalui skema KPBU dan KSPI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○Digitalisasi penuh layanan perizinan dan konsultasi investasi melalui <i>online single submission</i> daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian proses. ○Penguatan sistem <i>tracking</i> perizinan dan <i>feedback</i> investor untuk menekan biaya transaksi dan mencegah ketidakpastian kebijakan. ○Pengembangan <i>Investment Promotion Center</i> dan data intelligence investasi untuk menarik PMA–PMDN pada sektor padat karya dan berwawasan lingkungan
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○Menyusun rencana pengembangan kawasan investasi prioritas berbasis RPJMD dan Rencana Detail Tata Ruang.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								○ Integrasi perencanaan investasi dengan skema KPBU dan KSPI serta proyeksi pertumbuhan ekonomi kota. ○ Penyusunan <i>Makassar Investment Roadmap</i> untuk menjamin stabilitas arah pembangunan dan kepastian bagi investor
							Dinas PU	○ Penyediaan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, dan transportasi publik pada kawasan prioritas investasi. ○ Pengembangan <i>smart infrastructure</i> untuk kawasan bisnis dan industri berbasis green investment. ○ Penyusunan <i>infrastructure readiness index</i> untuk memastikan kesiapan kawasan industri dan komersial
							Dinas Perdagangan	○ Penguatan sentra IKM dan kawasan industri kreatif untuk menarik PMDN dan investasi padat karya. ○ Dukungan sertifikasi, standardisasi produk, serta <i>market linkage</i> untuk meningkatkan kepastian pasar ○ Kolaborasi dengan institusi keuangan syariah untuk mendorong investasi UKM dan industri hijau

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
		Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 2.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
Belum optimalnya kualitas pendidikan	Masih rendahnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar minimum kemampuan literasi (21,71% Tahun 2023) Masih lemahnya kualitas guru pada beberapa satuan pendidikan Harapan lama sekolah yang hanya menempatkan Kota Makassar pada peringkat 15 dari 514 Kab/Kota di Indonesia (Tahun 2023) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (21,91% Tahun 2023) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibandingkan daerah lain (73,78% atau kategori memenuhi standar Tahun 2023)			Sasaran 2.1.1: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik	Dinas Pendidikan	○ Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi <i>min mum literacy standards</i> melalui penguatan kurikulum literasi, penyediaan modul ajar, dan penilaian literasi berkala ○ Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan (<i>upskilling - reskilling</i>), supervisi akademik, serta pemanfaatan platform belajar digital. ○ Perluasan akses pendidikan melalui optimalisasi BOS daerah, afirmasi untuk siswa rentan, dan pemerataan sarana prasarana pendidikan ○ Pemenuhan standar pelayanan dasar (SPD) terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas literasi digital.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
	Menurunnya angka penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja menurut pendidikan perguruan tinggi						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - o Pelatihan fungsional dan teknis untuk peningkatan kualitas pedagogik, literasi digital, serta asesmen. - o Penataan formasi ASN guru berbasis kebutuhan satuan pendidikan (<i>right sizing</i>). - o Sistem evaluasi kinerja guru berbasis <i>merit system</i> dan portofolio pembelajaran	
							Dinas Perpustakaan - o Pengembangan perpustakaan kelurahan, pojok baca digital, dan mobil perpustakaan keliling untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. - o Optimalisasi program literasi masyarakat melalui kampanye membaca, lomba literasi, dan klub literasi keluarga. - o Integrasi layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah untuk memperluas akses sumber belajar.	
							Dinas Sosial o Program bantuan pendidikan dan pencegahan <i>learning dropout</i> bagi keluarga tidak mampu	

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
Belum optimalnya kualitas kesehatan Belum optimalnya kesejahteraan sosial	Belum maksimalnya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) pada ksala Provinsi SulSel			Sasaran 2.1.2: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Mengoptimalkan pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif. Percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif. Perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	oPerlindungan anak dan sistem <i>early warning</i> terhadap potensi putus sekolah
	Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan akibat terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun), terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4), atau terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun) meningkatnya penemuan kasus Tuberkulosis (TB)						Dinas Kesehatan	oMemperkuat layanan kesehatan ibu-anak (ANC/PNC) dan deteksi risiko 4T oPercepatan eliminasi TB melalui intensifikasi penemuan kasus, DOT digital, dan pelacakan kontak oMengoptimalkan promotif–preventif (Germas, imunisasi lengkap) oPenguatan surveilans penyakit berbasis wilayah dan fasilitas kesehatan
							Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	oPenguatan edukasi Keluarga Berencana pada kelompok rentan (remaja, pasangan usia subur) oPeningkatan cakupan kontrasepsi modern untuk pencegahan 4T oKolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan kader untuk konseling KB
							Dinas Pendidikan	oPenguatan UKS dan screening kesehatan siswa. oPenguatan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini
							Dinas Sosial	oIntegrasi layanan jaminan kesehatan bagi keluarga rentan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								Intervensi gizi untuk keluarga berisiko stunting dan ibu hamil kurang gizi.
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Sinkronisasi perencanaan berbasis data UHH, AKI, dan TB - Penguatan monitoring-evaluasi berbasis indikator IPM dan UHH.
							Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah
	Meningkatnya angka kemiskinan menjadi 5,07% pada Tahun 2023 (meskipun mengalami penurunan yang tidak signifikan pada Tahun 2024 menjadi 4,97%)			Sasaran 2.1.3: Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Juta rupiah per kapita/tahun)	Optimalisasi peningkatan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, berkarakter dan mampu berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan	Dinas Sosial	- Memperluas program perlindungan sosial adaptif bagi keluarga miskin - Memperkuat basis data pensasaran (DTKS) agar intervensi tepat sasaran - Mengintegrasikan bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi
	Kualitas sumber daya manusia masih rendah sehingga pekerja harus bekerja dengan upah murah						Dinas Tenaga Kerja	- Mendorong peningkatan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri - Penguatan sistem pelatihan vokasi dan sertifikasi - Fasilitasi penempatan kerja yang layak untuk mengurangi pekerja berupah rendah
							Dinas Pendidikan	- Peningkatan mutu pembelajaran yang berfokus pada literasi, numerasi, dan kesiapan kerja - Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								miskin ○Penguatan kemitraan sekolah–dunia usaha untuk pendidikan vokasiona
							Dinas Kesehatan	○Memperluas layanan kesehatan preventif dan promotif ○Penurunan angka stunting & anemia untuk mendukung kualitas SDM jangka panjang ○Optimalisasi layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○Sinkronisasi seluruh program peningkatan SDM dan pengurangan kemiskinan ○Penguatan monitoring capaian IPM dan pengeluaran per kapita ○Perumusan arah kebijakan berbasis bukti
							Dinas Perdagangan	○Mendorong pengembangan usaha mikro–kecil melalui pendampingan, akses modal, dan pasar ○Penguatan rantai pasok lokal untuk stabilitas harga ○Fasilitasi inkubasi bisnis bagi pemuda dan perempuan
							Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	○Peningkatan literasi kewirausahaan ○Implementasi pelatihan manajemen usaha ○Perluasan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM.

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
Rendahnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan	Pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur sehingga mengakibatkan banjir dan genangan	Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan	Tujuan 3.1: Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata		Indeks layanan infrastruktur			○
	Pembangunan rumah swadaya yang tidak terkendali sehingga rumah tidak layak huni masih mencapai 8.140 rumah tangga							
	Kondisi akses air minum tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan. Dari total 238.610 Sambungan Rumah (SR) perpipaan, hanya 64,58% atau 84.757 unit yang memenuhi aspek kualitas air minum							
	Masih ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang belum mendapatkan layanan air perpipaan							
	Tantangan di bidang sanitasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat serta kemampuan ekonomi untuk mengikuti penyedotan lumpur tinja secara berkala maksimal 3 tahun sekali dan kurangnya pemeliharaan ipal Kawasan maupun Ipal Komunal Hanya 68,3% dari 161 Ipal yang berfungsi sehingga akses sanitasi aman hanya 8,45%)							
				Sasaran 3.1.1: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi	Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan	Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan secara merata, inklusif dan terintegrasi melalui kolaborasi. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan skema pembiayaan inovatif	Dinas Pekerjaan Umum	○Optimalisasi sistem drainase kota melalui rehabilitasi jaringan primer-sekunder, pemetaan titik rawan genangan berbasis GIS, serta integrasi sistem pompa dan kanal ○Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas kawasan perkotaan ○Pengembangan model prediksi

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
					Indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan		banjir berbasis data ○ Pengembangan skema pembiayaan kreatif (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis	
							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ○ Program rehabilitasi RTLH berbasis data terpadu dan skema kolaborasi CSR, Baznas, dan masyarakat. ○ Penguatan regulasi dan pengawasan pembangunan rumah swadaya untuk mencegah permukiman kumuh baru. ○ Pengembangan kawasan permukiman layak huni melalui pendekatan penataan kawasan (slum upgrading) ○ Integrasi perencanaan permukiman dengan rencana tata ruang dan mitigasi risiko bencana	
							Dinas Lingkungan Hidup ○ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye sanitasi aman berbasis komunitas. ○ Revitalisasi IPAL kawasan dan IPAL komunal dengan kerjasama pemerintah–masyarakat–swasta. ○ Penyempurnaan armada dan sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal (<i>scheduled desludging</i>) berbasis aplikasi. ○ Penguatan regulasi dan	

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								insentif agar rumah tangga melakukan penyedotan berkala maksimal 3 tahun
							Dinas Tata Ruang	○ Penegakan aturan tata ruang untuk mencegah pembangunan yang memperburuk drainase atau menciptakan permukiman kumuh. ○ Integrasi RDTR dengan sistem infrastruktur air, sanitasi, dan drainase. ○ Pemanfaatan teknologi (drone mapping, GIS) pengawasan kawasan berkembang
							Dinas Komunikasi dan Informasi	○ Pengembangan sistem pemantauan infrastruktur berbasis IoT (banjir, kualitas air, pemakaian IPAL) ○ Optimalisasi aplikasi layanan aduan masyarakat terintegrasi dengan OPD teknis. ○ Penguatan literasi digital masyarakat terkait penggunaan layanan infrastruktur
							Perusda PDAM	○ Perluasan sambungan rumah ke wilayah belum terlayani terutama Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan teknologi distribusi alternatif (desalinasi, sistem air baku komunal, mobile water treatment). ○ Peningkatan kualitas air

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								melalui modernisasi instalasi pengolahan, pengurangan kebocoran (NRW), dan sertifikasi kualitas air. ○ Pengembangan model pembiayaan inovatif untuk perluasan jaringan perpipaan (blending finance) ○ Integrasi sistem monitoring kualitas air secara <i>real-time</i>
				Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penetapan, integritas dan implementasi RDT	Dinas Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir melalui zonasi ketat berbasis RDTR ○ Penyelarasan jaringan perpipaan dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR ○ Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase makro–mikro berbasis peta kerentanan banjir ○ Penguatan jaringan distribusi dan pengurangan kehilangan air (Non-Revenue Water) ○ Sinkronisasi proyeksi pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan infrastruktur dalam penyusunan RDTR dan rencana investasi infrastruktur ○ Penyusunan peta prioritas layanan air minum berbasis proyeksi kebutuhan ○ Penyusunan rencana induk

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								sanitasi (SPSD) yang selaras dengan RDTR
							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	oPenyusunan dan penegakan standar hunian layak berbasis RDTR
							Perusda PDAM	oPeningkatan kualitas air baku dan kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) oProgram pemerataan sambungan rumah, prioritas kawasan padat dan permukiman berpenghasilan rendah
		Misi 4: Pengembangan	Tujuan 4.1: Meningkatnya		Indeks inovasi daerah			
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik di Kota Makassar yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024) Layanan publik digital masih diperhadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem	pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata	kualitas inovasi daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya penguasaan IPTEK	Indeks kapabilitas inovasi	Peningkatan daya saing daerah melalui penguasaan IPTEK yang mendorong produktivitas daerah	Dinas Komunikasi dan Informasi	oMembangun <i>Digital Service Platform</i> berbasis arsitektur SPBE terpadu oImplementasi interoperabilitas melalui <i>Application Programming Interface (API) Gateway</i> . oPenguatan <i>data governance</i> (standar metadata, SSO, keamanan).
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	oIntegrasi perizinan dengan platform digital kota oPenyederhanaan dan otomasi proses perizinan berbasis risk-based approach.
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	oPenerapan layanan adminduk <i>end-to-end</i> berbasis NIK dan SSO. oIntegrasi data kependudukan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								sebagai <i>reference data</i> layanan digital kota.
							Inspektorat	○ Audit kepatuhan SPBE dan pengendalian internal keamanan informasi ○ Monitoring capaian digitalisasi layanan secara triwulanan.
							Badan Riset dan Inovasi Daerah	○ Riset penguatan kapabilitas Inovasi dan asesmen tingkat kematangan digital OPD ○ Inkubasi inovasi digital dan evaluasi berbasis evidence.
							Dinas Kounikasi dan Informasi	○ Pengembangan sistem digital, integrasi layanan ○ Penguatan keamanan data ○ Standardisasi arsitektur SPBE
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Sinkronisasi kebijakan inovasi daerah ○ Fasilitasi ekosistem inovasi lintas sektor ○ Perencanaan strategi digitalisasi layanan
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Implementasi digitalisasi pelayanan perizinan sebagai <i>quick win</i> inovasi layanan publik
							Inspektorat	○ Pengawasan implementasi SPBE, audit inovasi, dan pemenuhan standar kualitas layanan digital
			Tujuan 4.2:		Kontribusi sektor penyediaan akomodasi,			○

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
			Meningkatnya daya saing pariwisata		makan dan minum terhadap PDRB (%)			
				Sasaran 4.2.1: Meningkatkan jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara Rata-rata lama tinggal wisatawan	Meningkatkan PDRB sektor makan-minum melalui fasilitasi daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Dinas Pariwisata	○ Digitalisasi seluruh layanan perizinan dan informasi wisata melalui <i>tourism digital platform</i> terpadu. ○ Penerapan <i>visitor data analytics</i> untuk memantau pola kunjungan, preferensi wisatawan, dan durasi tinggal. ○ Integrasi data destinasi, event, kuliner, hotel, dan transportasi dalam satu sistem interoperabel dengan OPD lain
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Optimalisasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) daerah untuk perizinan pariwisata secara <i>end-to-end</i> berbasis digital. ○ Penyederhanaan layanan perizinan hotel, restoran, café, dan event pariwisata secara terpadu. ○ Penyediaan <i>real-time investment tracking</i> untuk meningkatkan minat investor sektor makan-minum
							Dinas Kebudayaan	○ Digitalisasi kalender event budaya, tiket pertunjukan, dan sistem reservasi. ○ Penyediaan platform digital untuk promosi seni budaya lokal sebagai bagian dari rencana perjalanan wisata ○ Integrasi konten budaya dalam

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								aplikasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisata yang inklusif Dinas Koperasi dan UKM - o Pemetaan dan digitalisasi sentra kuliner, UMKM, dan produk kreatif dalam satu platform. - o Pelatihan UMKM kuliner dalam pemasaran digital dan <i>cashless system</i> - o Akselerasi sertifikasi produk kuliner melalui layanan digital terintegrasi Inspektorat - o Audit kinerja digitalisasi layanan pariwisata secara berkala - o Penguatan tata kelola data dan keamanan informasi antar-OPD - o Fungsi pengendalian untuk memastikan layanan publik digital mencapai >70% integrasi
				Sasaran 4.2.2: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam warisan budaya tak benda (%)	Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya	Dinas Kebudayaan	- o Digitalisasi basis data WBTD dan cagar budaya untuk meningkatkan persentase karya budaya yang terdaftar dan terlindungi. - o Integrasi sistem budaya

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
					Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	serta kearifan lokal sejak dini		dengan platform kota agar dapat diakses publik dan wisatawan. ○ Penyediaan layanan aduan, perizinan pemanfaatan cagar budaya, dan kurasi budaya secara online ○ Monitoring capaian melalui indikator tujuan dan sasaran.
							Dinas Pariwisata	○ Digitalisasi promosi pariwisata melalui platform terpadu (e-tourism) yang menampilkan informasi destinasi, event budaya, akomodasi, dan UMKM kuliner. ○ Integrasi layanan pariwisata dengan super apps kota dan sistem informasi budaya ○ Optimalisasi data pariwisata untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Penyediaan layanan cepat untuk perizinan usaha akomodasi, kuliner, dan event budaya. ○ Simplifikasi proses perizinan melalui automation dan tracking real-time
							Dinas Koperasi dan UKM	○ Fasilitasi UMKM pariwisata untuk onboarding digital (marketplace, e-payment, QRIS) ○ Integrasi produk UMKM

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								budaya dan kuliner ke platform pariwisata digital ○ Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan digital pemerintah
Masih rendahnya koperasi yang memenuhi kriteria aktif	Lemahnya manajemen koperasi, seperti kurangnya partisipasi anggota atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi			Sasaran 4.2.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif	Jumlah industri ekonomi kreatif yang aktif Persentase industri ekonomi kreatif yang memanfaatkan platform digital (%)	Penguatan pusat inovasi menjadi katalisator yang kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata didorong oleh kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal yang inovatif	Dinas Koperasi dan UKM	○ Penguatan manajemen koperasi melalui pelatihan tata kelola, literasi keuangan, dan digitalisasi ○ Revitalisasi koperasi yang tidak aktif melalui audit kelembagaan dan pendampingan intensif ○ Mendorong integrasi koperasi dengan pelaku ekonomi kreatif sebagai penopang inovasi lokal
							Dinas Pariwisata	○ Pembentukan kemitraan antara koperasi dan pelaku industri akomodasi, makan-minum, serta seni budaya ○ Mendorong koperasi sebagai aggregator produk kreatif untuk meningkatkan rantai nilai pariwisata ○ Menyediakan ruang display produk kreatif koperasi di pusat wisata
							Dinas Perdagangan	○ Fasilitasi koperasi dalam memanfaatkan platform digital marketing ○ Penguatan akses koperasi ke rantai pasok pariwisata dan industri kreatif. ○ Dukungan standarisasi dan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								sertifikasi produk koperasi
							Dinas Kebudayaan	○Mendorong koperasi berbasis seni budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif ○Integrasi program pembinaan seniman/ komunitas budaya melalui kelembagaan koperasi ○Kurasi produk lokal untuk meningkatkan daya saing pariwisata
							Dinas Perindustrian	○Penyediaan teknologi tepat guna dan inkubasi industri kreatif melalui koperasi ○Mendukung diversifikasi produk koperasi sesuai tren ekonomi kreatif ○Fasilitasi sertifikasi industri kreatif untuk koperasi anggota
								○
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan integratif	Menurunnya Indeks survei penilaian integritas Kota Makassar dari tahun sebelumnya menjadi 62,33 (Tahun 2024) sehingga Pemerintah Kota Makassar secara umum memiliki keberadaan korupsi dan risiko korupsi yang tinggi	Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan keterlibatan umum	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas	Inspektorat	○Penguatan SPIP, manajemen risiko ○Peningkatan pengawasan ○Peningkatan nilai MCP KPK.
					Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Dinas Komunikasi dan Informasi	○Percepatan layanan digital ○Integrasi data ○Interoperabilitas sistem ○Peningkatan nilai SPBE
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (%)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	○Reformasi birokrasi ○Pembangunan budaya kerja berAKHLAK, pengembangan kompetensi ASN digital
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang belum berjalan optimal (Nilai IRB 76,78 atau kategori baik pada Tahun 2024) karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital				Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK			

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
	dan pembangunan budaya berAKHLAK belum optimal, dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	oPenguatan manajemen keuangan daerah berbasis akuntabilitas dan transparansi
	Penurunan Indeks Maturitas SPIP (Hanya 3,100 pada Tahun 2024) karena pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, manajemen risiko pemerintah Kota Makassar juga belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan						Bagian Organisasi dan Tata Laksana	oPeningkatan akuntabilitas kinerja oEvaluasi SAKIP, dan penyederhanaan proses bisnis
	Penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar selama kurun waktu 3 tahun terakhir (3,21 pada Tahun 2024)						Seluruh Perangkat Daerah	oImplementasi manajemen risiko oIntegrasi layanan digital oPeningkatan kualitas layanan publik
	Keterlambatan adopsi teknologi digital dalam sistem pemerintahan dan kurangnya integrasi data serta sistem antar-perangkat daerah (hanya 21 dari 43 atau sekitar 49% layanan publik daring pada Tahun 2024)							
		Tujuan 5.2: Meningkatnya kualitas keamanan,	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
Sistem hukum dan keamanan ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat	Masih tingginya jumlah tindak kriminalitas (4.195) kasus pada Tahun 2023 dan angka kriminalitas sebesar 287 tindakan kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar) karena arus urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda			Sasaran 5.2.1: Meningkatnya kualitas keamanan masyarakat	Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	Memperkuat stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran serta masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	oPelatihan ASN Satpol PP dan kecamatan dalam digital response system dan etika pelayanan keamanan oPenerapan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Satpol PP berbasis digital
	Dinas Komunikasi dan Informasi						oIntegrasi CCTV, sensor lingkungan, dan <i>command center</i> keamanan Kota Makassa	
	Bagian Tata Pemerintahan						oTransparansi penanganan pelanggaran ketertiban umum berbasis publikasi data <i>real-time</i> oPenguatan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan online yang terintegrasi oPenyederhanaan SOP penanganan gangguan ketertiban umum agar lebih cepat dan adaptif oImplementasi manajemen risiko Kamtibmas berbasis kelurahan (mapping wilayah rawan) oStandardisasi prosedur penanganan kriminalitas ringan, gangguan ketertiban, dan aduan warga	
	Masih rendahnya keterwakilan perempuan terpilih terhadap anggota DPRD Kota Makassar (Hanya 26% yang seharusnya 30% menurut aturan secara nasional) yang diakibatkan faktor struktural, kultural, dan institusional							
	Masih rendahnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD (Tahun 2022 tidak ada satu pun Perda inisiatif DPRD, sementara Tahun 2023 hanya 5 dari 10 Perda Inisiatif yang diundangkan							

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Kecamatan dan/atau Kelurahan	○Penguatan FKPM, ronda lingkungan, dan laporan cepat gangguan Kamtibmas ○Penguatan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan online yang terintegrasi
Masih rendahnya implementasi beragama masalah dan kurang berkembangnya kebudayaan maju	Masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Makassar (4,363 pada Tahun 2024 dan masuk kategori 10 kota dengan toleransi terendah)			Sasaran 5.2.2: Meningkatnya kualitas toleransi dalam bermasyarakat	Indeks toleran kota	Memperkuat kehidupan beragama yang maslahat, mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	○Penguatan FKUB dan forum dialog lintas agama–budaya di seluruh kecamatan
	Kurangnya alokasi anggaran dalam mendukung beragama masalah							
	Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif						Dinas Kebudayaan	○Penguatan ekosistem kebudayaan inklusif (event budaya, ruang publik kreatif, festival toleransi) ○Pembinaan komunitas budaya untuk mendorong kreativitas lintas suku–agama
							Dinas Komunikasi dan Informasi	○Digitalisasi arsip budaya dan narasi toleransi berbasis nilai kearifan lokal
		Misi 6: Meningkatkan akses	Tujuan 6.1: Meningkatnya kualitas keluarga		Indeks pembangunan keluarga		Satuan Polisi Pmong Praja	○Peningkatan kapasitas aparat Satpol PP untuk penanganan konflik keagamaan berbasis HAM

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
Masih tingginya tingkat ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda	Masih tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (2.030 kasus perceraian dan 504 kasus kekerasan pada Tahun 2023)	pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga	dan kesetaraan gender	Sasaran 6.1.1: Menurunnya ketimpangan gender	Indeks ketimpangan gender	Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	oMeningkatkan kapasitas implementasi <i>gender mainstreaming</i> di semua OPD melalui PPRG, SGA, dan analisis gender
	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional (Hak sipil dan kebebasan dengan nilai 47,32 dan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 39,64)							oMemperluas layanan UPTD PPA berbasis <i>one stop service</i> dengan psikolog, konselor, dan <i>legal aid</i>
	Indeks Ketimpangan Gender (IGD) berada di bawah angka nasional dan provinsi (0,188). Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%							oMendorong pemenuhan klaster perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor
							Dinas Sosial	oPenguatan <i>case management</i> bagi korban kekerasan, anak berhadapan hukum, dan keluarga miskin
								oPenyediaan <i>family development session</i> untuk keluarga berisiko tinggi perceraian
								oPenguatan jejaring LKS/ NGO dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan
							Dinas Kesehatan	oOptimalisasi <i>women-friendly health services</i> dan <i>one stop crisis center</i> di puskesmas.
								oPenguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk menurunkan risiko perkawinan anak dan kerentanan.
								oIntegrasi layanan kesehatan mental bagi keluarga berisiko

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Dinas Pemuda dan Olahraga ○Peningkatan partisipasi pemuda dalam pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan olahraga. ○Pengembangan <i>youth center</i> inklusif yang mendukung keterampilan sosial dan ekonomi pemuda ○Program pencegahan kenakalan remaja dan radikalisme berbasis komunitas	
							Dinas Tenaga Kerja ○Perluasan pelatihan vokasi perempuan di sektor unggulan kota ○Peningkatan keterlibatan perempuan dalam program wirausaha & penempatan kerja ○Penguatan kebijakan tempat kerja ramah perempuan (fasilitas laktasi, jam kerja fleksibel)	
				Sasaran 6.1.2: Meningkatnya kualitas perlindungan anak	Indeks perlindungan anak	Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, Berkelanjutan, dan berbasis hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ○Penguatan UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu (psikologis, hukum, medis, reintegrasi sosial) ○Membangun <i>child protection system</i> di tingkat kelurahan (pelaporan, rujukan, manajemen kasus) ○Penguatan Program Pengasuhan Positif serta <i>Family Learning Center</i>	

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Dinas Pendidikan	- oImplementasi Sekolah Ramah Anak pada seluruh satuan pendidikan. - oPenguatan kurikulum karakter, kesadaran hukum, serta pendidikan kesetaraan gender
							Dinas Kesehatan	oOptimalisasi <i>one stop crisis center</i> dan layanan ramah anak di puskesmas
							Dinas Sosial	- oPenguatan layanan Rumah Aman Anak dan jejaring LKS/NGO berbasis komunitas. - oPelaksanaan program ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan berulang
							Dinas Pemuda dan Olahraga	- oProgram pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kegiatan kreatif yang mencegah perilaku berisiko. - oKolaborasi pencegahan kekerasan dan perundungan berbasis komunitas pemuda
							Dinas Tenaga Kerja	- oPelatihan vokasi perempuan untuk meningkatkan TPAK dan menekan ketergantungan ekonomi yang berdampak pada kerentanan anak. - oPengawasan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi pekerja anak
				Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kualitas	Indeks pembangunan pemuda	Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul,	Dinas Pemuda dan Olahraga	oPenguatan <i>youth development programs</i> (leadership, kewirausahaan, literasi digital)

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
				pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan keolahragaan	berdaya saing, serta Peningkatan prestasi olahraga		○ Penyediaan <i>youth center</i> di kecamatan sebagai ruang aman kreatif dan inovatif. ○ Peningkatan pembinaan olahraga melalui klub, sekolah olahraga, dan kompetisi berjenjang. ○ Penguatan pelatihan pelatih/tenaga kepelatihan bersertifikat
							Dinas Pendidikan	○ Penguatan ekstrakurikuler olahraga, seni, dan budaya sebagai bagian pembinaan pemuda. ○ Implementasi sekolah ramah anak dan anti kekerasan sebagai fondasi pembangunan generasi unggul
							Dinas Tenaga Kerja	○ Pelatihan vokasi pemuda berbasis kebutuhan industri kreatif dan teknologi ○ Penumbuhan wirausaha muda dan pelatihan <i>start up</i> untuk menekan angka kemiskinan ○ Fasilitasi sertifikasi kompetensi pemuda guna meningkatkan partisipasi kerja
							Dinas Sosial	○ <i>Family development session</i> bagi keluarga berisiko perceraian untuk menekan dampak pada pemuda. ○ Rehabilitasi sosial bagi pemuda rentan (disabilitas, korban kekerasan, anak jalanan). ○ Pemberdayaan ekonomi

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
								keluarga guna memutus rantai kemiskinan pemuda
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	○Penguatan pola pengasuhan positif serta edukasi keluarga. ○Mendorong perbaikan IGD melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik
							Dinas Koperasi dan UKM	○Inkubasi bisnis UMKM pemuda serta akses pembiayaan berbasis komunitas ○Pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga untuk menekan kemiskinan. ○Pelatihan manajemen usaha bagi pemuda dan perempuan
			Tujuan 6.2: Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran		Tingkat kemiskinan (%)			
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah			Sasaran 6.2.1: Menurunnya disparitas pendapatan	Gini rasio	Memperluas peluang ekonomi yang lebih merata. Peningkatan SDM dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Tenaga Kerja	○Penguatan pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (<i>manufacturing</i>, konstruksi, perdagangan) ○Penegakan standar upah layak dan pengawasan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi buruh. ○Fasilitasi penempatan kerja yang inklusif bagi perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	
Masalah Pokok	Akar Masalah						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Sosial	Dinas Koperasi dan UKM
	Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati <u>pendapatan yang jauh lebih tinggi</u> Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai						○Mendorong industrial upgrading dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pekerja agar imbalan lebih proporsional ○Pemberdayaan UMKM dan koperasi industri untuk mendorong pendapatan merata ○Insentif bagi industri yang menerapkan skema kesejahteraan pekerja	○Penguatan bantuan sosial adaptif bagi keluarga berpendapatan rendah untuk menurunkan gini ratio ○Integrasi data kemiskinan (DTKS) agar intervensi tepat sasaran ○Perluasan program pemberdayaan ekonomi rentan (perempuan, anak muda, disabilitas)	○Pengembangan koperasi pekerja dan koperasi produksi untuk mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan buruh ○Akses permodalan mikro bagi kelompok berpendapatan rendah ○Pendampingan UMKM agar naik kelas dan memperluas pendapatan keluarga

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
				Sasaran 6.2.2: Meningkatnya perlindungan bagi penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). Mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan	Dinas Ketenagakerjaan - o Membangun sistem rekrutmen inklusif untuk penyandang disabilitas pada sektor perdagangan, pengolahan, dan konstruksi - o Pelatihan vokasi adaptif sesuai jenis disabilitas - o Pengawasan penerapan kuota pekerja disabilitas di perusahaan sesuai regulasi ketenagakerjaan Dinas Sosial - o Pendataan terpadu penyandang disabilitas untuk memetakan potensi dan hambatan kerja - o Bantuan sosial adaptif bagi disabilitas miskin - o Program pemberdayaan ekonomi mandiri bagi disabilitas berbasis kebutuhan individual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - o Penyusunan pedoman pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas di dunia kerja Dinas Pemuda dan Olahraga - o Program peningkatan keterampilan kewirausahaan pemuda disabilitas - o Pelibatan pemuda disabilitas dalam kegiatan komunitas dan wirausaha sosial	

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
		Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Tujuan 7.1: Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari Tujuan 7.2: Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Indeks kualitas tutupan lahan Timbulan sampah yang terolah difasilitas pengolahan sampah Indeks risiko bencana	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum	- o Meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis sensor real time serta memperluas titik monitoring IKU - o Mengembangkan inovasi pengurangan sampah (<i>waste to energy</i>, TPS3R, revitalisasi bank sampah) untuk menaikkan persentase sampah terolah - o Penguatan pengawasan industri/ usahawan untuk menekan emisi dan pencemaran air - o Restorasi kawasan RTH kritis dan peningkatan vegetasi melalui program RTH komunitas - o Penataan drainase kota berbasis analisis daya dukung untuk menurunkan risiko banjir akibat alih fungsi lahan - o Mendesain dan membangun infrastruktur ramah lingkungan (<i>eco-drain, permeable pavement</i>) - o Integrasi RTH dalam setiap pembangunan infrastruktur
Rendahnya kualitas lingkungan hidup Kota Makassar	Terjadinya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi secara pesat Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun menjadi 74,92 (Tahun 2024) Belum maksimalnya pengelolaan sampah (rata-rata hanya 2,01% sampah yang terolah di fasilitas, dan menurunnya jumlah bank sampah aktif) Massifnya pembangunan infrastruktur mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir							

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							baru
							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	○ Penyediaan dan revitalisasi RTH lingkungan pada permukiman padat ○ Pengendalian pembangunan ilegal yang mengurangi kapasitas resapan air ○ Implementasi konsep permukiman berkelanjutan (<i>green housing, eco-village</i>)
							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	○ Pengelolaan sampah berbasis komunitas ○ Program adopsi pohon dan urban farming sebagai upaya menambah tutupan lahan
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Integrasi target indeks kualitas lingkungan hidup dalam seluruh dokumen perencanaan OPD ○ Monitoring capaian IKLH, IKU, IKA, dan indeks tutupan lahan secara terpadu
Masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan biru	Masih lemahnya industri pengolahan maritim	Sasaran 7.2.1: Meningkatkan kapasitas penanganan bencana dan adaptasi perubahan iklim	Indeks ketahanan daerah	Penguatan kapasitas Penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada edukasi. Infrastruktur hijau. Pemanfaatan teknologi adaptif.	Dinas Lingkungan Hidup	○ Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis teknologi (tracking sampah, pemilahan di sumber) ○ Meningkatkan pemulihan kualitas air melalui penguatan pengawasan limbah industri		
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan laut							
	Penanganan sampah yang belum terintegrasi							
	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)							

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
	Kualitas air yang perlu ditingkatkan					kolaborasi multipihak pendekatan partisipatif dan		dan modernisasi laboratorium lingkungan ○Ekspansi Ruang Terbuka Hijau publik dan privat dengan pendekatan <i>nature-based solutions</i>
							Dinas Pekerjaan Umum	○Pembangunan infrastruktur hijau: sumur resapan, taman kota, koridor hijau, kawasan resapan banjir ○Peningkatan infrastruktur air limbah dan drainase untuk mengurangi pencemaran dan risiko banjir. ○Integrasi konsep low impact development (LID) dalam pembangunan kota
							Badan Penanggulangan Bencana Daerah	○Pengembangan sistem peringatan dini adaptif berbasis data cuaca dan pasang surut ○Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir melalui edukasi mitigasi risiko iklim ○Kolaborasi multipihak untuk penyusunan rencana kontinjensi perubahan iklim. ○Integrasi penilaian risiko dalam perencanaan tata ruang

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi
Masalah Pokok	Akar Masalah							
							Dinas Tata Ruang	
								○ Penataan kawasan urban berbasis ekologi kota ○ Optimalisasi RTH privat melalui regulasi kewajiban RTH pada pembangunan gedung

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

B. Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Pengembangan penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah merupakan langkah yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di suatu wilayah, termasuk Kota Makassar. Strategi ini dapat melibatkan kerja sama terhadap beberapa elemen antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan produk. Ada beberapa isu strategis daerah berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Pencapaian target-target tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)
- 2) Transformasi digital dalam pemerintah dan pelayanan publik
- 3) Penguatan ketahanan pangan, energi, dan air
- 4) Peningkatan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup perkotaan
- 5) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang adaptif, integratif, dan berbasis data
- 6) Peningkatan ketahanan energi dan air, serta mitigasi dampak perubahan iklim
- 7) Tantangan peningkatan kualitas layanan infrastruktur
- 8) IPTEKIN dan digitalisasi
- 9) Optimalisasi kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan
- 10) Terbatasnya akses dan distribusi energi, air, dan pangan
- 11) Implementasi ekonomi hijau dan biru
- 12) Kinerja koperasi terhadap potensi ekonomi lokal
- 13) Penguatan kapasitas UMKM dalam menciptakan lapangan kerja
- 14) Fluktuasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- 15) Keterbatasan distribusi pendapatan.

Tabel 5. 2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
VISI: MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN									
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan berkemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi 2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	- Menyusun <i>research roadmap</i> sektor unggulan (perdagangan, pengolahan, konstruksi, ekonomi kreatif, dan digital) untuk mengarahkan investasi riset pada kebutuhan ekonomi lokal - Mengembangkan <i>science tech innovation hub</i> kota melalui fasilitas laboratorium, pusat inkubasi bisnis, <i>co-creation center</i> , dan dukungan teknologi digital terpadu - Menetapkan kebijakan insentif untuk mendorong inovasi, termasuk	- Memperkuat kapasitas BRIDA, OPD teknis, serta perguruan tinggi dalam riset terapan melalui pelatihan metodologi, manajemen inovasi, dan evaluasi dampak. - Menyediakan <i>fund ing pool</i> riset daerah untuk mendorong penelitian yang berorientasi pada penguatan sektor unggulan dan penciptaan lapangan kerja - Memperluas dukungan pendampingan teknis bagi UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengadopsi hasil riset, teknologi produksi, dan	- Membangun kemitraan tripel heliks (pemerintah–akademisi–dunia usaha) untuk riset terapan pada sektor prioritas seperti industri pengolahan, perdagangan digital dan maritim - Mendorong kolaborasi penelitian bersama BUMD, industri lokal, dan investor untuk mempercepat hilirisasi produk unggulan daerah - Menghubungkan UMKM dengan lembaga penelitian untuk rekayasa produk, sertifikasi, dan peningkatan	- Menumbuhkan budaya data- <i>driven policy</i> dengan mewajibkan setiap OPD menggunakan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program - Mendorong kompetisi inovasi daerah (inovasi pelayanan publik, <i>innovation award</i> , kompetisi startup) untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pelaku usaha - Mengembangkan literasi inovasi melalui pelatihan, seminar, dan publikasi hasil riset sehingga budaya ilmiah terinternalisasi di	- Mengintegrasikan seluruh aktivitas riset, data ekonomi, dan inovasi melalui <i>Makassar Research & Innovation System</i> (MRIS) untuk menghindari duplikasi dan memperkuat sinkronisasi program. - Memastikan hasil riset langsung dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama sektor unggulan, penciptaan kerja, ketahanan pangan, dan iklim investasi. - Mengembangkan <i>monitoring dashboard</i> untuk memantau kinerja inovasi, adopsi teknologi, dan	- Mengadopsi standar internasional dalam pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, dan teknologi hijau untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar global - Mengembangkan riset berbasis isu global: ekonomi sirkular, <i>renewable energy</i> , <i>climate resilience</i> , dan smart urban system sesuai tren pertumbuhan kota modern - Membangun jejaring riset internasional dengan universitas dan lembaga riset global untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas peneliti daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kemudahan perizinan bagi usaha berbasis teknologi dan pembiayaan inovasi melalui skema pendanaan daerah	inovasi model bisnis	standar kualitas	lingkungan birokrasi dan masyarakat.	kontribusinya terhadap PDRB sektor unggulan	
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat		- Menyusun regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum dan insentif inovasi bagi sektor unggulan (maritim, kuliner, digital, dan jasa). - Mengembangkan <i>research facilities</i> seperti laboratorium teknologi, pusat inkubasi bisnis, <i>co innovation space</i>, serta <i>data center</i> daerah yang mendukung riset sektor prioritas - Membangun	- Memperkuat peran BRIDA sebagai <i>knowledge hub</i> dalam pengembangan produk unggulan daerah melalui standarisasi metodologi riset, <i>knowledge management</i>, dan koordinasi lintas-OPD - Meningkatkan kapasitas ASN melalui <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> pada analisis kebijakan, ekonomi kreatif, manajemen inovasi, dan teknologi digital - Menyediakan	- Mengembangkan kemitraan <i>quadruple helix</i> (pemerintah-akademisi-industri-komunitas) untuk riset produk unggulan seperti penguatan sektor kuliner, perikanan, dan ekonomi kreatif digital - Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset terapan, <i>pilot project</i>, serta pengembangan teknologi tepat	- Membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data pada OPD melalui <i>routine policy analytics</i>, publikasi hasil riset, dan forum diseminasi inovasi - Mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi melalui <i>innovation challenge</i>, lomba <i>start up</i> lokal, dan kampanye literasi teknologi - Menumbuhkan perilaku adaptif	- Mengintegrasikan hasil riset dalam <i>planning cycle</i> pembangunan: RPJMD–RKPD–Renja OPD agar kebijakan sektor unggulan berbasis bukti dan berorientasi hasil - Membangun sistem pemantauan inovasi (dashboard inovasi daerah) untuk menilai kinerja riset, adopsi teknologi, dan dampaknya terhadap penciptaan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat	- Mengadopsi standar global pada sektor unggulan (keamanan pangan, rantai pasok dingin, energi terbarukan, ekonomi hijau) untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. - Mengembangkan riset terkait <i>green growth</i> dan transformasi digital untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi Makassar - Mendorong adaptasi teknologi global (IoT, <i>big data analytics</i>, AI) oleh UMKM, IKM, dan <i>start up</i> daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				sistem tata kelola data berbasis <i>open data</i> untuk meningkatkan kualitas analisis dan perencanaan berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>)	skema pendanaan riset dan inovasi, termasuk <i>matching fund</i> dengan pelaku industri dan hibah inovasi untuk UMKM unggulan	guna pada sektor prioritas - Menghubungkan UMKM/IKM unggulan dengan investor, lembaga keuangan, dan platform pemasaran digital untuk memperluas akses pasar	dan kreatif pada aparatur melalui skema penghargaan inovasi pelayanan publik tingkat kota	- Menyelaraskan inovasi daerah dengan program pengembangan kawasan ekonomi, penguatan rantai pasok, dan digitalisasi layanan usaha.	untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk unggulan
	Tujuan 1.2: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah		- Menyusun <i>fiscal research roadmap</i> yang memetakan struktur PAD, ketergantungan pada dana transfer, dan potensi sumber-sumber penerimaan baru - Mengembangkan kebijakan pajak dan retribusi daerah berbasis kajian daya dukung ekonomi dan kemampuan bayar wajib pajak	- Memperkuat kapasitas Bappenda, BPKAD, BRIDA, dan Bappeda dalam analisis fiskal, proyeksi penerimaan, <i>tax expenditure analysis</i> , dan evaluasi kebijakan insentif - Mengembangkan unit analisis kebijakan fiskal yang didukung data scientist - Menyediakan <i>fund ing pool</i> riset untuk inovasi	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset fiskal, dan asosiasi profesi (akuntan, konsultan pajak) untuk mengkaji potensi pajak dan retribusi baru, desain tarif progresif, dan pengurangan kebocoran penerimaan - Menggandeng sektor perbankan dan <i>fintech</i> untuk	- Menumbuhkan budaya pengambilan keputusan fiskal berbasis data melalui kewajiban penggunaan <i>policy brief</i> dan simulasi fiskal dalam penetapan tarif dan insentif - Mendorong inovasi layanan perpajakan (e-SPPT, e-payment, <i>tax center</i> kelurahan)	- Mengintegrasikan hasil riset fiskal dan data penerimaan ke dalam proses penyusunan RPJMD, KUA–PPAS, dan APBD - Mengembangkan <i>dashboard</i> kinerja fiskal yang memantau realisasi PAD, tingkat kepatuhan, komposisi belanja, dan ruang fiskal - Memastikan sinkronisasi antara strategi	- Menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal nasional, standar akuntansi pemerintah, dan praktik baik <i>good fiscal governance</i> - Mendorong riset tentang optimalisasi pajak daerah di era digital (ekonomi digital, pajak platform, pajak pariwisata) serta <i>green fiscal policy</i> - Membangun jejaring dengan lembaga

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				- Membangun infrastruktur digital perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan basis data usaha, properti, dan transaksi ekonomi.	peningkatan PAD, perbaikan tata kelola penerimaan, dan efisiensi belanja daerah.	pengembangan instrumen pembayaran pajak non-tunai, serta bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha dalam merumuskan skema insentif yang berkeadilan.	melalui kompetisi inovasi - Mengembangkan literasi fiskal di kalangan OPD dan masyarakat agar lebih memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.	peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan prioritas pembangunan lintas OPD. -	nasional/ internasional yang fokus pada transparansi fiskal, anti korupsi, dan <i>open budget</i> .
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan		- Menyusun <i>food security and price stability research roadmap</i> yang memetakan rantai pasok komoditas strategis, kerentanan harga, dan titik rawan pangan - Mengembangkan kebijakan pengendalian harga dan cadangan pangan berbasis	- Memperkuat kapasitas OPD pangan/ pertanian, perdagangan, dan perencanaan dalam analisis rantai pasok, proyeksi kebutuhan, dan pemodelan stabilitas harga - Mengembangkan <i>food observatory</i> di daerah yang dikelola bersama BRIDA dan perguruan tinggi	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, Bulog, pelaku pasar, asosiasi petani/ nelayan, dan distributor logistik untuk merancang skema <i>buffer stock</i> , kontrak farming, dan mekanisme distribusi yang lebih efisien - Menggandeng platform digital	- Menumbuhkan budaya perencanaan pangan berbasis bukti melalui pemanfaatan data produksi, stok, konsumsi, dan harga dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah / Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi - Mendorong inovasi model	- Mengintegrasikan hasil riset ketahanan pangan ke dalam RPJMD, rencana ketahanan pangan daerah, dan program pengentasan kemiskinan - Mengembangkan <i>dashboard</i> ketahanan pangan yang memantau harga, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan per	- Menyelaraskan kebijakan pangan daerah dengan agenda nasional dan global (SDGs, ketahanan pangan, nutrisi) serta kebijakan cadangan pangan nasional - Mendorong riset tentang dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, adaptasi pola tanam, dan pengembangan komoditas tahan iklim - Membangun

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				analisis data produksi, distribusi, dan konsumsi - Memperkuat infrastruktur pasar, gudang, dan sistem informasi harga secara <i>real time</i> .	- Menyediakan pendanaan riset untuk inovasi logistik, pengurangan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> , dan diversifikasi pangan lokal.	untuk pemantauan harga dan pemasaran hasil produksi lokal - Melibatkan BUMD dan koperasi dalam pengelolaan pangan dan kios stabilisasi harga.	pemasaran (pasar murah digital, <i>community supported agriculture</i> , dan pemasaran langsung produsen–konsumen) - Meningkatkan literasi gizi dan pangan lokal kepada masyarakat agar konsumsi lebih beragam dan tidak terfokus pada komoditas yang rentan fluktuasi.	wilayah - Menyinergikan program lintas sektor (pertanian, perikanan, perdagangan, sosial) dalam satu kerangka intervensi berbasis bukti.	jejaring dengan lembaga makanan/pangan nasional dan internasional untuk pertukaran pengetahuan dan dukungan teknis.
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar		- Menyusun <i>investment research roadmap</i> yang memetakan sektor prioritas, hambatan perizinan, dan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi - Mengembangkan kebijakan	- Memperkuat kapasitas Dinas Penanaman Modal, Bappeda, BRIDA, dan OPD teknis dalam analisis kelayakan investasi, <i>investment promotion</i> , dan manajemen kawasan industri/zona	- Membangun kemitraan dengan BKPM, KADIN, asosiasi pengusaha, dan perguruan tinggi untuk riset iklim investasi, preferensi investor, dan rancangan	- Menumbuhkan budaya pelayanan investasi berbasis data dan <i>customer oriented</i> di DPMPTSP dengan pemanfaatan survei kepuasan, <i>service analytics</i> , dan	- Mengintegrasikan hasil riset dan data investasi ke dalam RPJMD, rencana pengembangan kawasan, dan program infrastruktur - Mengembangkan <i>dashboard</i> investasi yang memantau nilai	- Menyelaraskan strategi investasi dengan tren investasi global (<i>green investment, digital economy, sustainable tourism</i>) dan komitmen lingkungan - Mendorong riset tentang <i>ease of doing business</i> ,

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kemudahan berusaha dan insentif investasi yang berbasis analisis manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan - Memperkuat infrastruktur layanan perizinan terpadu secara digital yang terhubung dengan data tata ruang dan infrastruktur.	ekonomi - Mengembangkan <i>investment intelligence</i> yang mengolah data tren investasi, profil investor, dan <i>competitive positioning</i> kota - Menyediakan pendanaan riset dan studi kelayakan untuk proyek-proyek investasi strategis.	paket insentif - Melakukan <i>investment forum</i> dan <i>business matching</i> antara pemilik proyek dan investor - Mengembangkan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk skema pembiayaan inovatif seperti KPBU dan <i>blended finance</i> .	pengukuran SLA - Mendorong inovasi layanan perizinan (<i>one-stop service</i> , konsultasi daring, <i>virtual site visit</i>) - Mengembangkan narasi investasi berbasis keunggulan lokal yang didukung data dan studi kasus keberhasilan.	realisasi, sektor, asal negara, dan sebaran spasial - Memastikan sinkronisasi kebijakan investasi dengan pengendalian tata ruang, perlindungan lingkungan, dan pengembangan UMKM lokal.	risiko regulasi, dan <i>city competitiveness</i> - Membangun jejaring dengan lembaga promosi investasi nasional dan jaringan kota investasi internasional untuk promosi dan <i>benchmarking</i> .
Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 2.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	- Menyusun <i>research roadmap</i> peningkatan kualitas pendidikan dan literasi yang memetakan satuan pendidikan berisiko, kesenjangan capaian literasi, dan kebutuhan riset terapan di	- Memperkuat kapasitas BRIDA, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan OPD terkait dalam riset kebijakan pendidikan melalui pelatihan metodologi riset terapan, analisis data asesmen, dan evaluasi dampak program literasi. - Menyediakan <i>fund</i>	- Membangun kemitraan <i>quadruple helix</i> antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas/LSM pendidikan untuk melaksanakan riset terapan dan <i>pilot project</i> peningkatan literasi di	- Menumbuhkan budaya pengambilan keputusan berbasis bukti di sektor pendidikan dengan mewajibkan penyusunan <i>policy brief</i> dan analisis data asesmen sebagai prasyarat penetapan	- Mengintegrasikan seluruh aktivitas riset, data asesmen, dan inovasi pendidikan ke dalam sistem informasi terpusat sehingga peta masalah literasi dan respon program dapat dipantau secara menyeluruh. - Memastikan hasil	- Mengadopsi kerangka dan standar internasional peningkatan literasi dan pembelajaran inklusif yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya Kota Makassar. - Mengembangkan riset terkait <i>safe and inclusive learning environment</i> , WASH

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				setiap jenjang. - Mengembangkan <i>education innovation hub</i> sebagai pusat pengembangan dan uji coba model pembelajaran inovatif, teknologi pendidikan, serta intervensi peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. - Menetapkan kebijakan pemanfaatan hasil asesmen nasional, rapor pendidikan, dan survei lingkungan belajar sebagai dasar <i>evidence based policy</i> dalam perencanaan program peningkatan	<i>ing pool</i> riset pendidikan yang berfokus pada peningkatan literasi, pengurangan kesenjangan mutu antar sekolah, serta pengembangan model pembelajaran inklusif bagi kelompok rentan. - Mengembangkan sistem tata kelola data pendidikan yang menjamin kualitas, keterbaruan, dan keterpaduan data capaian literasi, profil sekolah, dan program intervensi untuk menunjang riset dan inovasi kebijakan.	satuan pendidikan dengan capaian rendah. - Mendorong kolaborasi riset antara Dinas Pendidikan, BRIDA, dan LPTK/perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menguji model pembelajaran literasi berbasis konteks lokal, termasuk di kawasan padat penduduk dan wilayah marginal. - Menghubungkan sekolah dengan lembaga riset, komunitas literasi, dan dunia usaha untuk dukungan program pojok baca, perpustakaan sekolah,	program peningkatan mutu sekolah dan literasi. - Mendorong kompetisi inovasi pembelajaran melalui penghargaan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang menonjolkan praktik baik peningkatan literasi, pembelajaran inklusif, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. - Mengembangkan literasi riset dan inovasi di kalangan guru dan kepala sekolah melalui pelatihan penelitian tindakan kelas, penulisan karya ilmiah, dan forum diseminasi hasil	riset dan temuan analisis data literasi diintegrasikan ke dalam RPJMD sektor pendidikan, Renstra Dinas Pendidikan, RKPD, dan Renja OPD sebagai dasar penentuan prioritas sasaran dan alokasi anggaran. - Mengembangkan <i>monitoring dashboard</i> untuk memantau capaian literasi, kualitas pembelajaran, dan akses pendidikan per kecamatan dan per satuan pendidikan serta mengaitkannya dengan intervensi program dan dukungan sumber daya.	di sekolah, serta integrasi nilai karakter dan keagamaan dalam desain fasilitas dan praktik pembelajaran untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. - Membangun jejaring riset nasional dan internasional di bidang pendidikan dasar, literasi, dan inklusi pendidikan untuk <i>joint research</i>, pertukaran peneliti, dan akses pendanaan riset yang memperkuat mutu pendidikan daerah.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				mutu pendidikan.		penyediaan bahan bacaan bermutu, dan kampanye literasi keluarga.	riset yang relevan dengan peningkatan mutu pembelajaran.		
		Sasaran 2.1.2: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		- Menyusun <i>health research roadmap</i> yang memetakan beban penyakit utama, kesenjangan layanan, dan prioritas intervensi kesehatan masyarakat - Mengembangkan <i>health innovation hub</i> untuk uji coba model layanan promotif–preventif, <i>telemedicine</i>, dan pendekatan kesehatan berbasis komunitas - Menetapkan kebijakan pemanfaatan	- Memperkuat kapasitas Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit dalam epidemiologi terapan, analisis data rutin, dan evaluasi program - Mengembangkan unit analisis kesehatan masyarakat di BRIDA sebagai mitra teknis Dinkes - Menyediakan <i>fund pool</i> riset kesehatan untuk isu stunting, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan jiwa.	- Membangun kemitraan riset antara pemda, puskesmas/RS, perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi, dan BPJS untuk mengembangkan dan menguji intervensi peningkatan derajat kesehatan, penguatan layanan primer, dan efisiensi pembiayaan - Menggandeng komunitas dan LSM kesehatan untuk <i>pilot project</i> kampanye hidup sehat - Melibatkan sektor swasta	- Menumbuhkan budaya praktik klinis dan program kesehatan berbasis bukti melalui <i>case review</i>, audit medis, dan forum ilmiah rutin di puskesmas/RS - Mendorong inovasi layanan (klinik sehat sekolah, posyandu remaja, layanan konseling gizi) melalui kompetisi inovasi kesehatan daerah - Meningkatkan literasi riset di kalangan tenaga kesehatan	- Mengintegrasikan hasil riset kesehatan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan, RPJMD, RKPD, dan rencana aksi kesehatan prioritas - Mengembangkan <i>dashboard</i> kesehatan masyarakat yang memantau indikator kunci (AKI/AKB, stunting, TBC, hipertensi, imunisasi, kesehatan lingkungan) per wilayah - Memastikan sinergi program lintas OPD (kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial) untuk	- Menyelaraskan agenda riset dan inovasi kesehatan dengan standar WHO dan kebijakan nasional Kemenkes (transformasi layanan primer, pengendalian PTM, penanggulangan pandemi) - Mendorong riset tentang <i>universal health coverage</i>, penguatan sistem kesehatan, dan determinan sosial kesehatan - Membangun jejaring riset dengan lembaga nasional/internasional untuk isu prioritas seperti stunting, penyakit tidak menular, dan kesehatan kota.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				data surveilans, rekam medis elektronik, dan laporan fasilitas kesehatan sebagai dasar <i>evidence based policy</i> di sektor kesehatan.		dalam inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi.	melalui pelatihan penelitian tindakan dan penulisan publikasi praktis.	intervensi kesehatan yang komprehensif.	
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya daya beli masyarakat		- Menyusun <i>research roadmap</i> peningkatan daya beli yang mengaitkan dinamika sektor unggulan, UMKM, lapangan kerja, dan perlindungan sosial - Mengembangkan kebijakan insentif usaha kecil, pengupahan layak, dan program peningkatan pendapatan berbasis kajian	- Memperkuat kapasitas OPD ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, dan perencanaan dalam analisis kemiskinan, ketimpangan, dan pasar kerja - Mengembangkan unit analisis kesejahteraan rumah tangga yang mengolah data survei dan administrasi untuk rekomendasi program - Menyediakan pendanaan riset untuk model	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, asosiasi usaha, dan platform digital untuk riset model pembiayaan inklusif, pelatihan keterampilan, dan ekosistem UMKM - Menggandeng sektor swasta melalui program CSR yang berorientasi pada	- Menumbuhkan budaya kewirausahaan dan kemandirian ekonomi melalui pelatihan bisnis, inkubasi usaha, kompetisi ide usaha, dan kampanye literasi keuangan - Mendorong pemanfaatan data dan riset dalam penentuan sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan agar lebih tepat	- Mengintegrasikan hasil riset kemiskinan dan daya beli ke dalam strategi penanggulangan kemiskinan, pengembangan UMKM, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial - Mengembangkan <i>dashboard</i> daya beli yang memantau pendapatan, pengangguran, kepesertaan program bantuan, dan dampak intervensi - Menynergikan	- Menyelaraskan strategi peningkatan daya beli dengan agenda global pengurangan kemiskinan, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan (SDGs) - Mendorong riset tentang ekonomi sirkular, <i>gig economy</i>, dan transformasi digital kerja yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga - Membangun jejaring dengan lembaga riset ekonomi dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				dampak - Memperkuat infrastruktur sistem data kesejahteraan yang mencatat pendapatan, pekerjaan, dan status bantuan sosial rumah tangga.	pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan UMKM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.	peningkatan pendapatan dan daya saing usaha mikro - Melibatkan komunitas lokal dalam perancangan dan pendampingan program ekonomi keluarga.	sasaran - Mengapresiasi inovasi komunitas dan UMKM yang berhasil meningkatkan omzet dan penyerapan tenaga kerja.	program lintas OPD agar tidak tumpang tindih tetapi saling menguatkan.	pembangunan untuk mengakses praktik baik intervensi ekonomi inklusif.
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan	Tujuan 3.1: Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata	Sasaran 3.1.1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	- Menyusun <i>urban infrastructure research roadmap</i> yang memetakan kesenjangan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, drainase, air minum, sanitasi, jaringan pejalan kaki dan pesepeda, serta ruang terbuka hijau di seluruh wilayah kota	- Memperkuat kapasitas OPD infrastruktur (PUPR, Perhubungan, Perumahan Permukiman), BRIDA, dan Bappeda dalam analisis spasial, pemodelan hidrologi, analisis kapasitas jaringan, dan penilaian kelayakan ekonomi lingkungan melalui pelatihan dan	- Membangun kemitraan riset terapan dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi (PU, transportasi, arsitektur), dan sektor swasta konstruksi untuk mengembangkan dan menguji konsep infrastruktur inovatif seperti drainase berbasis alam, jalan ramah pejalan kaki	- Menumbuhkan budaya perencanaan dan pembangunan infrastruktur berbasis data dan kajian dengan mewajibkan penggunaan hasil studi kelayakan, analisis manfaat biaya, dan kajian lingkungan sebagai dasar pemilihan proyek - Menyelenggara	- Mengintegrasikan hasil riset dan data kinerja infrastruktur ke dalam RTRW/RDTR, rencana induk jaringan jalan dan drainase, rencana transportasi, serta dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan - Mengembangkan <i>dashboard</i> kinerja infrastruktur	- Menyelaraskan pembangunan infrastruktur kota dengan agenda global seperti SDGs, konsep <i>green city</i> dan <i>resilient city</i> dengan mengadopsi standar internasional yang relevan dan disesuaikan dengan konteks lokal - Mendorong riset tentang infrastruktur rendah emisi, solusi berbasis alam untuk pengurangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				- Mengembangkan kebijakan dan regulasi pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berketahanan iklim, termasuk standar desain jalan lengkap (<i>complete street</i>), drainase berkelanjutan, dan kawasan TOD - Membangun infrastruktur pendukung riset seperti <i>urban lab</i> dan sistem <i>digital twin</i> kota untuk simulasi skenario pembangunan infrastruktur.	- pendampingan teknis - Mengembangkan bank data infrastruktur terintegrasi berbasis GIS yang memuat kondisi, usia, dan tingkat pelayanan sarana prasarana - Menyediakan pendanaan riset untuk inovasi desain dan teknologi infrastruktur, termasuk material ramah lingkungan dan teknologi pemantauan kondisi infrastruktur.	- dan disabilitas, serta terminal dan simpul transportasi terintegrasi - Mengembangkan <i>pilot project</i> infrastruktur di koridor atau kawasan prioritas sebagai laboratorium hidup - Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam proses <i>co design</i> dan <i>co creation</i> ruang publik.	- kan forum teknis dan <i>design review clinic</i> untuk mengkritisi dan menyempurnakan desain infrastruktur strategis - Memberikan penghargaan kepada OPD dan tim teknis yang berhasil mengintegrasikan prinsip keselamatan, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam perancangan dan pelaksanaan infrastruktur.	- yang memantau kondisi, kapasitas, tingkat pelayanan, dan prioritas penanganan per wilayah - Memastikan sinkronisasi program infrastruktur lintas OPD dan lintas level pemerintahan agar saling mendukung dan mengurangi duplikasi.	- banjir dan panas kota, serta integrasi transportasi publik dalam tata ruang - Membangun jejaring kerja sama dengan kota dan lembaga internasional untuk <i>benchmarking</i> dan kolaborasi pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya		- Menyusun kebijakan	- Memperkuat kapasitas dinas	- Membangun kemitraan	- Menumbuhkan budaya tertib	- Mengintegrasikan sistem	- Menyelaraskan pengendalian

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
		pengendalian pemanfaatan ruang		pengendalian pemanfaatan ruang berbasis bukti yang memanfaatkan data kepadatan bangunan, fungsi lahan, dinamika penggunaan ruang, dan risiko bencana sebagai dasar penetapan zonasi dan ketentuan pemanfaatan - Mengembangkan sistem informasi tata ruang yang terintegrasi dengan layanan perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk peta interaktif RTRW/RDTR yang mudah diakses publik - Melakukan pembaruan	tata ruang, perizinan, dan penegakan perda dalam analisis spasial, pemodelan pertumbuhan kota, dan penilaian dampak pemanfaatan ruang melalui pelatihan teknis dan kerja sama dengan perguruan tinggi - Mengembangkan basis data perizinan dan pelanggaran pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan lapangan - Menyediakan pendanaan untuk studi kebijakan instrumen pengendalian (insentif-disinsentif,	dengan perguruan tinggi, lembaga survei, dan komunitas untuk pemantauan partisipatif pemanfaatan ruang melalui <i>citizen reporting</i>, <i>crowd mapping</i>, dan survei lapangan - Bekerja sama dengan pelaku usaha dan pengembang dalam merancang model pengembangan kawasan yang patuh rencana tata ruang dan berkelanjutan - Melibatkan komunitas lokal dan kelompok rentan dalam penyusunan <i>local plan</i> di kawasan padat,	ruang di kalangan pemerintah dan masyarakat melalui kampanye publik yang berbasis data mengenai risiko pelanggaran tata ruang (banjir, kemacetan, bencana, hilangnya RTH) - Mendorong inovasi pemanfaatan ruang publik dan ruang sisa (koridor, bantaran sungai, bawah jalan layang) secara legal, aman, dan produktif - Memberikan apresiasi kepada kelurahan/kom	informasi tata ruang dengan sistem perizinan, pengawasan pembangunan, dan perencanaan sektor lainnya (infrastruktur, perumahan, transportasi) sehingga setiap keputusan izin dan proyek dapat dicek kesesuaian ruangnya secara otomatis - Mengembangkan <i>dashboard</i> kepatuhan tata ruang yang menampilkan pola pelanggaran, langkah penindakan, dan dampaknya - Memastikan rekomendasi riset tata ruang masuk dalam revisi RTRW/RDTR dan kebijakan	pemanfaatan ruang dengan agenda pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengembangan kota kompak serta ramah pejalan kaki - Mendorong riset pemanfaatan ruang vertikal, <i>mixed-use development</i>, dan perlindungan kawasan lindung/ sempadan - Menjalin kerja sama dengan jaringan kota yang fokus pada perencanaan tata ruang dan mitigasi risiko untuk saling belajar dan mengembangkan model pengendalian ruang yang efektif.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				RTRW/RDTR secara berkala berdasarkan riset tentang perubahan tutupan lahan, pertumbuhan kota, dan kebutuhan ruang sektor prioritas.	pajak, retribusi, <i>zoning bonus</i>) yang lebih efektif.	kumuh, dan rawan bencana.	unitas dan pelaku usaha yang menjadi teladan dalam kepatuhan dan kreativitas pemanfaatan ruang.	penegakan perda.	
Misi 4: Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatkan penguasaan IPTEK	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	- Menyusun <i>science, technology, and innovation (STI) roadmap</i> daerah yang memetakan kebutuhan dan peluang pemanfaatan IPTEK di sektor unggulan seperti pariwisata, ekonomi kreatif, maritim, dan layanan publik - Mengembangkan pusat inovasi dan IPTEK	- Memperkuat kapasitas BRIDA, perguruan tinggi, dan OPD terkait dalam manajemen inovasi, <i>technology transfer</i>, dan komersialisasi hasil riset melalui pelatihan, pendampingan, dan program magang - Mengembangkan unit layanan inovasi yang membantu peneliti dan pelaku usaha	- Membangun kemitraan riset IPTEK dengan universitas, lembaga riset nasional, BUMN/ BUMD, dan sektor swasta untuk <i>joint research</i>, pengembangan teknologi tepat guna, dan proyek percontohan pemanfaatan teknologi di sektor strategis - Menggandeng komunitas teknologi	- Menumbuhkan budaya sains dan inovasi di kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, dan masyarakat melalui festival inovasi, lomba riset, olimpiade sains, <i>hackathon</i>, dan <i>innovation award</i> - Mendorong pemanfaatan IPTEK dalam proses kreatif, produksi, dan pemasaran produk lokal - Mengampanyek	- Mengintegrasikan agenda penguatan IPTEK ke dalam RPJMD, renstra OPD, dan rencana sektoral, termasuk target jumlah riset, paten, publikasi, dan produk inovasi daerah - Mengembangkan <i>dashboard</i> inovasi yang memantau portofolio riset, jumlah HKI, <i>startup</i> bin, dan kolaborasi inovasi lintas	- Menyelaraskan pengembangan IPTEK dengan agenda transformasi digital, ekonomi berbasis pengetahuan, dan ekonomi hijau - Mendorong riset dan pengembangan dalam bidang teknologi baru seperti AI, IoT, <i>big data</i>, energi terbarukan, dan AR/VR untuk pariwisata dan edukasi - Membangun jejaring dengan <i>science</i>

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				daerah (<i>science & innovation hub</i>) yang dilengkapi laboratorium, <i>maker space</i> , studio kreatif, dan ruang <i>co creation</i> - Menetapkan kebijakan dan regulasi yang memberikan insentif bagi riset, adopsi teknologi baru, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat daerah.	memproses paten, merek dagang, dan lisensi - Menyediakan skema pendanaan riset dan inovasi IPTEK (hibah daerah, <i>matching fund</i> dengan industri, dan fasilitas inkubasi bisnis teknologi).	dan <i>startup</i> lokal dalam pengembangan aplikasi, sensor, dan solusi digital yang menjawab permasalahan kota - Mendorong keterlibatan diaspora dan pakar eksternal melalui program kunjungan dan kolaborasi.	an narasi kota inovatif yang menjadikan IPTEK sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan daerah.	aktor - Memastikan hasil riset IPTEK ditindaklanjuti menjadi program, proyek, atau layanan baru yang nyata di lapangan.	<i>parks, innovation hubs</i> , dan jaringan inovasi nasional/internasional untuk berbagi pengetahuan, akses pasar, dan pendanaan
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kuantitas inovasi seluruh bidang pembangunan		- Menyusun kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) berbasis bukti yang menjelaskan peran BRIDA, OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan	- Memperkuat kelembagaan BRIDA sebagai <i>knowledge & innovation hub</i> yang mengorkestrasi agenda riset dan inovasi lintas sektor - Meningkatkan kapasitas ASN	- Membangun kemitraan <i>quadruple helix</i> yang mendorong kolaborasi inovasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan	- Menumbuhkan budaya inovasi di birokrasi dan masyarakat melalui <i>innovation challenge</i> , sayembara solusi, dan forum berbagi praktik baik - Mewajibkan pemanfaatan	- Mengintegrasikan proses inovasi ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dengan menyediakan ruang eksplisit untuk <i>pilot project</i> , evaluasi dan <i>scale</i>	- Menyelaraskan ekosistem inovasi daerah dengan indeks dan kebijakan inovasi nasional serta agenda global mengenai inovasi untuk pembangunan berkelanjutan - Mendorong riset

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				komunitas dalam siklus inovasi - Mengembangkan regulasi <i>innovation sandbox</i> untuk uji coba kebijakan dan teknologi baru di wilayah terbatas sebelum diperluas - Menetapkan instrumen insentif dan penghargaan bagi inovasi sektor publik dan swasta yang terbukti memberikan dampak signifikan terhadap layanan publik dan pembangunan.	dan pelaku usaha melalui pelatihan desain inovasi, manajemen perubahan, dan pengukuran dampak inovasi - Menyediakan skema pembiayaan inovasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata kelola, sosial) yang kompetitif, transparan, dan berorientasi hasil.	komunitas - Mengembangkan <i>joint innovation program</i> dengan BUMN/ BUMD, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk tema-tema prioritas (<i>green city, inclusive city</i>) - Membentuk klaster inovasi tematik seperti <i>smart mobility cluster, green infrastructure cluster, dan inclusive service cluster</i> .	data dan riset dalam perancangan inovasi pelayanan publik dan sosial - Memberikan penghargaan institusional kepada OPD, sekolah, puskesmas, UMKM, dan komunitas yang secara konsisten menghasilkan dan mereplikasi inovasi berdampak.	<i>up</i> inovasi - Mengembangkan <i>dashboard</i> inovasi daerah yang menampilkan portofolio inovasi, status pengembangan, dan indikator dampak - Memastikan sinergi antara inovasi di sektor berbeda sehingga tidak berjalan terpisah dan memanfaatkan platform data dan teknologi yang sama.	tentang tata kelola inovasi, mekanisme pembiayaan inovasi, dan dampak sosial inovasi - Menjalin jejaring dengan kota-kota inovatif di tingkat nasional dan internasional untuk saling belajar, mengadopsi, dan menyesuaikan praktik baik inovasi.
	Tujuan 4.2: Meningkatkan daya saing	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya jumlah dan		- Menyusun <i>tourism research roadmap</i> yang	- Memperkuat kapasitas Dinas Pariwisata,	- Membangun kemitraan dengan	- Menumbuhkan budaya inovasi di sektor	- Mengintegrasikan hasil riset pariwisata ke	- Menyelaraskan pengembangan pariwisata daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
	pariwisata	kualitas kunjungan wisatawan		memetakan profil dan preferensi wisatawan, daya tarik utama kota, serta hambatan pengembangan destinasi - Mengembangkan kebijakan pengelolaan destinasi wisata berbasis konsep <i>carrying capacity</i> , kualitas pengalaman pengunjung, dan keberlanjutan lingkungan sosial - Meningkatkan infrastruktur pariwisata seperti aksesibilitas, fasilitas umum, dan informasi wisata berbasis teknologi digital.	pengelola destinasi, dan pelaku usaha pariwisata dalam riset pasar, pengembangan produk wisata, manajemen mutu layanan, dan <i>experience design</i> - Mengembangkan sistem data pariwisata yang memantau jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pengeluaran wisatawan secara rutin - Menyediakan pendanaan riset dan pengembangan paket wisata tematik, <i>event</i> unggulan, dan produk wisata berbasis budaya lokal.	perguruan tinggi, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, dan platform digital (OTA, travel platform) untuk riset promosi, <i>branding</i> destinasi, dan pengembangan paket wisata yang kompetitif - Menggandeng maskapai, operator tur, dan pelaku transportasi untuk kampanye promosi bersama dan <i>travel corridor</i> - Melibatkan komunitas lokal dalam <i>co creation</i> pengalangan wisata dan	pariwisata melalui lomba desain paket wisata, pengembangan narasi (<i>storytelling</i>) kota, dan penghargaan bagi desa/kelurahan wisata inovatif - Mendorong pelaku wisata memanfaatkan data ulasan wisatawan dan riset pasar untuk meningkatkan layanan - Meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku usaha pariwisata untuk memaksimalkan pemasaran dan interaksi dengan pengunjung.	dalam rencana pengembangan destinasi, penataan kawasan wisata, dan program infrastruktur pendukung (akses jalan, transportasi, sanitasi, keamanan) - Mengembangkan <i>dashboard</i> pariwisata yang menampilkan indikator kinerja (kunjungan, tingkat hunian, lama tinggal, belanja per wisatawan, kepuasan) - Menyinergikan program lintas OPD (pariwisata, budaya, UMKM, infrastruktur) untuk mendukung destinasi prioritas.	dengan standar dan agenda global seperti <i>sustainable tourism, community based tourism</i> , dan <i>halal tourism</i> yang relevan - Mendorong riset tentang pariwisata rendah karbon, wisata edukatif, dan pariwisata inklusif untuk kelompok rentan - Membangun jejaring dengan jaringan kota/destinasi wisata nasional dan internasional untuk promosi terpadu, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan paket wisata lintas destinasi.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
						pengelolaan homestay, kuliner, dan atraksi budaya.			
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian budaya		- Menyusun kebijakan pelestarian budaya berbasis riset inventarisasi warisan budaya <i>tangible</i> (bangunan, situs, lanskap) dan <i>intangible</i> (tradisi, bahasa, ritual, kesenian) - Mengembangkan peta sebaran objek dan kawasan budaya yang menjadi dasar penetapan zona perlindungan dan pemanfaatan - Memperkuat infrastruktur budaya seperti museum, pusat dokumentasi,	- Memperkuat kapasitas OPD kebudayaan, sanggar seni, komunitas budaya, dan sekolah dalam dokumentasi, pengarsipan, dan pengembangan materi edukasi budaya melalui pelatihan dan bantuan teknis - Menyediakan pendanaan riset dan inovasi pelestarian (digitalisasi arsip, pengembangan museum digital, modul muatan lokal di sekolah) - Mengembangkan pusat informasi budaya daerah yang	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas budaya, dan lembaga internasional (misalnya UNESCO-related networks) untuk riset, revitalisasi tradisi, dan pengembangan produk budaya baru - Mendorong kolaborasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengemas budaya menjadi	- Menumbuhkan budaya riset dan inovasi dalam pelestarian budaya melalui festival riset budaya, lomba dokumentasi tradisi, dan program residensi seniman/peneliti - Mendorong generasi muda terlibat aktif dalam kegiatan kreatif berbasis budaya (komik, film pendek, konten digital) - Mengapresiasi inovasi yang menghidupkan kembali tradisi yang mulai punah atau kurang dikenal.	- Mengintegrasikan hasil riset budaya ke dalam RTRW, RDTR, RPJMD sektor budaya dan pariwisata, serta rencana pengembangan kawasan bersejarah - Mengembangkan <i>dashboard</i> data budaya yang memuat komunitas, event, situs, dan program pelestarian - Memastikan pelestarian budaya menjadi pertimbangan dalam pembangunan fisik, penataan ruang, dan pengembangan	- Menyelaraskan kebijakan pelestarian budaya dengan konvensi dan panduan global seperti Konvensi Warisan Dunia dan Konvensi Warisan Budaya Tak Benda - Mendorong riset tentang pengelolaan warisan budaya di tengah urbanisasi dan pariwisata massal - Membangun jejaring dengan kota kreatif/budaya dunia untuk pertukaran praktik baik pengelolaan dan pelestarian budaya yang berkelanjutan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				dan ruang pertunjukan yang mendukung pelestarian dan edukasi budaya.	menghubungkan data, program, dan pelaku budaya.	produk dan atraksi bernilai tambah tanpa menghilangkan otentisitas - Melibatkan komunitas adat dalam perencanaan pelestarian dan pemanfaatan ruang budaya.		pariwisata sehingga tidak merusak nilai budaya.	
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif		- Menyusun <i>creative economy roadmap</i> yang memetakan subsektor ekonomi kreatif unggulan (kuliner, fesyen, musik, film, desain, game, dll.), rantai nilai, dan kebutuhan dukungan kebijakan - Mengembangkan regulasi yang memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam perizinan,	- Memperkuat kapasitas OPD ekonomi/UMKM, pelaku usaha kreatif, dan komunitas dalam desain produk, manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan HKI melalui pelatihan dan pendampingan - Menyediakan skema pendanaan inovasi produk, sertifikasi, dan	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi seni/desain, platform digital, marketplace, dan asosiasi kreatif untuk riset tren pasar, preferensi konsumen, dan pengembangan produk baru; mendorong pengembangan kluster ekonomi kreatif di kawasan	- Menumbuhkan budaya kreatif dan inovatif melalui festival ekonomi kreatif, <i>creative market</i>, kompetisi desain/produk, dan program kurasi produk unggulan daerah - Mendorong pemanfaatan riset pasar dalam pengembangan <i>branding, storytelling</i>, dan pengemasan produk	- Mengintegrasikan data dan hasil riset ekonomi kreatif ke dalam strategi pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah - Mengembangkan <i>dashboard</i> ekonomi kreatif yang memantau jumlah pelaku, jenis usaha, omset, penyerapan tenaga kerja, dan jangkauan pasar - Menynergikan program lintas OPD (UMKM,	- Menyelaraskan pengembangan ekonomi kreatif dengan jaringan kota kreatif nasional dan global, tren industri kreatif dunia, dan agenda ekonomi digital - Mendorong riset tentang <i>creative city</i>, ruang kreatif inklusif, dan dampak sosial-ekonomi industri kreatif - Membangun jejaring dengan platform global dan festival

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				pemanfaatan ruang kreatif, dan perlindungan HKI - Membangun infrastruktur pendukung seperti <i>creative hub</i> , studio, galeri, dan ruang pameran yang terjangkau.	pengembangan merek lokal - Mengembangkan pusat layanan satu pintu untuk pendampingan usaha ekonomi kreatif dari aspek hukum, keuangan, dan pemasaran.	tertentu (<i>creative district</i>) yang mengelompokkan pelaku dan fasilitas pendukung - Menjalin kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk skema pembiayaan yang sesuai karakter usaha kreatif.	- Memberikan pengakuan dan promosi khusus kepada pelaku kreatif yang berhasil menembus pasar nasional dan internasional.	pariwisata, pendidikan, pemuda) untuk mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.	internasional untuk membuka akses promosi dan pasar bagi produk kreatif lokal.
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas pemerintahan daerah	6. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital 7. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan	- Menyusun <i>governance research roadmap</i> yang memetakan persoalan akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas birokrasi di seluruh OPD - Mengembangkan kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis data	- Memperkuat kapasitas Bappeda, Inspektorat, BRIDA, dan OPD pengampu reformasi birokrasi dalam analisis kebijakan publik, manajemen kinerja, dan tata kelola risiko melalui pelatihan,	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pengawas eksternal, lembaga antikorupsi, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan kajian integritas, survei kepuasan	- Menumbuhkan budaya integritas dan inovasi di birokrasi melalui kampanye nilai (anti-korupsi, pelayanan prima, profesionalisme), <i>integrity award</i> dan <i>innovation award</i> untuk unit kerja yang	- Mengintegrasikan hasil riset tata kelola, temuan audit, dan survei publik ke dalam desain reformasi birokrasi, perbaikan SOP, dan penyusunan standar pelayanan - Mengembangkan <i>dashboard</i> kinerja pemerintahan yang memuat indikator	- Menyelaraskan reformasi tata kelola daerah dengan standar nasional (SPIP, SAKIP, RB) dan inisiatif global seperti <i>open government</i> , <i>smart governance</i> , dan berbagai indeks tata kelola - Mendorong riset tentang pemerintahan terbuka, partisipasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
			masyarakat dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	melalui penerapan sistem <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> , <i>e-procurement</i> , <i>e-monev</i> , dan pengaduan publik terpadu - Menyiapkan regulasi yang memperkuat meritokrasi, keterbukaan informasi publik, pengelolaan risiko, dan perlindungan pelapor pelanggaran (<i>whistleblower</i>)	pendampingan, dan <i>coaching</i> - Mengembangkan unit analisis kebijakan yang mampu mengolah data kinerja dan pengaduan menjadi rekomendasi perbaikan - Menyediakan pendanaan riset tata kelola untuk uji coba model baru pengawasan, pelayanan publik, dan manajemen SDM aparatur.	publik, serta evaluasi program prioritas - Menggandeng sektor swasta dan komunitas teknologi untuk pengembangan solusi <i>govtech</i> yang meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan - Menjalin kerja sama dengan pemerintah kota lain sebagai <i>learning network</i> reformasi birokrasi.	berprestasi - Mendorong pemanfaatan data dan hasil kajian dalam setiap rapat pimpinan dan pengambilan keputusan strategis - Mengembangkan forum rutin refleksi kinerja dan pembelajaran kebijakan lintas OPD untuk mempercepat proses belajar dari kesalahan dan praktik baik.	akuntabilitas, kecepatan layanan, kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut pengaduan - Memastikan sistem informasi yang dikembangkan tiap OPD saling terhubung dalam kerangka <i>one data – one policy</i> daerah.	digital, dan tata kelola kolaboratif dengan multi pihak - Membangun jejaring dengan inisiatif global transparansi dan antikorupsi untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik baik di tingkat internasional.
	Tujuan 5.2: Meningkatkan kualitas keamanan, ketertarikan, dan ketertiban umum	Sasaran 5.2.1: Meningkatkan kualitas keamanan masyarakat		- Menyusun kebijakan keamanan dan ketertiban umum berbasis analisis data kriminalitas, gangguan ketertiban, dan	- Memperkuat kapasitas Satpol PP, aparat kelurahan, dan OPD terkait dalam manajemen keamanan lingkungan,	- Membangun kemitraan dengan Kepolisian, perguruan tinggi, lembaga riset sosial, dan komunitas keamanan	- Menumbuhkan budaya kewaspadaan dan kepedulian sosial melalui kampanye keamanan lingkungan, pendidikan	- Mengintegrasikan data keamanan dan hasil riset sosial ke dalam perencanaan wilayah, penataan ruang, dan program sosial	- Menyelaraskan strategi keamanan lokal dengan konsep <i>safer city</i> dan praktik baik nasional/global tentang keamanan kota

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kerawanan sosial di tingkat kecamatan/kelurahan - Mengembangkan sistem informasi keamanan wilayah berupa peta rawan kejahatan, konflik, dan bencana yang terhubung dengan <i>command center</i> - Menetapkan regulasi yang mendorong kolaborasi polisi–pemerintah–masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan.	mediasi konflik, dan manajemen kerumunan melalui pelatihan berbasis skenario (<i>table-top exercise</i> dan simulasi lapangan) - Mengembangkan infrastruktur pendukung seperti CCTV cerdas, sistem pelaporan darurat, dan pusat komando yang dianalisis rutin - Menyediakan pendanaan untuk kajian sosial terkait faktor penyebab kriminalitas dan konflik lokal.	lingkungan untuk riset pola kejahatan, penyalahgunaan ruang, dan gangguan ketertiban - Mendorong program <i>community policing</i> dan <i>neighborhood watch</i> berbasis riset sosial yang mengedepankan pencegahan - Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda dalam desain dan pelaksanaan program keamanan kawasan.	warga, dan simulasi kebencanaan serta evakuasi yang memanfaatkan data risiko - Mendorong penyusunan rencana tindakan keamanan di tingkat RT/RW/kelurahan berbasis peta kerawanan - Mengapresiasi inisiatif warga, komunitas, dan kelurahan yang berhasil menurunkan tingkat gangguan ketertiban melalui inovasi lokal.	(pemberdayaan, pemuda, penanganan kemiskinan) - Mengembangkan <i>dashboard</i> keamanan yang menampilkan tren kejadian, titik rawan, dan respon penanganan - Memastikan koordinasi lintas OPD dan aparat keamanan dalam menindaklanjuti rekomendasi kajian dan laporan masyarakat.	- Mendorong riset tentang keamanan berbasis desain lingkungan (<i>crime prevention through environmental design</i> – CPTED), keamanan digital, dan peran media sosial dalam keamanan - Menjalin jejaring dengan kota lain yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan keamanan inklusif dan humanis.
		Sasaran 5.2.2: Meningkatnya kualitas toleransi dalam bermasyarakat		- Menyusun kebijakan penguatan toleransi dan kerukunan	- Memperkuat kapasitas OPD terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga	- Menumbuhkan budaya dialog, saling menghormati, dan empati	- Mengintegrasikan indikator toleransi dan kerukunan dalam	- Menyelaraskan upaya penguatan toleransi dengan agenda nasional dan global tentang

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				sosial berbasis riset mengenai dinamika hubungan antar kelompok, persepsi intoleransi, dan potensi konflik di berbagai wilayah kota - Mengembangkan panduan pemanfaatan ruang publik, fasilitas sosial, dan media komunikasi yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman agama, etnis, dan budaya - Menyiapkan regulasi yang melindungi hak kelompok minoritas dan mencegah ujaran kebencian serta diskriminasi.	(FKUB), lembaga adat, dan tokoh masyarakat dalam mediasi konflik, dialog lintas iman, dan pendidikan toleransi melalui pelatihan dan fasilitasi - Menyediakan pendanaan riset dan program inovatif penguatan toleransi seperti sekolah damai, kampung moderasi beragama, dan forum anak muda lintas komunitas - Mengembangkan modul pelatihan nilai toleransi untuk ASN dan perangkat daerah.	riset sosial, organisasi keagamaan, dan LSM perdamaian untuk melaksanakan riset dan program kolaboratif penguatan toleransi - Melibatkan komunitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan dalam <i>peace building</i> dan dialog antar komunitas - Mendorong aksi kolektif lintas komunitas pada momen-momen strategis (hari besar keagamaan, peringatan nasional) sebagai ajang	melalui festival lintas budaya/agama, forum warga, kelas kebhinnekaan, dan kampanye narasi positif di media massa dan media sosial - Mendorong praktik pelaporan dan penyelesaian insiden intoleransi yang berbasis bukti dan transparan - Mengapresiasi inisiatif komunitas yang berhasil membangun ruang aman dan toleran di lingkungan masing-masing.	perencanaan pembangunan sosial, pendidikan, dan pemuda - Mengembangkan <i>dashboard</i> sosial yang memantau insiden intoleransi, kasus diskriminasi, dan capaian program kerukunan - Memastikan program pendidikan, kepemudaan, dan kesejahteraan sosial memasukkan dimensi toleransi dan kerukunan sebagai <i>outcome</i> kunci.	hak asasi manusia, inklusi sosial, dan pencegahan ekstremisme kekerasan - Mendorong riset mengenai <i>social cohesion</i>, pencegahan radikalisasi, dan ujaran kebencian daring - Membangun jejaring dengan kota dan komunitas di dalam dan luar negeri yang menjadi rujukan praktik baik dalam pengelolaan keberagaman.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
						pertemuan positif.			
Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga	Tujuan 6.1: Meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Sasaran 6.1.1: Menurunnya ketimpangan gender	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	- Menyusun <i>gender equality research roadmap</i> yang memetakan kesenjangan gender dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kepemimpinan, dan keamanan - Mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender di seluruh OPD melalui peraturan dan pedoman <i>gender mainstreaming</i> dan <i>gender responsive budgeting</i> (GRB) - Menyiapkan instrumen regulasi dan indikator untuk	- Memperkuat kapasitas OPD, BRIDA, dan lembaga layanan dalam analisis gender, penyusunan GRB, dan pemantauan program responsif gender melalui pelatihan dan pendampingan - Mengembangkan sistem data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan sebagai basis perencanaan - Menyediakan pendanaan riset untuk kajian ketimpangan gender, beban kerja domestik, partisipasi ekonomi, dan partisipasi politik perempuan.	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM gender, organisasi perempuan, dan dunia usaha untuk merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, kepemimpinan, dan pendidikan - Mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha untuk penerapan praktik kerja ramah keluarga, kebijakan anti-	- Menumbuhkan budaya kesetaraan dan anti diskriminasi melalui kampanye publik, pendidikan di sekolah dan komunitas, dan program <i>role model</i> perempuan inspiratif - Mendorong media lokal untuk menyebarkan narasi positif tentang peran perempuan di berbagai bidang - Mengapresiasi institusi dan komunitas yang secara konsisten menunjukkan praktik ramah gender dan berhasil mengurangi kesenjangan.	- Mengintegrasikan hasil riset gender ke dalam RPJMD, renstra OPD, dan program lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola - Mengembangkan indikator kinerja kesetaraan gender yang diadopsi lintas OPD - Membangun <i>dashboard</i> kesetaraan gender yang memantau capaian dan disparitas di tingkat kecamatan/kelurahan.	- Menyelaraskan upaya pengurangan ketimpangan gender dengan konvensi CEDAW, kebijakan nasional gender, dan SDGs - Mendorong riset tentang <i>care economy</i>, kekerasan berbasis gender, dan perempuan dalam kepemimpinan publik maupun privat - Menjalin jejaring dengan kota/daerah dan lembaga yang menjadi rujukan kebijakan responsif gender untuk pertukaran pengalaman.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				memantau kemajuan kesetaraan gender di berbagai sektor.		diskriminasi, dan kesempatan karier yang setara - Melibatkan tokoh agama dan adat dalam kampanye kesetaraan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.			
		Sasaran 6.1.2: Meningkatkan kualitas perlindungan anak		- Menyusun kebijakan perlindungan anak berbasis riset mengenai prevalensi kekerasan, eksploitasi, pernikahan anak, dan kerentanan lainnya di berbagai lingkungan (rumah, sekolah, tempat kerja, ruang publik)	- Memperkuat kapasitas OPD sosial, pendidikan, kesehatan, lembaga layanan, dan aparat penegak hukum dalam deteksi dini, penanganan kasus, konseling, dan pendampingan anak korban kekerasan - Mengembangkan sistem data kasus perlindungan	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga layanan, organisasi keagamaan, dan komunitas untuk riset dan program pencegahan kekerasan anak, termasuk edukasi <i>parenting</i> dan pengasuhan positif	- Menumbuhkan budaya perlindungan anak melalui kampanye publik, pendidikan orang tua, dan kegiatan komunitas yang menolak kekerasan dan eksploitasi - Mendorong partisipasi anak dalam forum anak dan proses perencanaan	- Mengintegrasikan hasil riset perlindungan anak ke dalam kebijakan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum - Mengembangkan indikator Kota Layak Anak dan memantau pencapaiannya di berbagai klaster - Membangun <i>dashboard</i> perlindungan anak yang	- Menyelaraskan upaya perlindungan anak dengan Konvensi Hak Anak dan kebijakan nasional terkait - Mendorong riset tentang dampak jangka panjang kekerasan dan eksploitasi, pernikahan usia anak, dan risiko eksploitasi digital - Menjalin jejaring dengan lembaga nasional/internasio

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				- Mengembangkan regulasi dan standar sekolah/lingkungan ramah anak yang mengatur keamanan fisik, psikologis, dan digital - Memperkuat infrastruktur layanan perlindungan seperti pusat layanan terpadu, rumah aman, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses.	- anak yang terintegrasi antar lembaga - Menyediakan pendanaan riset untuk mengevaluasi efektivitas program perlindungan anak dan rehabilitasi.	- Melibatkan sekolah dan komite sekolah dalam penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan - Menjalin kerja sama dengan platform digital untuk edukasi literasi digital dan penyediaan kanal pelaporan aman.	- yang menyangkut kepentingan mereka - Mengapresiasi wilayah, sekolah, dan organisasi yang berhasil membangun lingkungan aman dan ramah anak.	- memuat data kasus, layanan, dan capaian program.	- nal yang fokus pada hak anak untuk pertukaran pengetahuan dan dukungan teknis.
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga		- Menyusun <i>youth and sport development roadmap</i> berbasis riset tentang profil, aspirasi, dan tantangan pemuda di Kota Makassar, termasuk akses terhadap pendidikan, lapangan kerja,	- Memperkuat kapasitas OPD pemuda dan olahraga, organisasi pemuda, dan klub olahraga dalam manajemen organisasi, pengembangan bakat, desain program	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan komunitas untuk program pengembangan kepemimpinan pemuda, <i>youth entrepreneurship</i>, serta	- Menumbuhkan budaya aktif, sehat, dan produktif di kalangan pemuda melalui kampanye gaya hidup sehat, festival kreatif, liga olahraga lokal, dan program komunitas	- Mengintegrasikan hasil riset pemuda dan olahraga ke dalam kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi kreatif, dan kesehatan - Mengembangkan indikator kinerja pengembangan pemuda dan	- Menyelaraskan pembangunan pemuda dan olahraga dengan agenda nasional/global tentang pemuda, sport for development, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan - Mendorong riset

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				dan ruang ekspresi - Mengembangkan kebijakan pemanfaatan ruang publik, sarana olahraga, dan pusat kreatif untuk aktivitas pemuda - Menyiapkan regulasi dukungan bagi organisasi pemuda dan klub olahraga yang berorientasi pengembangan karakter, prestasi, dan kewirausahaan.	kegiatan, dan penggalangan sumber daya - Mengembangkan database pemuda dan atlet potensial, termasuk peta komunitas kreatif dan komunitas olahraga - Menyediakan pendanaan riset dan program inovatif pengembangan kepemimpinan pemuda dan olahraga berbasis komunitas.	penyelenggara event kreatif dan olahraga - Mendorong program magang, <i>coach clinic</i> , dan <i>talent scouting</i> yang menghubungkan pemuda dengan dunia kerja dan industri olahraga - Menggandeng sponsor dan CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan pemuda dan fasilitas olahraga.	- Mendorong pemuda berperan sebagai agen perubahan dalam inovasi sosial, kewirausahaan, dan lingkungan - Mengapresiasi tokoh dan penggerak pemuda inspiratif yang memberikan dampak positif di wilayahnya.	olahraga di tingkat daerah - Membangun <i>dashboard</i> kepemudaan dan olahraga yang memantau kegiatan, fasilitas, dan capaian pemuda.	tentang peran pemuda dalam inovasi, iklim, dan perdamaian - Menjalin jejaring dengan organisasi pemuda dan olahraga internasional untuk pertukaran pengalaman dan peluang partisipasi.
	Tujuan 6.2: Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	Sasaran 6.2.1: Menurunnya disparitas pendapatan		- Menyusun kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis riset mengenai	- Memperkuat kapasitas OPD sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan perencanaan dalam analisis kerentanan dan desain program	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga keuangan, dan dunia usaha	- Menumbuhkan budaya solidaritas dan inklusi sosial melalui kampanye pengurangan stigma terhadap	- Mengintegrasikan hasil riset disparitas pendapatan ke dalam strategi pengurangan kemiskinan, pengembangan	- Menyelaraskan sistem perlindungan sosial daerah dengan agenda global seperti SDGs mengenai kemiskinan,

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan pendapatan antar wilayah dan kelompok sosial - Mengembangkan regulasi penargetan penerima manfaat program yang adil dan transparan dengan memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial - Merancang kerangka integrasi antara program bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi sehingga saling melengkapi.	perlindungan sosial adaptif - Mengembangkan sistem data terpadu kesejahteraan sosial yang terkini dan terverifikasi - Menyediakan pelatihan bagi pendamping sosial dan aparat lokal untuk pelaksanaan program berbasis data dan pemantauan dampak.	untuk evaluasi efektivitas program bantuan dan pengembangan model pemberdayaan ekonomi keluarga - Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam program <i>inclusive business</i> yang menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin dan rentan - Bekerja sama dengan komunitas untuk identifikasi penerima manfaat dan pendampingan usaha.	kemiskinan dan penerima bantuan - Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sosial - Mengapresiasi inisiatif warga, komunitas, dan pelaku usaha yang berkontribusi nyata dalam mengurangi disparitas pendapatan.	ekonomi lokal, dan kebijakan ketenagakerjaan - Mengembangkan indikator disparitas di tingkat kecamatan/kelurahan - Membangun <i>dashboard</i> perlindungan sosial dan pemberdayaan yang memantau intervensi, cakupan, dan dampak terhadap pendapatan rumah tangga.	ketimpangan, dan pekerjaan layak serta kebijakan nasional perlindungan sosial adaptif - Mendorong riset tentang mekanisme <i>adaptive social protection</i> terhadap bencana dan krisis ekonomi - Menjalin jejaring dengan lembaga nasional dan internasional untuk inovasi skema perlindungan sosial yang efektif.
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya perlindungan		- Menyusun kebijakan inklusi	- Memperkuat kapasitas OPD dan lembaga	- Membangun kemitraan dengan	- Menumbuhkan budaya inklusi dan anti	- Mengintegrasikan hasil riset disabilitas ke	- Menyelaraskan kebijakan disabilitas dengan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
		bagi penyandang disabilitas		disabilitas berbasis riset mengenai hambatan akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, pekerjaan, pendidikan, dan ruang publik - Mengembangkan regulasi kota ramah disabilitas (<i>disability-friendly city</i>) yang mencakup standar aksesibilitas fisik, informasi, dan komunikasi - Menyiapkan standar layanan dasar yang inklusif di seluruh sektor (pendidikan,	layanan dalam memberikan pelayanan ramah disabilitas melalui pelatihan bahasa isyarat, komunikasi inklusif, dan penerapan desain universal - Mengembangkan sistem pendataan penyandang disabilitas yang akurat, dinamis, dan terpilah menurut jenis disabilitas - Menyediakan pendanaan riset untuk pengembangan layanan, kurikulum, dan infrastruktur yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas.	organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha untuk merancang dan menjalankan program peningkatan akses kerja, pendidikan, dan layanan publik - Mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan dan evaluasi layanan - Bekerja sama dengan penyedia teknologi bantu untuk pengembangan dan penyebarluasan alat bantu yang terjangkau.	diskriminasi melalui kampanye publik, pendidikan di sekolah dan komunitas, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam pesan-pesan inklusif - Mendorong penggunaan narasi positif tentang penyandang disabilitas sebagai warga yang setara, bukan objek belas kasihan - Mengapresiasi institusi dan pelaku usaha yang menyediakan lingkungan kerja dan layanan yang inklusif.	dalam RPJMD, renstra OPD, dan standar pelayanan minimal, sehingga kebijakan dan program di berbagai sektor mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas - Mengembangkan indikator kota inklusif disabilitas - Membangun <i>dashboard</i> inklusi yang memantau akses layanan, partisipasi, dan perlindungan hak penyandang disabilitas.	Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan kebijakan nasional terkait - Mendorong riset tentang teknologi bantu, desain universal, dan model inklusi sosial-ekonomi yang berhasil - Menjalin jejaring dengan kota dan lembaga yang maju dalam isu inklusi disabilitas untuk pertukaran praktik baik.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kesehatan, transportasi, administrasi).					
Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi bencana	Tujuan 7.1: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9. Pelestraian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	- Menyusun <i>environmental and climate research roadmap</i> yang memetakan sumber pencemaran, kawasan kritis, dan prioritas intervensi lingkungan di wilayah perkotaan dan pesisir - Mengembangkan regulasi pengelolaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung, termasuk penataan kawasan lindung, sempadan sungai, dan pesisir - Menyiapkan	- Memperkuat kapasitas OPD lingkungan, kebersihan, dan tata ruang dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemodelan hidrometeorologi, dan perencanaan ketahanan iklim melalui pelatihan dan kerja sama teknis - Mengembangkan laboratorium lingkungan dan sistem data kualitas air, udara, dan tanah yang terintegrasi - Menyediakan pendanaan riset untuk solusi pengelolaan sampah, pengurangan pencemaran, dan	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, BRIN, komunitas lingkungan, dan sektor swasta untuk riset dan <i>pilot project</i> solusi berbasis alam (<i>nature-based solutions</i>), konservasi ekosistem, dan ekonomi sirkular - Menggandeng sektor swasta untuk program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengembangan energi terbarukan - Melibatkan masyarakat	- Menumbuhkan budaya peduli lingkungan melalui kampanye publik, gerakan warga (bank sampah, urban farming, penghijauan), dan pendidikan lingkungan di sekolah - Mendorong inovasi komunitas dalam pengelolaan sampah, konservasi, dan penghematan energi air - Mengapresiasi kelurahan, sekolah, dan komunitas yang berhasil meningkatkan kualitas lingkungan	- Mengintegrasikan hasil riset lingkungan dan iklim ke dalam RTRW/RDTR, rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, rencana pengelolaan sampah, dan program sektor lain (infrastruktur, kesehatan, sosial) - Mengembangkan <i>dashboard</i> lingkungan yang memantau kualitas lingkungan dan capaian program - Menyinergikan program lintas OPD dan level pemerintahan untuk mendukung peningkatan	- Menyelaraskan pengelolaan lingkungan dengan agenda global seperti Paris Agreement dan SDGs - Mendorong riset tentang kota rendah emisi, adaptasi iklim, dan ekonomi hijau - Menjalin jejaring dengan kota dan lembaga internasional untuk kolaborasi, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				kebijakan pengurangan emisi, pengelolaan sampah terpadu, dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah.	pemulihan ekosistem.	dalam pemantauan lingkungan partisipatif.	secara nyata.	kualitas lingkungan hidup.	
	Tujuan 7.2: Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya kapasitas penanganan bencana dan adaptasi perubahan iklim		- Menyusun <i>disaster risk and climate adaptation research roadmap</i> yang memetakan ancaman bencana (banjir, rob, longsor, kebakaran, gempa, cuaca ekstrem), kerentanan, dan kapasitas di tingkat kota hingga kelurahan - Mengembangkan regulasi penanggulangan bencana dan adaptasi	- Memperkuat kapasitas BPBD, OPD teknis, dan pemerintah kecamatan/kelurahan dalam analisis risiko, perencanaan kontinjensi, manajemen kedaruratan, dan pemulihan pascabencana melalui pelatihan dan simulasi - Mengembangkan pusat data bencana yang terkini dan sistem peringatan dini multi-bahaya yang terhubung	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas siaga bencana, lembaga internasional, dan dunia usaha untuk riset risiko bencana, latihan terpadu, dan <i>pilot project</i> adaptasi iklim di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan permukiman padat	- Menumbuhkan budaya siaga dan tangguh bencana melalui edukasi publik, latihan evakuasi berkala di lingkungan sekolah, fasilitas publik, dan permukiman - Mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum formal dan nonformal - Mendorong pembentukan dan penguatan forum/keompok siaga bencana	- Mengintegrasikan hasil riset risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam RTRW/RDTR, RPJMD, rencana pembangunan sektoral, serta rencana kontinjensi dan rencana operasi kedaruratan - Mengembangkan <i>dashboard</i> risiko dan kejadian bencana yang memandu prioritas investasi dan program penanggulangan	- Menyelaraskan penanggulangan bencana dan adaptasi iklim daerah dengan kerangka global seperti <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction</i> dan Paris Agreement, serta kebijakan nasional kebencanaan dan iklim - Mendorong riset tentang <i>climate-resilient city</i>, sistem peringatan dini berbasis teknologi dan komunitas, serta skema pembiayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah					
				Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global
				perubahan iklim berbasis risiko yang terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan sektor lain - Menyiapkan kebijakan pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur berketahanan bencana dan iklim.	dengan kanal komunikasi publik - Menyediakan pendanaan riset untuk pemodelan skenario bencana dan opsi adaptasi struktural maupun non-struktural.	- Mendorong dunia usaha menyusun <i>business continuity plan</i> dan berkontribusi dalam kesiapsiagaan serta penanganan darurat - Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam edukasi dan advokasi kebencanaan.	di tingkat komunitas yang memanfaatkan informasi risiko dan skenario yang dihasilkan riset.	- Memastikan koordinasi lintas OPD dan level pemerintahan dalam implementasi rekomendasi dan pemantauan kapasitas resiliensi.	risiko bencana - Menjalin jejaring dengan kota dan lembaga internasional untuk <i>knowledge sharing</i> , dukungan teknis, dan akses pendanaan adaptasi.

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR

A. Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan penting dalam perumusan strategi pembangunan yang menekankan penggunaan data empiris, hasil penelitian, serta informasi yang tervalidasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kebijakan publik dengan mengurangi ketergantungan pada asumsi yang tidak teruji serta memperkuat dasar rasional dalam setiap langkah perencanaan.

Sasaran strategis pada dasarnya merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan arah pembangunan yang lebih luas. Perumusan sasaran strategis harus mempertimbangkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif, termasuk evaluasi kondisi aktual, identifikasi permasalahan utama, serta potensi sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, fokus kebijakan berfungsi sebagai penjabaran operasional dari sasaran strategis yang memuat pilihan program, kegiatan, atau intervensi yang dianggap paling relevan dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pemilihan fokus kebijakan harus dilakukan secara sistematis melalui penelaahan bukti empiris, praktik terbaik, serta pembelajaran kebijakan dari konteks serupa yang telah berhasil diterapkan.

Melalui pengintegrasian bukti dalam setiap tahapan perumusan sasaran strategis dan fokus kebijakan, pemerintah atau organisasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berdampak signifikan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata yang dapat diukur secara objektif.

Tabel 6. 1 Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
		Misi 1: Meningkatkan	Tujuan 1.1: Terwujudnya		Pertumbuhan ekonomi (%)					
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah	daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja	Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah	Rasio PDRB industri pengolahan (%) Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	Meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas SDM yang adaptif. Pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kawasan industri terintegrasi, mendorong adopsi teknologi dan inovasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan deregulasi dan kepastian hukum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	○ Pemberdayaan UMKM produktif melalui akses permodalan, inkubasi bisnis, dan pendampingan digital. ○ Pengembangan usaha mikro–kecil sebagai bagian dari rantai nilai industri pengolahan, sehingga tidak hanya sektor besar yang menikmati nilai tambah. ○ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan buruh berupah minimum	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi	○ Peningkatan realisasi pembangunan industri ○ Peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor ○ Peningkatan penggunaan pemasaran produk dalam negeri ○ Peningkatan daya saing UMKM
	Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi						Dinas Perdagangan	○ Mendorong modernisasi proses produksi melalui adopsi teknologi industri 4.0 agar produktivitas perusahaan meningkat dan mampu mendorong peningkatan upah. ○ Pengembangan sentra IKM/UMKM berbasis kawasan industri terpadu untuk memperluas kesempatan kerja bernilai tambah.		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai							○ Penguatan rantai pasok (<i>supply chain</i>) industri pengolahan, terutama makanan-minuman yang menjadi basis ekonomi Kota Makassar. ○ Deregulasi perizinan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas. ○ Revitalisasi sektor perdagangan melalui digitalisasi UMKM dan pengembangan pasar modern-tradisional yang produktif.		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Perumusan kebijakan penanggulangan ketimpangan pendapatan berbasis data sektoral PDRB, struktur tenaga kerja, dan standar upah sektoral. ○ Integrasi program lintas-OPD menuju pencapaian sasaran PDRB sektor unggulan (industri pengolahan dan perdagangan). ○ Monitoring kontribusi sektor unggulan melalui indikator Rasio PDRB industri pengolahan dan perdagangan. ○ Evaluasi kebijakan pro-investasi dan pro-pekerja, termasuk menilai pertumbuhan ekonomi inklusif.		
							Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas (jalan industri, akses pelabuhan,		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								kawasan pergudangan) untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi sektor industri dan perdagangan		
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- o Promosi investasi pada sektor unggulan (industri pengolahan makanan-minuman, perdagangan logistik) yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja terampil - o Simplifikasi perizinan dan pemberian insentif bagi perusahaan yang menyediakan pelatihan dan standar upah layak - o Kemitraan investasi dengan UMKM dan IKM agar pertumbuhan ekonomi lebih merata		
							Dinas Tenaga Kerja	- o Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pekerja berbasis kebutuhan industri pengolahan dan perdagangan untuk meningkatkan peluang pekerja naik kelas dari buruh kasar ke tenaga terampil. - o Penguatan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan terhadap upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial ketenagakerja - o Fasilitasi skema upskilling-reskilling untuk sektor makanan-minuman, tekstil, dan ritel agar produktivitas meningkat seiring peningkatan upah. - o Kemitraan pelatihan berbasis		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								industri melalui <i>link and match</i> dengan kawasan industri dan pelaku usaha besar		
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	Meskipun sudah terjadi trend penurunan untuk tiga tahun terakhir ini, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19% dan tingkat nasional sebesar 4,91% akibat seluruh upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti kembali beoperasinya sektor ekonomi, pertumbuhan signifikan pada UMKM serta peningkatan investasi di sektor properti dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan			Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsif. Melalui revitalisasi vokasi berorientasi kompetensi dan sertifikasi.	Dinas Tenaga Kerja	- o Revitalisasi sistem vokasi berbasis <i>competency-based training</i> dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan daya serap industri. - o Job matching, perluasan <i>job fair</i> digital, dan pemetaan lowongan berbasis data sektor unggulan. - o Pengembangan layanan <i>Makassar Labor Market Information System</i> (MLMIS) untuk prediksi kebutuhan tenaga kerja	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	- o Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja - o Peningkatan layanan kesempatan tenaga kerja bagi pencari kerja - o Peningkatan kapasitas UMKM yang mandiri - o Peningkatan produksi perikanan tangkap - o Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - o Peningkatan daya saing kepemudaan
					PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	Penyelarasan kurikulum dengan industri, serta pemberdayaan ekonomi wilayah melalui pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal dan pemberian modal UMKM secara bertahap	Dinas Perdagangan	- o Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) padat karya dengan teknologi tepat guna. - o Fasilitasi ekspansi pasar bagi UMKM agar meningkat serapan tenaga kerjanya. - o Penguatan rantai pasok dalam industri makanan–minuman dan perdagangan besar/eceran.		
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- o Pengembangan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal (kuliner lokal, kerajinan, jasa kreatif). - o Penyaluran modal UMKM bertahap dan pendampingan manajemen usaha. - o Digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan produktivitas.		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	o Promosi investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, kuliner, dan hospitality. o Insentif bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal tersertifikasi. o Penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum untuk meningkatkan iklim usaha o Pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan, logistik) untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. o Meningkatkan efisiensi transportasi umum untuk memudahkan akses pencari kerja ke pusat-pusat ekonomi. o Integrasi kebijakan pengurangan pengangguran melalui <i>policy alignment</i> antar-OPD berbasis target TPT dan PDRB per kapita. o Monitoring capaian sasaran (TPT, PDRB per kapita) dan mengevaluasi efektivitas program vokasi serta UMKM		
			Tujuan 1.2: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Indeks daya saing daerah Rasio pajak terhadap PDRB (%)	Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan	Badan Pendapatan Daerah	o Mengembangkan ekosistem pajak daerah berbasis digital yang memudahkan wajib pajak dan meningkatkan akurasi pendataan. o Mengoptimalkan pajak sektor perdagangan, properti, dan konstruksi sebagai kontributor		o Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
						membangun sistem pengelolaan PAD yang inovatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah		utama PDRB namun tetap menjaga iklim usaha. ○ Mendorong model insentif pajak untuk UMKM produktif dan padat karya guna meningkatkan pemerataan pendapatan		
							Dinas Tenaga Kerja	○ Mengembangkan <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berbasis kebutuhan industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan untuk menggeser pekerja dari posisi buruh berupah rendah ke pekerjaan berkeahlian. ○ Memperluas kemitraan penempatan kerja dengan sektor swasta, terutama industri makanan-minuman, tekstil, dan manufaktur ringan. ○ Mendorong penguatan <i>job matching system</i> berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja dan menekan pengangguran		
							Dinas Perdagangan	○ Fasilitasi <i>value added upgrading</i> pada industri pengolahan (makanan-minuman, tekstil, kerajinan) melalui pelatihan teknologi produksi, sertifikasi mutu, dan akses pembiayaan. ○ Memperluas pusat distribusi dan pasar modern/UMKM untuk mendorong pemerataan pendapatan antar pelaku usaha.		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								Menyusun insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Menyusun peta jalan peningkatan daya saing ekonomi lokal yang pemerataan pendapatan dan pengurangan pengangguran. - Mengintegrasikan reformasi pengelolaan PAD melalui pertumbuhan sektor dominan. - Memperkuat sistem monitoring Indeks Daya Saing Daerah dan rasio pajak terhadap PDRB melalui data sektoral yang akurat		
							Dinas Sosial	- Menyusun program pemberdayaan keluarga rentan akibat ketimpangan pendapatan. - Memperkuat basis data terpadu agar intervensi sosial tepat sasaran.		
							Bagian Perekonomian	- Mengharmonisasi kebijakan ekonomi daerah melalui investasi sektor perdagangan, industri, dan properti. - Memastikan strategi peningkatan PAD melalui penciptaan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal		
Masih terdapat tingkat kerentanan yang	Ketergantungan pasokan energi listrik			Sasaran 1.2.2: Terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan	Tingkat inflasi (%)	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui penerapan	Dinas Perdagangan	Mengoptimalkan Sistem Informasi Harga Pangan untuk memantau fluktuasi harga dan mengintervensi komoditas yang bergejolak.		Peningkatan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan
	Rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan				Indeks ketahanan pangan					

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
signifikan dalam sektor energi, air, dan pangan	Layanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang belum merata Keterbatasan produksi pangan lokal sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah					teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan kepada petani	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Pertanian Perusda PDAM	○ Memperluas kemitraan distribusi antara pasar tradisional, distributor, dan produsen lokal guna menekan biaya rantai pasok. ○ Mendorong operasi pasar murah berbasis data kerentanan harga. ○ Meningkatkan ketersediaan pangan lokal melalui fasilitasi akses benih unggul dan teknologi pascapanen. ○ Mengembangkan cadangan pangan kota serta jejaring lumbung pangan di tingkat kelurahan. ○ Meningkatkan indeks ketahanan pangan melalui koordinasi lintas sektor dan edukasi konsumsi pangan bergizi dan beragam ○ Menerapkan teknologi pertanian modern (precision farming, hidroponik, irigasi tetes). ○ Menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan kepada petani/keompok tani urban. ○ Memperluas kawasan pertanian perkotaan (urban farming) dan budidaya perikanan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar ○ Modernisasi sistem jaringan distribusi dan layanan pelanggan berbasis data. ○ Peningkatan kualitas air melalui perbaikan sistem		pokok dan barang penting ○ Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang ○ Meningkatnya ketersediaans arana pertanian (<i>Urban Farming</i>) ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas pengane karagaman pangan di masyarakat ○ Peningkatan produksi perikanan budidaya ○ Peningkatan jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kota

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
Belum optimalnya kinerja investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Ketidakpastian pertumbuhan, minimnya stabilitas kebijakan, dan keterbatasan dukungan infrastruktur sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kontribusi Kota Makassar terhadap total investasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan			Sasaran 1.2.3: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Mewujudkan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi. Bersinergi dengan sektor swasta dan institusi syariah untuk menarik investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Digitalisasi penuh layanan perizinan dan konsultasi investasi melalui <i>online single submission</i> daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian proses. ○ Penguatan sistem <i>tracking</i> perizinan dan <i>feedback</i> investor untuk menekan biaya transaksi dan mencegah ketidakpastian kebijakan. ○ Pengembangan <i>Investment Promotion Center</i> dan data	○ Peningkatan realisasi investasi ○ Peningkatan kualitas pelayanan perizinan ○ Peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
						melalui skema KPBU dan KSPI		intelligence investasi untuk menarik PMA–PMDN pada sektor padat karya dan berwawasan lingkungan		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyusun rencana pengembangan kawasan investasi prioritas berbasis RPJMD dan Rencana Detail Tata Ruang. Integrasi perencanaan investasi dengan skema KPBU dan KSPI serta proyeksi pertumbuhan ekonomi kota. Penyusunan Makassar Investment Roadmap untuk menjamin stabilitas arah pembangunan dan kepastian bagi investor		
							Dinas PU	Penyediaan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, dan transportasi publik pada kawasan prioritas investasi. Pengembangan smart infrastructure untuk kawasan bisnis dan industri berbasis green investment. Penyusunan infrastructure readiness index untuk memastikan kesiapan kawasan industri dan komersial		
							Dinas Perdagangan	Penguatan sentra IKM dan kawasan industri kreatif untuk menarik PMDN dan investasi padat karya. Dukungan sertifikasi, standarisasi produk, serta market linkage untuk meningkatkan kepastian pasar		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								o Kolaborasi dengan institusi keuangan syariah untuk mendorong investasi UKM dan industri hijau		
		Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 2.1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
Belum optimalnya kualitas pendidikan	Masih rendahnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar minimum kemampuan literasi (21,71% Tahun 2023)	manusia yang berkualitas dan berdaya saing	manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Indeks pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik	Dinas Pendidikan	o Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi <i>min mum literacy standards</i> melalui penguatan kurikulum literasi, penyediaan modul ajar, dan penilaian literasi berkala	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	o Peningkatan kualitas pendidikan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
	Masih lemahnya kualitas guru pada beberapa satuan pendidikan							o Penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan (<i>upskilling-reskilling</i>), supervisi akademik, serta pemanfaatan platform belajar digital.		
	Harapan lama sekolah yang hanya menempatkan Kota Makassar pada peringkat 15 dari 514 Kab/Kota di Indonesia (Tahun 2023)							o Perluasan akses pendidikan melalui optimalisasi BOS daerah, afirmasi untuk siswa rentan, dan pemerataan sarana prasarana pendidikan		
	Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (21,91% Tahun 2023)						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	o Pemenuhan standar pelayanan dasar (SPD) terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas literasi digital.		
	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibandingkan daerah lain (73,78% atau kategori memenuhi standar Tahun 2023)							o Pelatihan fungsional dan teknis untuk peningkatan kualitas pedagogik, literasi digital, serta asesmen. o Penataan formasi ASN guru berbasis kebutuhan satuan pendidikan (<i>right sizing</i>). o Sistem evaluasi kinerja guru berbasis <i>merit system</i> dan		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Menurunnya angka penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja menurut pendidikan perguruan tinggi							portofolio pembelajaran		
							Dinas Perpustakaan	○ Pengembangan perpustakaan kelurahan, pojok baca digital, dan mobil perpustakaan keliling untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat. ○ Optimalisasi program literasi masyarakat melalui kampanye membaca, lomba literasi, dan klub literasi keluarga. ○ Integrasi layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah untuk memperluas akses sumber belajar.		
							Dinas Sosial	○ Program bantuan pendidikan dan pencegahan <i>learning dropout</i> bagi keluarga tidak mampu		
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	○ Perlindungan anak dan sistem <i>early warning</i> terhadap potensi putus sekolah		
Belum optimalnya kualitas kesehatan	Belum maksimalnya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) pada ksala Provinsi SulSel			Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Mengoptimalkan pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan	Dinas Kesehatan	○ Memperkuat layanan kesehatan ibu-anak (ANC/PNC) dan deteksi risiko 4T ○ Percepatan eliminasi TB		○ Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan akibat terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun), terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4), atau terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun) meningkatnya penemuan kasus Tuberkulosis (TB)					pelayanan dasar kesehatan pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif. Percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif. Perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit	melalui intensifikasi penemuan kasus, DOT digital, dan pelacakan kontak o Mengoptimalkan promotif-preventif (Germas, imunisasi lengkap) o Penguatan surveilans penyakit berbasis wilayah dan fasilitas kesehatan			
							Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	o Penguatan edukasi Keluarga Berencana pada kelompok rentan (remaja, pasangan usia subur) o Peningkatan cakupan kontrasepsi modern untuk pencegahan 4T o Kolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan kader untuk konseling KB		
							Dinas Pendidikan	o Penguatan UKS dan screening kesehatan siswa. o Penguatan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini		
							Dinas Sosial	o Integrasi layanan jaminan kesehatan bagi keluarga rentan o Intervensi gizi untuk keluarga berisiko stunting dan ibu hamil kurang gizi.		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	o Sinkronisasi perencanaan berbasis data UHH, AKI, dan TB o Penguatan monitoring-evaluasi berbasis indikator IPM dan UHH.		
							Dinas Lingkungan Hidup	o Peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								kesehatan dasar bagi masyarakat miskin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ○ Sinkronisasi seluruh program peningkatan SDM dan pengurangan kemiskinan ○ Penguatan monitoring capaian IPM dan pengeluaran per kapita ○ Perumusan arah kebijakan berbasis bukti Dinas Tenaga kerja ○ Mendorong peningkatan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri ○ Penguatan sistem pelatihan vokasi dan sertifikasi ○ Fasilitasi penempatan kerja yang layak untuk mengurangi pekerja berupah rendah		
Rendahnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan	Pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur sehingga mengakibatkan banjir dan genangan Pembangunan rumah swadaya yang tidak terkendali sehingga rumah tidak layak huni masih mencapai 8.140 rumah tangga	Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan	Tujuan 3.1: Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata		Indeks layanan infrastruktur					○ Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan perkotaan ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas PSU permukiman
				Sasaran 3.1.1: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana	Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan	Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan secara merata, inklusif	Dinas Pekerjaan Umum	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung ○ Optimalisasi sistem drainase kota melalui rehabilitasi jaringan primer-sekunder, pemetaan titik rawan genangan berbasis GIS, serta integrasi dengan sistem	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung	○ Peningkatan jumlah rumah layak huni pada kawasan kumuh ○ Peningkatan perlindungan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Kondisi akses air minum tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan. Dari total 238.610 Sambungan Rumah (SR) perpipaan, hanya 64,58% atau 84.757 unit yang memenuhi aspek kualitas air minum Masih ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang belum mendapatkan layanan air perpipaan Tantangan di bidang sanitasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat serta kemampuan ekonomi untuk mengikuti penyedotan lumpur tinja secara berkala maksimal 3 tahun sekali dan kurangnya pemeliharaan ipal Kawasan maupun Ipal Komunal Hanya 68,3% dari 161 Ipal yang berfungsi sehingga akses sanitasi aman hanya 8,45%)			terintegrasi		dan terintegrasi melalui kolaborasi. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan skema pembiayaan inovatif		pompa dan kanal ○ Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas kawasan perkotaan ○ Pengembangan model prediksi banjir berbasis data ○ Pengembangan skema pembiayaan kreatif (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis	pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	masyarakat banjir dan genangan ○ Peningkatan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem drainase perkotaan ○ Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah
					Indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup	○ Program rehabilitasi RTLH berbasis data terpadu dan skema kolaborasi CSR, Baznas, dan masyarakat. ○ Penguatan regulasi dan pengawasan pembangunan rumah swadaya untuk mencegah permukiman kumuh baru. ○ Pengembangan kawasan permukiman layak huni melalui pendekatan penataan kawasan (slum upgrading) ○ Integrasi perencanaan permukiman dengan rencana tata ruang dan mitigasi risiko bencana ○ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye sanitasi aman berbasis komunitas. ○ Revitalisasi IPAL kawasan dan IPAL komunal dengan kerjasama pemerintah-masyarakat-swasta. ○ Penyempurnaan armada dan sistem penyedotan lumpur tinja terjadwal (<i>scheduled</i>)		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								- desludging) berbasis aplikasi. ○ Penguatan regulasi dan insentif agar rumah tangga melakukan penyedotan berkala maksimal 3 tahun		
							Dinas Tata Ruang	○ Penegakan aturan tata ruang untuk mencegah pembangunan yang memperburuk drainase atau menciptakan permukiman kumuh. ○ Integrasi RDTR dengan sistem infrastruktur air, sanitasi, dan drainase. ○ Pemanfaatan teknologi (drone mapping, GIS) untuk pengawasan kawasan berkembang		
							Dinas Komunikasi dan Informasi	○ Pengembangan sistem pemantauan infrastruktur berbasis IoT (banjir, kualitas air, pemakaian IPAL) ○ Optimalisasi aplikasi layanan aduan masyarakat terintegrasi dengan OPD teknis. ○ Penguatan literasi digital masyarakat terkait penggunaan layanan infrastruktur		
							Perusda PDAM	○ Perluasan sambungan rumah ke wilayah belum terlayani terutama Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan teknologi distribusi alternatif (desalinasi, sistem air baku komunal, mobile water treatment). ○ Peningkatan kualitas air melalui modernisasi instalasi pengolahan, pengurangan		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								kebocoran (NRW), dan sertifikasi kualitas air. ○ Pengembangan model pembiayaan inovatif untuk perluasan jaringan perpipaan (blending finance) ○ Integrasi sistem monitoring kualitas air secara <i>real-time</i>		
				Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penetapan, integritas dan implementasi RDT	Dinas Tata Ruang	○ Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir melalui zonasi ketat berbasis RDTR ○ Penyelarasan jaringan perpipaan dengan rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR		○ Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
							Dinas Pekerjaan Umum	○ Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase makro–mikro berbasis peta kerentanan banjir ○ Penguatan jaringan distribusi dan pengurangan kehilangan air (Non-Revenue Water)		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	○ Sinkronisasi proyeksi pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan infrastruktur dalam penyusunan RDTR dan rencana investasi infrastruktur ○ Penyusunan peta prioritas layanan air minum berbasis proyeksi kebutuhan ○ Penyusunan rencana induk sanitasi (SPSD) yang selaras dengan RDTR		
							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	○ Penyusunan dan penegakan standar hunian layak berbasis RDTR		
							Perusda PDAM	○ Peningkatan kualitas air baku dan kapasitas instalasi		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
		Misi 4: Pengembangan	Tujuan 4.1: Meningkatnya		Indeks inovasi daerah					
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik di Kota Makassar yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024)	pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata	kualitas inovasi daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya penguasaan IPTEK	Indeks kapabilitas inovasi	Peningkatan daya saing daerah melalui penguasaan IPTEK yang mendorong produktivitas daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah	○ Riset penguatan kapabilitas Inovasi dan asesmen tingkat kematangan digital OPD ○ Inkubasi inovasi digital dan evaluasi berbasis evidence		○ Peningkatan hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah
	Layanan publik digital masih diperhadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	○ Integrasi perizinan dengan platform digital kota ○ Penyederhanaan dan otomasi proses perizinan berbasis risk-based approach.		
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	○ Penerapan layanan adminduk <i>end-to-end</i> berbasis NIK dan SSO. ○ Integrasi data kependudukan sebagai <i>reference data</i> layanan digital kota.		
							Inspektorat	○ Audit kepatuhan SPBE dan pengendalian internal keamanan informasi ○ Monitoring capaian digitalisasi layanan secara triwulanan.		
							Dinas Komunikasi dan Informasi	○ Membangun <i>Digital Service Platform</i> berbasis arsitektur SPBE terpadu ○ Implementasi interoperabilitas melalui <i>Application Programming Interface (API) Gateway</i> . ○ Penguatan <i>data</i>		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
				Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kuantitas inovasi seluruh bidang pembangunan	Persentase peningkatan inovasi pembangunan daerah (%)	Penguatan kreativitas dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan daya saing melalui pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung riset dan penerapan inovasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	- o Riset penguatan kapabilitas Inovasi dan asesmen tingkat kematangan digital OPD - o Inkubasi inovasi digital dan evaluasi berbasis evidence	5. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	o Peningkatan hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah
							Dinas Kounikasi dan Informasi	- o Pengembangan sistem digital, integrasi layanan - o Penguatan keamanan data - o Standardisasi arsitektur SPBE		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- o Sinkronisasi kebijakan inovasi daerah - o Fasilitasi ekosistem inovasi lintas sektor - o Perencanaan strategi digitalisasi layanan		
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	o Implementasi digitalisasi pelayanan perizinan sebagai <i>quick win</i> inovasi layanan publik		
							Inspektorat	o Pengawasan implementasi SPBE, audit inovasi, dan pemenuhan standar kualitas layanan digital		
			Tujuan 4.2: Meningkatnya daya saing pariwisata		Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB (%)					
				Sasaran 4.2.1: Meningkatnya jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	Meningkatkan PDRB sektor makan-minum melalui fasilitasi daya tarik dan peningkatan kunjungan	Dinas Pariwisata	- o Digitalisasi seluruh layanan perizinan dan informasi wisata melalui <i>tourism digital platform</i> terpadu. - o Penerapan <i>visitor data analytics</i> untuk memantau pola kunjungan, preferensi		o Meningkatkan kuantitas daya tarik pariwisata

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
						wisatawan domestik dan mancanegara		wisatawan, dan durasi tinggal. o Integrasi data destinasi, event, kuliner, hotel, dan transportasi pada satu sistem interoperabel dengan OPD lain		
					Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu o Optimalisasi <i>Online Single Submission</i> (OSS) daerah untuk perizinan pariwisata secara <i>end-to-end</i> berbasis digital. o Penyederhanaan layanan perizinan hotel, restoran, café, dan event pariwisata secara terpadu. o Penyediaan <i>real-time investment tracking</i> untuk meningkatkan minat investor sektor makan-minum			
							Dinas Kebudayaan	o Digitalisasi kalender event budaya, tiket pertunjukan, dan sistem reservasi. o Penyediaan platform digital untuk promosi seni budaya lokal sebagai bagian dari rencana perjalanan wisata o Integrasi konten budaya dalam aplikasi pariwisata untuk meningkatkan pengalaman wisata yang inklusif		
							Dinas Koperasi dan UKM	o Pemetaan dan digitalisasi sentra kuliner, UMKM, dan produk kreatif dalam satu platform. o Pelatihan UMKM kuliner dalam pemasaran digital dan <i>cashless system</i> o Akselerasi sertifikasi produk kuliner melalui layanan digital terintegrasi		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
							Inspektorat	- o Audit kinerja digitalisasi layanan pariwisata secara berkala - o Penguatan tata kelola data dan keamanan informasi antar-OPD - o Fungsi pengendalian untuk memastikan layanan publik digital mencapai >70% integrasi		
				Sasaran 4.2.2: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian budaya	Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam warisan budaya tak benda (%)	Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	Dinas Kebudayaan	- o Digitalisasi basis data WBTB dan cagar budaya untuk meningkatkan persentase karya budaya yang terdaftar dan terlindungi. - o Integrasi sistem budaya dengan platform kota agar dapat diakses publik. - o Penyediaan layanan aduan, perizinan pemanfaatan cagar budaya, dan kurasi budaya secara online - o Monitoring capaian melalui indikator tujuan dan sasaran.		- o Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan - o Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
					Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)		Dinas Pariwisata	- o Digitalisasi promosi pariwisata melalui platform terpadu yang menampilkan informasi destinasi, event budaya, akomodasi, dan UMKM kuliner. - o Integrasi layanan pariwisata dengan super apps kota dan sistem informasi budaya - o Optimalisasi data pariwisata untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB		
							Dinas Penanaman Modal dan	o Penyediaan layanan cepat untuk perizinan usaha		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
Masih rendahnya koperasi yang memenuhi kriteria aktif	Lemahnya manajemen koperasi, seperti kurangnya partisipasi anggota atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi			Sasaran 4.2.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif	Jumlah industri ekonomi kreatif yang aktif	Penguatan pusat inovasi menjadi katalisator yang kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata didorong oleh kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal yang inovatif	Dinas Koperasi dan UKM	- akomodasi, kuliner, dan event budaya. ○Simplifikasi proses perizinan melalui automation dan tracking real-time ○Fasilitasi UMKM pariwisata untuk onboarding digital (marketplace, e-payment, QRIS) ○Integrasi produk UMKM budaya dan kuliner ke platform pariwisata digital ○Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan digital pemerintah		○Meningkatkan kualitas ekosistem kreatif
					Persentase industri ekonomi kreatif yang memanfaatkan platform digital (%)		Dinas Pariwisata	○Pembentukan kemitraan antara koperasi dan pelaku industri akomodasi, makan-minum, serta seni budaya ○Mendorong koperasi sebagai aggregator produk kreatif untuk meningkatkan rantai nilai pariwisata ○Menyediakan ruang display produk kreatif koperasi di pusat wisata		
							Dinas Perdagangan	○Fasilitasi koperasi dalam		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								memanfaatkan platform digital marketing o Penguatan akses koperasi ke rantai pasok pariwisata dan industri kreatif. o Dukungan standardisasi dan sertifikasi produk koperasi		
							Dinas Kebudayaan	o Mendorong koperasi berbasis seni budaya sebagai penggerak ekonomi kreatif o Integrasi program pembinaan seniman/ komunitas budaya melalui kelembagaan koperasi o Kurasi produk lokal untuk meningkatkan daya saing pariwisata		
							Dinas Perindustrian dan Perdagangan	o Penyediaan teknologi tepat guna dan inkubasi industri kreatif melalui koperasi o Mendukung diversifikasi produk koperasi sesuai tren ekonomi kreatif o Fasilitasi sertifikasi industri kreatif untuk koperasi anggota		
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan integratif	Menurunnya Indeks survei penilaian integritas Kota Makassar dari tahun sebelumnya menjadi 62,33 (Tahun 2024) sehingga Pemerintah Kota Makassar secara umum memiliki keberadaan korupsi dan risiko korupsi yang tinggi	Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan keterlibatan umum	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (%)	Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	o Membangun sistem perencanaan berbasis kinerja dan evidence-based o Menyelaraskan transformasi digital dalam dokumen perencanaan dan penganggaran o Memperkuat integrasi data lintas OPD sebagai dasar pengambilan keputusan	6. Transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	o Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah o Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah o Peningkatan tata

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang belum berjalan optimal (Nilai IRB 76,78 atau kategori baik pada Tahun 2024) karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berAKHLAK belum optimal, dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan Penurunan Indeks Maturitas SPIP (Hanya 3,100 pada Tahun 2024) karena pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, manajemen risiko pemerintah Kota Makassar juga belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan Penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar selama				Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK		Inspektorat Dinas Komunikasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Seluruh Perangkat Daerah	o Penguatan SPIP, manajemen risiko o Peningkatan pengawasan o Peningkatan nilai MCP KPK. o Percepatan layanan digital o Integrasi data o Interoperabilitas sistem o Peningkatan nilai SPBE o Reformasi birokrasi o Pembangunan budaya kerja berAKHLAK, pengembangan kompetensi ASN digital o Penguatan manajemen keuangan daerah berbasis akuntabilitas dan transparansi o Peningkatan akuntabilitas kinerja o Evaluasi SAKIP, dan penyederhanaan proses bisnis o Implementasi manajemen risiko o Integrasi layanan digital o Peningkatan kualitas layanan publik		kelola keuangan daerah o Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian o Meningkatkan integrasi aplikasi pemerintah daerah (<i>Super Apps</i>)

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	kurun waktu 3 tahun terakhir (3,21 pada Tahun 2024) Keterlambatan adopsi teknologi digital dalam sistem pemerintahan dan kurangnya integrasi data serta sistem antar-perangkat daerah (hanya 21 dari 43 atau sekitar 49% layanan publik daring pada Tahun 2024)									
			Tujuan 5.2: Meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum		Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					
Sistem hukum dan keamanan ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat	Masih tingginya jumlah tindak kriminalitas (4.195) kasus pada Tahun 2023 dan angka kriminalitas sebesar 287 tindakan kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar) karena arus urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda Masih rendahnya keterwakilan perempuan terpilih			Sasaran 5.2.1: Meningkatkan kualitas keamanan masyarakat	Persentase tindak kriminal yang ditangani (%)	Memperkuat stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran serta masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	- o Pelatihan ASN Satpol PP dan kecamatan dalam digital response system dan etika pelayanan keamanan - o Penerapan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Satpol PP berbasis digital	7. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	- o Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat - o Meningkatkan kualitas sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW
							Dinas Komunikasi dan Informasi	o Integrasi CCTV, sensor lingkungan, dan <i>command center</i> keamanan Kota Makassa		
							Bagian Tata Pemerintahan	- o Transparansi penanganan pelanggaran ketertiban umum berbasis publikasi data <i>real-time</i> - o Penguatan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan online yang terintegrasi		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	terhadap anggota DPRD Kota Makassar (Hanya 26% yang seharusnya 30% menurut aturan secara nasional) yang diakibatkan faktor struktural, kultural, dan institusional							- Penyederhanaan SOP penanganan gangguan ketertiban umum agar lebih cepat dan adaptif - Implementasi manajemen risiko Kamtibmas berbasis kelurahan (mapping wilayah rawan) - Standardisasi prosedur penanganan kriminalitas ringan, gangguan ketertiban, dan aduan warga		
	Masih rendahnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD (Tahun 2022 tidak ada satu pun Perda inisiatif DPRD, sementara Tahun 2023 hanya 5 dari 10 Perda Inisiatif yang diundangkan)						Kecamatan dan/atau Kelurahan	- Penguatan FKPM, ronda lingkungan, dan laporan cepat gangguan Kamtibmas - Penguatan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan online yang terintegrasi		
Masih rendahnya implementasi beragama maslahat dan kurang berkembangnya kebudayaan maju	Masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Makassar (4,363 pada Tahun 2024 dan masuk kategori 10 kota dengan toleransi terendah)			Sasaran 5.2.2: Meningkatnya kualitas toleransi dalam bermasyarakat	Indeks kota toleran	Memperkuat kehidupan beragama yang maslahat, mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Kebudayaan Dinas Komunikasi dan Informasi	- Penguatan FKUB dan forum dialog lintas agama-budaya di seluruh kecamatan - Penguatan ekosistem kebudayaan inklusif (event budaya, ruang publik kreatif, festival toleransi) - Pembinaan komunitas budaya untuk mendorong kreativitas lintas suku-agama - Digitalisasi arsip budaya dan narasi toleransi berbasis nilai kearifan lokal		- Penurunan jumlah konflik sosial - Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
	Kurangnya alokasi anggaran dalam mendukung beragama maslahat									

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif						Satuan Polisi Pmong Praja	o Peningkatan kapasitas aparat Satpol PP untuk penanganan konflik keagamaan berbasis HAM		
Masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda	Masih tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (2.030 kasus perceraian dan 504 kasus kekerasan pada Tahun 2023)	Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga	Tujuan 6.1: Meningkatkan kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Sasaran 6.1.1: Menurunnya ketimpangan gender	Indeks pembangunan keluarga	Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	o Meningkatkan kapasitas implementasi <i>gender mainstreaming</i> di semua OPD melalui PPRG, SGA, dan analisis gender o Memperluas layanan UPTD PPA berbasis <i>one stop service</i> dengan psikolog, konselor, dan <i>legal aid</i> o Mendorong pemenuhan kluster perlindungan anak melalui kolaborasi lintas sektor	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	o Peningkatan kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan o Peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional (Hak sipil dan kebebasan dengan nilai 47,32 dan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 39,64)						Dinas Sosial	o Penguatan <i>case management</i> bagi korban kekerasan, anak berhadap hukum, dan keluarga miskin o Penyediaan <i>family development session</i> untuk keluarga berisiko tinggi perceraian o Penguatan jejaring LKS/ NGO dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan		
	Indeks Ketimpangan Gender (IGD) berada di bawah angka nasional dan provinsi (0,188). Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja						Dinas Kesehatan	o Optimalisasi <i>women-friendly health services</i> dan <i>one stop crisis center</i> di puskesmas. o Penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja untuk menurunkan risiko perkawinan anak dan		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	(TPAK) perempuan masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%							kerentanan. o Integrasi layanan kesehatan mental bagi keluarga berisiko o Peningkatan partisipasi pemuda dalam pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan olahraga. o Pengembangan <i>youth center</i> inklusif yang mendukung keterampilan sosial dan ekonomi pemuda o Program pencegahan kenakalan remaja dan radikalisme berbasis komunitas		
							Dinas Pemuda dan Olahraga	o Peningkatan partisipasi pemuda dalam pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan olahraga. o Pengembangan <i>youth center</i> inklusif yang mendukung keterampilan sosial dan ekonomi pemuda o Program pencegahan kenakalan remaja dan radikalisme berbasis komunitas		
							Dinas Tenaga Kerja	o Perluasan pelatihan vokasi perempuan di sektor unggulan kota o Peningkatan keterlibatan perempuan dalam program wirausaha dan penempatan kerja o Penguatan kebijakan tempat kerja ramah perempuan (fasilitas laktasi, jam kerja fleksibel)		
				Sasaran 6.1.2: Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Indeks perlindungan anak	Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, Berkelanjutan, dan berbasis hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	o Penguatan UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu (psikologis, hukum, medis, reintegrasi sosial) o Membangun <i>child protection system</i> di tingkat kelurahan (pelaporan, rujukan, manajemen kasus) o Penguatan Program Pengasuhan Positif serta <i>Family Learning Center</i>		o Peningkatan pemenuhan hak anak secara kompherensif o Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak
							Dinas Pendidikan	o Implementasi Sekolah Ramah Anak pada seluruh satuan pendidikan.		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								○ Penguatan kurikulum karakter, kesadaran hukum, serta pendidikan kesetaraan gender ○ Optimalisasi <i>one stop crisis center</i> dan layanan ramah anak di puskesmas ○ Penguatan layanan Rumah Aman Anak dan jejaring LKS/NGO berbasis komunitas. ○ Pelaksanaan program ketahanan keluarga untuk mencegah kekerasan berulang ○ Program pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kegiatan kreatif yang mencegah perilaku berisiko. ○ Kolaborasi pencegahan kekerasan dan perundungan berbasis komunitas pemuda ○ Pelatihan vokasi perempuan untuk meningkatkan TPAK dan menekan ketergantungan ekonomi yang berdampak pada kerentanan anak. ○ Pengawasan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi pekerja anak		
				Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Indeks pembangunan pemuda Indeks pembangunan keolahragaan	Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	○ Penguatan <i>youth development programs</i> (leadership, kewirausahaan, literasi digital) ○ Penyediaan <i>youth center</i> di kecamatan sebagai ruang aman kreatif dan inovatif. ○ Peningkatan pembinaan olahraga melalui klub, sekolah olahraga, dan kompetisi berjenjang.		○ Peningkatan daya saing kepemudaan ○ Peningkatan pemberdayaan dan prestasi olahraga

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								○ Penguatan pelatihan pelatih/tenaga kepelatihan bersertifikat		
							Dinas Pendidikan	○ Penguatan ekstrakurikuler olahraga, seni, dan budaya sebagai bagian pembinaan pemuda. ○ Implementasi sekolah ramah anak dan anti kekerasan sebagai fondasi pembangunan generasi unggul		
							Dinas Tenaga Kerja	○ Pelatihan vokasi pemuda berbasis kebutuhan industri kreatif dan teknologi ○ Penumbuhan wirausaha muda dan pelatihan <i>start up</i> untuk menekan angka kemiskinan ○ Fasilitasi sertifikasi kompetensi pemuda guna meningkatkan partisipasi kerja		
							Dinas Sosial	○ <i>Family development session</i> bagi keluarga berisiko perceraian untuk menekan dampak pada pemuda. ○ Rehabilitasi sosial bagi pemuda rentan (disabilitas, korban kekerasan, anak jalanan). ○ Pemberdayaan ekonomi keluarga guna memutus rantai kemiskinan pemuda		
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	○ Penguatan pola pengasuhan positif serta edukasi keluarga. ○ Mendorong perbaikan IGD melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
			Tujuan 6.2: Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran		Tingkat kemiskinan (%)			ekonomi dan politik		
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah			Sasaran 6.2.1: Menurunnya disparitas pendapatan	Gini rasio	Memperluas peluang ekonomi yang lebih merata. Peningkatan SDM dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas Sosial	- o Penguatan bantuan sosial adaptif bagi keluarga berpendapatan rendah untuk menurunkan gini ratio - o Integrasi data kemiskinan (DTKS) agar intervensi tepat sasaran - o Perluasan program pemberdayaan ekonomi rentan (perempuan, anak muda, disabilitas)		- o Peningkatan kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan - o Peningkatan layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja - o Peningkatan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti
	Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas						Dinas Tenaga Kerja	- o Penguatan pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (<i>manufacturing</i>, konstruksi, perdagangan) - o Penegakan standar upah layak dan pengawasan ketenagakerjaan untuk mencegah eksploitasi buruh. - o Fasilitasi penempatan kerja yang inklusif bagi perempuan,		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai							anak muda, dan penyandang disabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan - o Mendorong industrial upgrading dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pekerja agar imbalan lebih proporsional - o Pemberdayaan UMKM dan koperasi industri untuk mendorong pendapatan lebih merata - o Insentif bagi industri yang menerapkan skema kesejahteraan pekerja Dinas Koperasi dan UKM - o Pengembangan koperasi pekerja dan koperasi produksi untuk mengurangi kesenjangan antara pemilik modal dan buruh - o Akses permodalan mikro bagi kelompok berpendapatan rendah - o Pendampingan UMKM agar naik kelas dan memperluas pendapatan keluarga		
				Sasaran 6.2.2: Meningkatnya perlindungan bagi penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia. Mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan	Dinas Ketenagakerjaan	- o Membangun sistem rekrutmen inklusif untuk penyandang disabilitas pada sektor perdagangan, pengolahan, dan konstruksi - o Pelatihan vokasi adaptif sesuai jenis disabilitas - o Pengawasan penerapan kuota pekerja disabilitas di perusahaan sesuai regulasi ketenagakerjaan		
							Dinas Sosial	o Pendataan terpadu penyandang disabilitas untuk memetakan potensi dan		

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								hambatan kerja o Bantuan sosial adaptif bagi disabilitas miskin o Program pemberdayaan ekonomi mandiri bagi disabilitas berbasis kebutuhan individual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak o Penyusunan pedoman pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas di dunia kerja Dinas Pemuda dan Olahraga o Program peningkatan keterampilan kewirausahaan pemuda disabilitas o Pelibatan pemuda disabilitas dalam kegiatan komunitas dan wirausaha sosial		
		Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Tujuan 7.1: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					
Rendahnya kualitas lingkungan hidup Kota Makassar	Terjadinya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi secara pesat Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun menjadi 74,92 (Tahun 2024) Belum maksimalnya pengelolaan sampah (rata-rata hanya 2,01% sampah yang terolah di fasilitas, dan menurunnya jumlah bank sampah aktif) Massifnya pembangunan infrastruktur			Sasaran 7.1.1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Indeks kualitas tutupan lahan Timbulan sampah yang terolah difasilitas pengolahan sampah	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	o Meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis sensor real time serta memperluas titik monitoring IKU o Mengembangkan inovasi pengurangan sampah (<i>waste to energy</i> , TPS3R, revitalisasi bank sampah) untuk menaikkan persentase sampah terolah o Penguatan pengawasan industri/ usahawan untuk menekan emisi dan pencemaran air o Restorasi kawasan RTH kritis dan peningkatan vegetasi melalui program RTH komunitas	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	o Peningkatan kualitas pemenuhan baku mutu lingkungan o Peningkatan keterpenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) o Peningkatan pengelolaan persampahan o Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
	mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir						Dinas Pekerjaan Umum	- Penataan drainase kota berbasis analisis daya dukung untuk menurunkan risiko banjir akibat alih fungsi lahan - Mendesain dan membangun infrastruktur ramah lingkungan (<i>eco-drain, permeable pavement</i>) - Integrasi RTH dalam setiap pembangunan infrastruktur baru		
							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Penyediaan dan revitalisasi RTH lingkungan pada permukiman padat - Pengendalian pembangunan ilegal yang mengurangi kapasitas resapan air - Implementasi konsep permukiman berkelanjutan (<i>green housing, eco-village</i>)		
							Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	- Pengelolaan sampah berbasis komunitas - Program adopsi pohon dan urban farming sebagai upaya menambah tutupan lahan		
							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Integrasi target indeks kualitas lingkungan hidup dalam seluruh dokumen perencanaan OPD - Monitoring capaian IKLH, IKU, IKA, dan indeks tutupan lahan secara terpadu		
			Tujuan 7.2: Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan		Indeks risiko bencana					
Masih terdapat keterbatasan	Masih lemahnya industri pengolahan maritim		Sasaran 7.2.1: Meningkatnya kapasitas		Indeks ketahanan daerah	Penguatan kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi berbasis teknologi		Peningkatan kualitas pencegahan dan

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan		
Masalah Pokok	Akar Masalah											
dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan biru	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan laut				Penurunan intensitas emisi GRK (%)		Penanganan bencana dan adaptasi perubahan iklim	Penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada edukasi. Infrastruktur hijau. Pemanfaatan teknologi adaptif, kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(tracking sampah, pemilahan di sumber) ○ Meningkatkan pemulihan kualitas air melalui penguatan pengawasan limbah industri dan modernisasi laboratorium lingkungan ○ Ekspansi Ruang Terbuka Hijau publik dan privat dengan pendekatan <i>nature-based solutions</i>
	Penanganan sampah yang belum terintegrasi											
	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
	Kualitas air yang perlu ditingkatkan											
						Dinas Perikanan dan Kelautan	○ Penguatan industri pengolahan maritim melalui fasilitasi investasi, sertifikasi mutu, dan inovasi produk olahan ○ Penguatan pengawasan lingkungan laut dan konservasi pesisir (mangrove, terumbu karang). ○ Mendorong teknologi ramah lingkungan untuk sektor perikanan dan budidaya (alat tangkap ramah, sistem budidaya berkelanjutan)					
						Dinas Pekerjaan Umum	○ Pembangunan infrastruktur hijau: sumur resapan, taman kota, koridor hijau, kawasan					

Permasalahan		Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Perangkat Daerah Terkait	Strategi	Program Walikota (9 Program Strategis)	Fokus Kebijakan
Masalah Pokok	Akar Masalah									
								resapan banjir ○ Peningkatan infrastruktur air limbah dan drainase untuk mengurangi pencemaran dan risiko banjir. ○ Integrasi konsep low impact development (LID) dalam pembangunan kota		
							Dinas Tata Ruang	○ Penataan kawasan urban berbasis ekologi kota ○ Optimalisasi RTH privat melalui regulasi kewajiban RTH pada pembangunan gedung		

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

B. Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, Terkait Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Sasaran strategis dan fokus pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar adalah menyelaraskan riset dan inovasi dengan keunggulan daerah dan permasalahan prioritas daerah. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID) yang mengarahkan kebijakan untuk peningkatan tata kelola, pelayanan publik, kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset, dan daya saing daerah.

Sasaran strategis yang dimaksud yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan menggunakan riset dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi daerah, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan inovasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tidak kalah penting mendukung kebijakan berbasis bukti dengan memastikan kebijakan daerah dirumuskan berdasarkan data dan hasil riset yang akurat, bukan sekadar asumsi, selanjutnya membangun ekosistem riset dan inovasi yang kuat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Fokus pengembangan

Adapun fokus pengembangan unggulan daerah yakni langkah awalnya dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan riset dan inovasi yang berkaitan dengan potensi ekonomi unggulan daerah, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau industri tertentu, kemudian penyelesaian permasalahan prioritas daerah dengan mengarahkan riset dan inovasi untuk mencari solusi dari isu-isu strategis yang dihadapi daerah, seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan, atau lingkungan, selanjutnya melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada

peningkatan kualitas SDM melalui riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah, dan juga pengembangan dunia usaha dengan mendorong inovasi yang dapat menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan produktivitas usaha yang sudah ada di daerah, tak kalah penting pengembangan masyarakat dengan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 6. 2 Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kota Makassar, Terkait Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelesaian dengan Perkembangan Global		
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah								
Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi	- Menyusun <i>research roadmap</i> sektor unggulan (perdagangan, pengolahan, konstruksi, ekonomi kreatif, dan digital) untuk mengarahkan investasi riset pada kebutuhan ekonomi lokal - Mengembangkan <i>science tech innovation hub</i> kota melalui fasilitas laboratorium, pusat inkubasi bisnis, <i>co-creation center</i>, dan dukungan teknologi digital terpadu - Menetapkan kebijakan insentif untuk mendorong inovasi, termasuk kemudahan perizinan bagi usaha berbasis teknologi dan pembiayaan inovasi melalui skema pendanaan daerah	- Memperkuat kapasitas BRIDA, OPD teknis, serta perguruan tinggi dalam riset terapan melalui pelatihan metodologi, manajemen inovasi, dan evaluasi dampak. - Menyediakan <i>fundin g pool</i> riset daerah untuk mendorong penelitian yang berorientasi pada penguatan sektor unggulan dan penciptaan lapangan kerja - Memperluas dukungan pendampingan teknis bagi UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengadopsi hasil riset, teknologi produksi, dan inovasi model bisnis	- Membangun kemitraan tripel heliks (pemerintah–akademisi–dunia usaha) untuk riset terapan pada sektor prioritas seperti industri pengolahan, perdagangan digital dan maritim - Mendorong kolaborasi penelitian bersama BUMD, industri lokal, dan investor untuk mempercepat hilirisasi produk unggulan daerah - Menghubungkan UMKM dengan lembaga penelitian untuk rekayasa produk, sertifikasi, dan peningkatan standar kualitas	- Menumbuhkan budaya <i>data-driven policy</i> dengan mewajibkan setiap OPD menggunakan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program - Mendorong kompetisi inovasi daerah (inovasi pelayanan publik, <i>innovation award</i>, kompetisi startup) untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pelaku usaha - Mengembangkan literasi inovasi melalui pelatihan, seminar, dan publikasi hasil riset sehingga budaya ilmiah terinternalisasi di lingkungan birokrasi dan masyarakat.	- Mengintegrasikan seluruh aktivitas riset, data ekonomi, dan inovasi melalui <i>Makassar Research & Innovation System</i> (MRIS) untuk menghindari duplikasi dan memperkuat sinkronisasi program. - Memastikan hasil riset langsung dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah, terutama sektor unggulan, penciptaan kerja, ketahanan pangan, dan iklim investasi. - Mengembangkan <i>monito ring dashboard</i> untuk memantau kinerja inovasi, adopsi teknologi, dan kontribusinya terhadap PDRB sektor unggulan	- Mengadopsi standar internasional dalam pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, dan teknologi hijau untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar global - Mengembangkan riset berbasis isu global: ekonomi sirkular, <i>renewable energy</i>, <i>climate resilience</i>, dan smart urban system sesuai tren pertumbuhan kota modern - Membangun jejaring riset internasional dengan universitas dan lembaga riset global untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas peneliti daerah	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB, meningkatnya kesempatan kerja, produktivitas, dan daya saing usaha/UMKM-ekraf.	Hilirisasi riset sektor unggulan; inkubasi & <i>business matching</i> UMKM/ekraf; program <i>upskilling-reskilling</i> berbasis kebutuhan industri; penguatan <i>creative/innovation hub</i> terintegrasi.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat								
Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan	- Menyusun regulasi daerah yang memberikan kepastian hukum dan insentif inovasi bagi sektor unggulan (maritim, kuliner, digital, dan jasa). - Mengembangkan <i>research facilities</i> seperti laboratorium teknologi, pusat inkubasi bisnis, <i>co innovation space</i>, serta <i>data center</i> daerah yang mendukung riset sektor prioritas - Membangun sistem tata kelola data berbasis <i>open data</i> untuk meningkatkan kualitas analisis dan perencanaan berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>)	- Memperkuat peran BRIDA sebagai <i>knowledge hub</i> dalam pengembangan produk unggulan daerah melalui standardisasi metodologi riset, <i>knowledge management</i>, dan koordinasi lintas-OPD - Meningkatkan kapasitas ASN melalui <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> pada analisis kebijakan, ekonomi kreatif, manajemen inovasi, dan teknologi digital - Menyediakan skema pendanaan riset dan inovasi, termasuk <i>matching fund</i> dengan pelaku industri dan hibah inovasi untuk UMKM unggulan	- Mengembangkan kemitraan <i>quadruple helix</i> (pemerintah-akademisi-industri-komunitas) untuk riset produk unggulan seperti penguatan sektor kuliner, perikanan, dan ekonomi kreatif digital - Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset terapan, <i>pilot project</i>, serta pengembangan teknologi tepat guna pada sektor prioritas - Menghubungkan UMKM/IKM unggulan dengan investor, lembaga keuangan, dan platform pemasaran digital untuk memperluas akses pasar	- Membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data pada OPD melalui <i>routine policy analytics</i>, publikasi hasil riset, dan forum diseminasi inovasi - Mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi melalui <i>innovation challenge</i>, lomba <i>start up</i> lokal, dan kampanye literasi teknologi - Menumbuhkan perilaku adaptif dan kreatif pada aparatur melalui skema penghargaan inovasi pelayanan publik tingkat kota	- Mengintegrasikan hasil riset dalam <i>planning cycle</i> pembangunan: RPJMD–RKPD–Renja OPD agar kebijakan sektor unggulan berbasis bukti dan berorientasi hasil - Membangun sistem pemantauan inovasi (dashboard inovasi daerah) untuk menilai kinerja riset, adopsi teknologi, dan dampaknya terhadap penciptaan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat - Menyelaraskan inovasi daerah dengan program pengembangan kawasan ekonomi, penguatan rantai pasok, dan digitalisasi layanan usaha.	- Mengadopsi standar global pada sektor unggulan (keamanan pangan, rantai pasok dingin, energi terbarukan, ekonomi hijau) untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. - Mengembangkan riset terkait <i>green growth</i> dan transformasi digital untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi Makassar - Mendorong adaptasi teknologi global (IoT, <i>big data analytics</i>, AI) oleh UMKM, IKM, dan <i>start up</i> daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk unggulan	Meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya PAD dan kemandirian fiskal, terjaganya stabilitas harga, serta meningkatnya ketahanan pangan daerah.	Inovasi perizinan & promosi investasi digital; analitik potensi PAD; riset <i>ease of doing business</i> dan daya saing kota; inovasi rantai pasok & logistik pangan serta <i>urban farming</i> .

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
Misi 2:								
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing								
Sasaran 2.1.1:								
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan								
Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	- Menyusun <i>research roadmap</i> peningkatan kualitas pendidikan dan literasi yang memetakan satuan pendidikan berisiko, kesenjangan capaian literasi, dan kebutuhan riset terapan di setiap jenjang. - Mengembangkan <i>education innovation hub</i> sebagai pusat pengembangan dan uji coba model pembelajaran inovatif, teknologi pendidikan, serta intervensi peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. - Menetapkan kebijakan pemanfaatan hasil asesmen nasional, rapor pendidikan, dan survei lingkungan belajar sebagai dasar <i>evidence based policy</i> dalam perencanaan program peningkatan mutu pendidikan.	- Memperkuat kapasitas BRIDA, Dinas Pendidikan, Bappeda, dan OPD terkait dalam riset kebijakan pendidikan melalui pelatihan metodologi riset terapan, analisis data asesmen, dan evaluasi dampak program literasi. - Menyediakan <i>funding pool</i> riset pendidikan yang berfokus pada peningkatan literasi, pengurangan kesenjangan mutu antar sekolah, serta pengembangan model pembelajaran inklusif bagi kelompok rentan. - Mengembangkan sistem tata kelola data pendidikan yang menjamin kualitas, keterbaruan, dan keterpaduan data capaian literasi,	- Membangun kemitraan <i>quadruple helix</i> antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dan komunitas/LSM pendidikan untuk melaksanakan riset terapan dan <i>pilot project</i> peningkatan literasi di satuan pendidikan dengan capaian rendah. - Mendorong kolaborasi riset antara Dinas Pendidikan, BRIDA, dan LPTK/perguruan tinggi untuk mengembangkan dan menguji model pembelajaran literasi berbasis konteks lokal, termasuk di kawasan padat penduduk dan wilayah marginal. - Menghubungkan sekolah dengan lembaga riset, komunitas literasi, dan dunia usaha untuk dukungan program pojok baca,	- Menumbuhkan budaya pengambilan keputusan berbasis bukti di sektor pendidikan dengan mewajibkan penyusunan <i>policy brief</i> dan analisis data asesmen sebagai prasyarat penetapan program peningkatan mutu sekolah dan literasi. - Mendorong kompetisi inovasi pembelajaran melalui penghargaan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang menonjolkan praktik baik peningkatan literasi, pembelajaran inklusif, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. - Mengembangkan literasi riset dan inovasi di kalangan guru dan kepala sekolah melalui pelatihan penelitian tindakan kelas,	- Mengintegrasikan seluruh aktivitas riset, data asesmen, dan inovasi pendidikan ke dalam sistem informasi terpusat sehingga peta masalah literasi dan respon program dapat dipantau secara menyeluruh. - Memastikan hasil riset dan temuan analisis data literasi diintegrasikan ke dalam RPJMD sektor pendidikan, Renstra Dinas Pendidikan, RKPD, dan Renja OPD sebagai dasar penentuan prioritas sasaran dan alokasi anggaran. - Mengembangkan <i>monitoring dashboard</i> untuk memantau capaian literasi, kualitas pembelajaran, dan akses pendidikan per kecamatan dan per satuan pendidikan serta mengaitkannya dengan intervensi program dan dukungan sumber daya.	- Mengadopsi kerangka dan standar internasional peningkatan literasi dan pembelajaran inklusif yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya Kota Makassar. - Mengembangkan riset terkait <i>safe and inclusive learning environment</i>, WASH di sekolah, serta integrasi nilai karakter dan keagamaan dalam desain fasilitas dan praktik pembelajaran untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. - Membangun jejaring riset nasional dan internasional di bidang pendidikan dasar, literasi, dan inklusi pendidikan untuk <i>joint research</i>, pertukaran peneliti, dan akses pendanaan	Meningkatnya akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan capaian pembangunan manusia.	Pengembangan <i>education research roadmap</i> dan <i>education innovation hub</i> ; pemanfaatan data asesmen/rapor pendidikan; <i>health research roadmap</i> , <i>health innovation hub</i> , dan penguatan <i>health data governance</i> .

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
		profil sekolah, dan program intervensi untuk menunjang riset dan inovasi kebijakan.	perpustakaan sekolah, penyediaan bahan bacaan bermutu, dan kampanye literasi keluarga.	penulisan karya ilmiah, dan forum diseminasi hasil riset yang relevan dengan peningkatan mutu pembelajaran.		riset yang memperkuat mutu pendidikan daerah.		
Misi 3:								
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan								
Sasaran 3.1.1:								
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi								
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	- Menyusun <i>urban infrastructure research roadmap</i> yang memetakan kesenjangan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, drainase, air minum, sanitasi, jaringan pejalan kaki dan pesepeda, serta ruang terbuka hijau di seluruh wilayah kota - Mengembangkan kebijakan dan regulasi pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan ketahanan iklim, termasuk standar desain jalan lengkap (<i>complete street</i>), drainase	- Memperkuat kapasitas OPD infrastruktur (PUPR, Perhubungan, Perumahan, Permukiman), BRIDA, dan Bappeda dalam analisis spasial, pemodelan hidrologi, analisis kapasitas jaringan, dan penilaian kelayakan ekonomi lingkungan melalui pelatihan dan pendampingan teknis - Mengembangkan bank data infrastruktur terintegrasi berbasis GIS yang memuat kondisi, usia, dan tingkat	- Membangun kemitraan riset terapan dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi (PU, transportasi, arsitektur), dan sektor swasta konstruksi untuk mengembangkan dan menguji konsep infrastruktur inovatif seperti drainase berbasis alam, jalan ramah pejalan kaki dan disabilitas, serta terminal dan simpul transportasi terintegrasi - Mengembangkan <i>pilot project</i> infrastruktur di koridor atau kawasan prioritas sebagai laboratorium hidup	- Menumbuhkan budaya perencanaan dan pembangunan infrastruktur berbasis data dan kajian dengan mewajibkan penggunaan hasil studi kelayakan, analisis manfaat biaya, dan kajian lingkungan sebagai dasar pemilihan proyek - Menyelenggarakan forum teknis dan <i>design review clinic</i> untuk mengkritisi dan menyempurnakan desain infrastruktur strategis - Memberikan penghargaan kepada OPD dan tim teknis yang berhasil mengintegrasikan	- Mengintegrasikan hasil riset dan data kinerja infrastruktur ke dalam RTRW/RDTR, rencana induk jaringan jalan dan drainase, rencana transportasi, serta dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan - Mengembangkan <i>dash board</i> kinerja infrastruktur yang memantau kondisi, kapasitas, tingkat pelayanan, dan prioritas penanganan per wilayah - Memastikan sinkronisasi program infrastruktur lintas OPD dan lintas level pemerintahan agar saling mendukung	- Menyelaraskan pembangunan infrastruktur kota dengan agenda global seperti SDGs, konsep <i>green city</i> dan <i>resilient city</i> dengan mengadopsi standar internasional yang relevan dan disesuaikan dengan konteks lokal - Mendorong riset tentang infrastruktur rendah emisi, solusi berbasis alam untuk pengurangan banjir dan panas kota, serta integrasi transportasi publik dalam tata ruang	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur dasar perkotaan (transportasi, permukiman, air minum, sanitasi, drainase, energi/digital) serta penataan ruang yang berkelanjutan dan inklusif.	Riset & inovasi <i>smart infrastructure</i> ; pemanfaatan GIS dan data berbasis kawasan fungsional; <i>pilot TO D</i> , transportasi rendah emisi, dan peningkatan kualitas drainase/air minum; integrasi hasil riset ke RTRW/RDTR.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	berkelanjutan, dan kawasan TOD - Membangun infrastruktur pendukung riset seperti <i>urban lab</i> dan sistem <i>digital twin</i> kota untuk simulasi skenario pembangunan infrastruktur.	pelayanan sarana prasarana - Menyediakan pendanaan riset untuk inovasi desain dan teknologi infrastruktur, termasuk material ramah lingkungan dan teknologi pemantauan kondisi infrastruktur.	- Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam proses <i>co design</i> dan <i>co creation</i> ruang publik.	prinsip keselamatan, inklusivitas, dan keberlanjutan dalam perancangan dan pelaksanaan infrastruktur.	dan mengurangi duplikasi.	- Membangun jejaring kerja sama dengan kota dan lembaga internasional untuk <i>benchmarking</i> dan kolaborasi pengembangan infrastruktur berkelanjutan.		
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kuantitas inovasi seluruh bidang pembangunan								
Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	- Menyusun kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berbasis bukti yang menjelaskan peran BRIDA, OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas dalam siklus inovasi - Mengembangkan regulasi <i>innovation sandbox</i> untuk uji coba kebijakan dan teknologi baru di wilayah terbatas sebelum diperluas - Menetapkan instrumen insentif dan penghargaan bagi	- Memperkuat kelembagaan BRIDA sebagai <i>knowledge & innovation hub</i> yang mengorkestrasi agenda riset dan inovasi lintas sektor - Meningkatkan kapasitas ASN dan pelaku usaha melalui pelatihan desain inovasi, manajemen perubahan, dan pengukuran	- Membangun kemitraan <i>quadruple helix</i> yang mendorong kolaborasi inovasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas - Mengembangkan <i>joint innovation program</i> dengan BUMN/ BUMD, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk tema-tema prioritas	- Menumbuhkan budaya inovasi di birokrasi dan masyarakat melalui <i>innovation challenge</i> , sayembara solusi, dan forum berbagi praktik baik - Mewajibkan pemanfaatan data dan riset dalam perancangan inovasi pelayanan publik dan sosial - Memberikan penghargaan institusional kepada OPD, sekolah,	- Mengintegrasikan proses inovasi ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dengan menyediakan ruang eksplisit untuk <i>pilot project</i> , evaluasi dan <i>scale up</i> inovasi - Mengembangkan <i>dash board</i> inovasi daerah yang menampilkan portofolio inovasi, status pengembangan, dan indikator dampak - Memastikan sinergi	- Menyelaraskan ekosistem inovasi daerah dengan indeks dan kebijakan inovasi nasional serta agenda global mengenai inovasi untuk pembangunan berkelanjutan - Mendorong riset tentang tata kelola inovasi, mekanisme pembiayaan inovasi, dan dampak sosial	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, meningkatnya kunjungan, lama tinggal, dan pendapatan pelaku wisata-ekraf.	<i>Tourism & creative economy labs</i> ; digitalisasi aset budaya; analitik destinasi & event; penguatan <i>branding</i> berbasis kearifan lokal; inkubasi produk kreatif dan <i>market access</i> digital.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	inovasi sektor publik dan swasta yang terbukti memberikan dampak signifikan terhadap layanan publik dan pembangunan.	dampak inovasi - Menyediakan skema pembiayaan inovasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, lingkungan, tata kelola, sosial) yang kompetitif, transparan, dan berorientasi hasil.	(<i>green city, inclusive city</i>) - Membentuk klaster inovasi tematik seperti <i>smart mobility cluster, green infrastructure cluster</i> , dan <i>inclusive service cluster</i> .	puskesmas, UMKM, dan komunitas yang secara konsisten menghasilkan dan mereplikasi inovasi berdampak.	antara inovasi di sektor berbeda sehingga tidak berjalan terpisah dan memanfaatkan platform data dan teknologi yang sama.	inovasi - Menjalin jejaring dengan kota-kota inovatif di tingkat nasional dan internasional untuk saling belajar, mengadopsi, dan menyesuaikan praktik baik inovasi.		
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum								
Sasaran 5.1.1: Meningkatnya akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas pemerintahan daerah								
Transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	- Menyusun <i>governance research roadmap</i> yang memetakan persoalan akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas birokrasi di seluruh OPD - Mengembangkan kebijakan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui penerapan sistem <i>e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev</i>, dan pengaduan publik terpadu - Menyiapkan regulasi yang memperkuat meritokrasi,	- Memperkuat kapasitas Bappeda, Inspektorat, BRIDA, dan OPD pengampu reformasi birokrasi dalam analisis kebijakan publik, manajemen kinerja, dan tata kelola risiko melalui pelatihan, pendampingan, dan <i>coaching</i> - Mengembangkan unit analisis kebijakan yang mampu mengolah	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga pengawas eksternal, lembaga antikorupsi, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan kajian integritas, survei kepuasan publik, serta evaluasi program prioritas - Menggandeng sektor swasta dan komunitas teknologi untuk pengembangan solusi <i>govtech</i> yang meningkatkan transparansi dan	- Menumbuhkan budaya integritas dan inovasi di birokrasi melalui kampanye nilai (anti-korupsi, pelayanan prima, profesionalisme), <i>integrity award</i> dan <i>innovation award</i> untuk unit kerja yang berprestasi - Mendorong pemanfaatan data dan hasil kajian dalam setiap rapat pimpinan dan pengambilan keputusan strategis - Mengembangkan	- Mengintegrasikan hasil riset tata kelola, temuan audit, dan survei publik ke dalam desain reformasi birokrasi, perbaikan SOP, dan penyusunan standar pelayanan - Mengembangkan <i>dashboard</i> kinerja pemerintahan yang memuat indikator akuntabilitas, kecepatan layanan, kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut pengaduan - Memastikan sistem informasi yang dikembangkan tiap	- Menyelaraskan reformasi tata kelola daerah dengan standar nasional (SPIP, SAKIP, RB) dan inisiatif global seperti <i>open government, smart governance</i>, dan berbagai indeks tata kelola - Mendorong riset tentang pemerintahan terbuka, partisipasi digital, dan tata kelola kolaboratif dengan multi pihak - Membangun	Meningkatnya kinerja birokrasi, kualitas pelayanan publik, integritas, dan efektivitas tata kelola berbasis merit system dan transformasi digital.	Pengembangan <i>GovTech/super apps</i> layanan; <i>open data</i> dan <i>dashboard</i> kinerja; analitik SDM aparatur untuk meritokrasi; inovasi pembiayaan pembangunan dan peningkatan akuntabilitas.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	keterbukaan informasi publik, pengelolaan risiko, dan perlindungan pelapor pelanggaran (<i>whistleblower</i>)	data kinerja dan pengaduan menjadi rekomendasi perbaikan - Menyediakan pendanaan riset tata kelola untuk uji coba model baru pengawasan, pelayanan publik, dan manajemen SDM aparatur.	kecepatan layanan - Menjalin kerja sama dengan pemerintah kota lain sebagai <i>learning network</i> reformasi birokrasi.	forum rutin refleksi kinerja dan pembelajaran kebijakan lintas OPD untuk mempercepat proses belajar dari kesalahan dan praktik baik.	OPD saling terhubung dalam kerangka <i>one data – one policy</i> daerah.	jejaring dengan inisiatif global transparansi dan antikorupsi untuk mengadopsi dan menyesuaikan praktik baik di tingkat internasional.		
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum								
Sasaran 5.2.1: Meningkatnya kualitas keamanan masyarakat								
Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	- Menyusun kebijakan keamanan dan ketertiban umum berbasis analisis data kriminalitas, gangguan ketertiban, dan kerawanan sosial di tingkat kecamatan/kelurahan - Mengembangkan sistem informasi keamanan wilayah berupa peta rawan kejahatan, konflik, dan bencana yang terhubung dengan <i>command center</i> - Menetapkan regulasi	- Memperkuat kapasitas Satpol PP, aparat kelurahan, dan OPD terkait dalam manajemen keamanan lingkungan, mediasi konflik, dan manajemen kerumunan melalui pelatihan berbasis skenario (<i>table-top exercise</i> dan simulasi lapangan) - Mengembangkan infrastruktur pendukung seperti CCTV cerdas,	- Membangun kemitraan dengan Kepolisian, perguruan tinggi, lembaga riset sosial, dan komunitas keamanan lingkungan untuk riset pola kejahatan, penyalahgunaan ruang, dan gangguan ketertiban - Mendorong program <i>community policing</i> dan <i>neighbourhood watch</i> berbasis riset sosial yang mengedepankan pencegahan	- Menumbuhkan budaya kewaspadaan dan kepedulian sosial melalui kampanye keamanan lingkungan, pendidikan warga, dan simulasi kebencanaan serta evakuasi yang memanfaatkan data risiko - Mendorong penyusunan rencana tindak keamanan di tingkat RT/RW/kelurahan berbasis peta kerawanan	- Mengintegrasikan data keamanan dan hasil riset sosial ke dalam perencanaan wilayah, penataan ruang, dan program sosial (pemberdayaan, pemuda, penanganan kemiskinan) - Mengembangkan <i>dash board</i> keamanan yang menampilkan tren kejadian, titik rawan, dan respon penanganan - Memastikan koordinasi lintas OPD dan aparat keamanan dalam menindaklanjuti rekomendasi kajian	- Menyelaraskan strategi keamanan lokal dengan konsep <i>safer city</i> dan praktik baik nasional/global tentang keamanan kota - Mendorong riset tentang keamanan berbasis desain lingkungan (<i>crime prevention through environmental design – CPTED</i>), keamanan digital, dan peran media sosial dalam	Meningkatnya stabilitas ketenteraman-ketertiban, keamanan, dan kohesi sosial melalui penguatan nilai agama, moderasi, dan toleransi.	Riset <i>social cohesion</i> dan pencegahan intoleransi/radikalisme; penguatan <i>early warning</i> sosial; inovasi partisipasi warga dalam keamanan lingkungan; integrasi indikator toleransi dalam perencanaan sosial.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	yang mendorong kolaborasi polisi–pemerintah–masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan.	sistem pelaporan darurat, dan pusat komando yang dianalisis rutin - Menyediakan pendanaan untuk kajian sosial terkait faktor penyebab kriminalitas dan konflik lokal.	- Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda dalam desain dan pelaksanaan program keamanan kawasan.	- Mengapresiasi inisiatif warga, komunitas, dan kelurahan yang berhasil menurunkan tingkat gangguan ketertiban melalui inovasi lokal.	dan laporan masyarakat.	keamanan - Menjalin jejaring dengan kota lain yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan keamanan inklusif dan humanis.		
Misi 6:								
Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga								
Sasaran 6.1.1:								
Menurunnya ketimpangan gender								
Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	- Menyusun <i>gender equality research roadmap</i> yang memetakan kesenjangan gender dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kepemimpinan, dan keamanan - Mengembangkan kebijakan pengarusutamaan gender di seluruh OPD melalui peraturan dan pedoman <i>gender mainstreaming</i> dan <i>gender responsive budgeting</i> (GRB) - Menyiapkan instrumen regulasi dan indikator untuk memantau	- Memperkuat kapasitas OPD, BRIDA, dan lembaga layanan dalam analisis gender, penyusunan GRB, dan pemantauan program responsif gender melalui pelatihan dan pendampingan - Mengembangkan sistem data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan sebagai basis perencanaan - Menyediakan pendanaan riset untuk kajian	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM gender, organisasi perempuan, dan dunia usaha untuk merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, kepemimpinan, dan pendidikan - Mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha untuk penerapan praktik kerja ramah keluarga, kebijakan anti-diskriminasi,	- Menumbuhkan budaya kesetaraan dan anti diskriminasi melalui kampanye publik, pendidikan di sekolah dan komunitas, dan program <i>role model</i> perempuan inspiratif - Mendorong media lokal untuk menyebarkan narasi positif tentang peran perempuan di berbagai bidang - Mengapresiasi institusi dan komunitas yang secara konsisten menunjukkan praktik ramah gender dan	- Mengintegrasikan hasil riset gender ke dalam RPJMD, renstra OPD, dan program lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola - Mengembangkan indikator kinerja kesetaraan gender yang diadopsi lintas OPD - Membangun <i>dashboard</i> kesetaraan gender yang memantau capaian dan disparitas di tingkat kecamatan/kelurahan.	- Menyelaraskan upaya pengurangan ketimpangan gender dengan konvensi CEDAW, kebijakan nasional gender, dan SDGs - Mendorong riset tentang <i>care economy</i>, kekerasan berbasis gender, dan perempuan dalam kepemimpinan publik maupun privat - Menjalin jejaring dengan	Meningkatnya kualitas keluarga, menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan/marjinal, serta meningkatnya kapasitas dan prestasi kepemudaan dan olahraga.	<i>Gender equality research roadmap</i> ; penguatan data terpilah dan GRB; <i>social innovation lab</i> untuk kelompok rentan; pengembangan kewirausahaan pemuda; riset sport science dan pembinaan prestasi.

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	kemajuan kesetaraan gender di berbagai sektor.	ketimpangan gender, beban kerja domestik, partisipasi ekonomi, dan partisipasi politik perempuan.	dan kesempatan karier yang setara - Melibatkan tokoh agama dan adat dalam kampanye kesetaraan dan pencegahan kekerasan gender.	berhasil mengurangi kesenjangan.		kota/daerah dan lembaga yang menjadi rujukan kebijakan responsif gender untuk pertukaran pengalaman.		
Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi bencana								
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	- Menyusun <i>environmental and climate research roadmap</i> yang memetakan sumber pencemaran, kawasan kritis, dan prioritas intervensi lingkungan di wilayah perkotaan dan pesisir - Mengembangkan regulasi pengelolaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung, termasuk penataan kawasan lindung, sempadan sungai, dan pesisir - Menyiapkan kebijakan pengurangan emisi, pengelolaan sampah terpadu, dan pengendalian	- Memperkuat kapasitas OPD lingkungan, kebersihan, dan tata ruang dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemodelan hidrometeorologi, dan perencanaan ketahanan iklim melalui pelatihan dan kerja sama teknis - Mengembangkan laboratorium lingkungan dan sistem data kualitas air, udara, dan tanah yang terintegrasi - Menyediakan	- Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, BRIN, komunitas lingkungan, dan sektor swasta untuk riset dan <i>pilot project</i> solusi berbasis alam (<i>nature-based solutions</i>), konservasi ekosistem, dan ekonomi sirkular - Menggandeng sektor swasta untuk program pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan pengembangan energi terbarukan - Melibatkan masyarakat dalam	- Menumbuhkan budaya peduli lingkungan melalui kampanye publik, gerakan warga (bank sampah, urban farming, penghijauan), dan pendidikan lingkungan di sekolah - Mendorong inovasi komunitas dalam pengelolaan sampah, konservasi, dan penghematan energi air - Mengapresiasi kelurahan, sekolah, dan komunitas yang berhasil meningkatkan kualitas lingkungan	- Mengintegrasikan hasil riset lingkungan dan iklim ke dalam RTRW/RDTR, rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, rencana pengelolaan sampah, dan program sektor lain (infrastruktur, kesehatan, sosial) - Mengembangkan <i>dash board</i> lingkungan yang memantau kualitas lingkungan dan capaian program - Menynergikan program lintas OPD dan level pemerintahan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.	- Menyelaraskan pengelolaan lingkungan dengan agenda global seperti Paris Agreement dan SDGs - Mendorong riset tentang kota rendah emisi, adaptasi iklim, dan ekonomi hijau - Menjalin jejaring dengan kota dan lembaga internasional untuk kolaborasi, pendanaan, dan pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya pencemaran, meningkatnya pengelolaan sampah dan RTH, serta meningkatnya ketahanan bencana dan iklim.	<i>Environmental & climate research roadmap</i> ; inovasi 3R dan ekonomi sirkular; <i>nature-based solutions</i> ; penguatan sistem data kualitas lingkungan; riset risiko bencana hidrometeorologi dan <i>early warning system</i> .

Program Pembangunan Daerah	Strategi Pengembangan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah						Sasaran Strategis	Fokus Pengembangan
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global		
	pencemaran air, udara, dan tanah.	pendanaan riset untuk solusi pengelolaan sampah, pengurangan pencemaran, dan pemulihan ekosistem.	pemantauan lingkungan partisipatif.	secara nyata.				

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

BAB VII

RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DI KOTA MAKASSAR

A. Program dan Target Tahunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Seiring dinamika perubahan yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki perspektif strategis yang jelas dalam merespons berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sasaran strategis berfungsi sebagai fondasi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu memberikan solusi konkret dan berkelanjutan terhadap isu-isu prioritas. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*) telah terbukti efektif dalam memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun setiap tahun benar-benar tepat sasaran, efisien, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Sasaran strategis mencerminkan visi jangka panjang pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, serta menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang nyata. Sasaran ini menjadi pedoman dalam penetapan arah kebijakan, perumusan program pembangunan, serta pengalokasian sumber daya agar hasil yang dicapai dapat terukur dan konsisten. Tanpa sasaran strategis yang terdefinisi secara jelas, berbagai upaya pembangunan berpotensi kehilangan fokus dan mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi capaian secara objektif.

Dalam penyelesaian permasalahan prioritas daerah, pendekatan berbasis bukti memegang peranan sentral. Pendekatan ini menekankan pemanfaatan data, informasi, serta analisis yang valid dan terverifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan landasan bukti yang kuat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi akar permasalahan secara lebih akurat, merumuskan intervensi yang tepat, serta memproyeksikan dampak kebijakan secara lebih rasional. Hal ini mencegah pengambilan

keputusan yang didasarkan pada asumsi atau persepsi subjektif semata.

Program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan menjadi instrumen operasional untuk mengimplementasikan sasaran strategis sekaligus menerapkan prinsip-prinsip evidence-based policy. Program tahunan menggambarkan langkah-langkah prioritas yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran, sedangkan kegiatan dan subkegiatan merupakan rincian operasional yang memastikan keterlaksanaan program secara efektif. Seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan harus merujuk pada bukti empiris yang relevan agar kebijakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi objektif daerah.

Penggunaan bukti juga menjadi elemen krusial dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Evaluasi berbasis bukti membantu pemerintah daerah menilai tingkat pencapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, perencanaan tahunan dapat terus disempurnakan berdasarkan temuan empiris yang valid.

**Tabel 7. 1 Matriks Program Riset dan Inovasi dalam Penyelesaian Permasalahan
Prioritas Daerah yang Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) di Kota Makassar**

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 1:								
Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif yang terintegrasi								
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai	Pertumbuhan Ekonomi (%) : – (5,73%) - Rasio PDRB industri pengolahan (%) – (19,29%) - Rasio PDRB perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%) – (20,10%)	- 2 Riset - 1 Inovasi	- 2 Riset - 1 Evaluasi	- 2 Riset - 1 Evaluasi	- 3 Evaluasi	- Tersusunnya 6 dokumen riset - Terlaksananya 1 model inovasi - Tersusunnya 6 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Disnaker, Disperindag, Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kominfo, Dinas Sosial
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Kebutuhan kompetensi dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja			- 2026 (Riset – Penelitian)				- Tersedianya dokumen pemetaan kesenjangan keterampilan pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi	
- Produktivitas dan struktur upah industri pengolahan			- 2026 (Riset – Penelitian)				- Tersusunnya dokumen identifikasi penyebab ketimpangan upah antara buruh dan manajemen	
- Inovasi perencanaan infrastruktur terpadu industri-perdagangan			- 2026 (Inovasi)				- Tersusunnya dokumen inovasi	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Implementasi program upskilling dan reskilling terstruktur - Pilot project reformulasi struktur upah berbasis produktivitas - Penerapan pembangunan infrastruktur konektivitas terpadu - Optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi ke seluruh wilayah prioritas - Implementasi menyeluruh skema upah berbasis produktivitas - Penguatan infrastruktur dan integritas sistem transportasi - Evaluasi menyeluruh produktivitas tenaga kerja dan mobilitas sektor - Institutionalization of fair wage system dan standar industri - Sevaluasi sistem konektivitas industri dengan perdagangan secara terintegrasi		- 2027 (Riset)				- <i>integrated connectivity master model</i>		
		- 2027 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen kurikulum pelatihan baru berbasis hasil pemetaan kesenjangan keterampilan dan pelatihan khusus di kawasan industri		
		- 2027 (Riset)				- Tersusunnya laporan dampak wal terhadap peningkatan pendapatan buruh melalui model struktur upah berbasis produktivitas		
		- 2028 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen teknis pembangunan berkelanjutan infrastruktur konektivitas		
		- 2028 (Riset)				- terlaksananya model advanced skills (otomasi, digital manufacturing, digital trade)		
		- 2028 (Riset)				- tersusunnya dokumen hasil survei indeks ketimpangan upah (<i>wage inequality index</i>)		
		- 2029 (Evaluasi)				- tersusunnya dokumen hasil pemetaan integrasi angkutan logistik kota		
		- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil evaluasi produktivitas tenaga kerja lintas sektor		
		- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen indeks pendapatan tenaga kerja sektor unggulan dan dokumen hasil pemetaan standar remunerasi berbasis produktivitas sebagai pedoman kemitraan antara pemerintah dengan industri		
		- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen pedoman operasional jangka panjang <i>integrated connectivity model</i> yang dapat meningkatkan efisiensi logistik, menarik investasi, dan memperkuat daya saing		
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 1: Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembanganekonomi kreatif yang terintegrasi								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	Meskipun sudah terjadi trend penurunan untuk tiga tahun terakhir ini, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19% dan tingkat nasional sebesar 4,91% akibat seluruh upaya pemulih ekonomi pasca pandemi, seperti kembali beoperasinya sektor ekonomi, pertumbuhan signifikan pada UMKM serta peningkatan investasi di sektor properti dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan	Pertumbuhan Ekonomi (%): – (5,73%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) – (9,62%) - PDRB Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun) – (175,46)	- 3 Riset	- 1 Riset - 2 Inovasi	- 2 Riset - 1 Inovasi	- 3 Evaluasi	- Tersusunnya 6 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 3 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Disnaker, Diskop UKM, Disperindag, Diskominfo,
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Riset ekosistem ketenagakerjaan Kota Makassar			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan ekosistem ketenagakerjaan Kota Makassar - Tersusunnya dokumen hasil kajian akselerasi start up teknologi berbasis lokal - Tersusunnya dokumen hasil kajian pengintegrasian pasar UMKM melalui e-commerce dan ritel modern - Tersusunnya dokumen hasil kajian kesiapan industri terhadap standar kompetensi daerah - Terlaksananya model akselerasi start up teknologi berbasis masalah industri lokal - Terlaksananya model perluasan pasar - Tersusunnya dokumen hasil kajian pengembangan standar kompetensi antara pemerintah dengan industri - Tersusunnya dokumen hasil kajian performa start up ke ekosistem industri lokal - Terlaksananya model pengembangan skema pembiayaan terintegrasi - Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pengembangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri	
- Akselerasi start up teknologi berbasis solusi lokal			- 2026 (Riset)					
- Integrasi Pasar UMKM melalui E-commerce dan ritel modern			- 2026 (Riset)					
- Kesiapan industri terhadap standar kompetensi daerah			- 2027 (Riset)					
- Model akselerasi start up teknologi berbasis masalah industri lokal			- 2027 (Inovasi)					
- Implementasi platform dan perluasan akses			- 2027 (Inovasi)					
- .Implementasi pengembangan standar kompetensi antara pemerintah dengan industri			- 2028 (Riset)					
- efektivitas performa start up ke ekosistem industri lokal (ritel, UMKM, pelabuhan, transportasi)			- 2028 (Riset)					
- Pengembangan skema pembiayaan integrasi untuk UMKM binan prirotas berbasis kinerja			- 2028 (Inovasi)					
- Pemenuhan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri			- 2029 (Evaluasi)					

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Efektivitas pengembangan start up untuk sektor industri, perdagangan, dan jasa lokal		- 2029 (Evaluasi)	- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian efektivitas pengembangan start up untuk sektor industri, perdagangan, dan jasa lokal	
- Integrasi sistem pemasaran melalui e-commerce, marketplace lokal, dan <i>local merchant hub</i> .							- Tersusunnya dokumen hasil kajian integrasi sistem pemasaran melalui e-commerce, market place lokal, dan local merchan hub	
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.2.1: Meningkatnya kemandirian fiskal daerah								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 2:								
Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan								
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka	Meskipun sudah terjadi trend penurunan untuk tiga tahun terkahir ini, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19% dan tingkat nasional sebesar 4,91% akibat seluruh upaya pemulih ekonomi pasca pandemi, seperti kembali beoperasinya sektor ekonomi, pertumbuhan signifikan pada UMKM serta peningkatan investasi di sektor properti dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan	Indeks daya saing daerah: 4,17 - Rasio pajak terhadap PDRB (%) – (0,59%)	- 1 Riset	- 1 Evaluasi	- 1 Riset	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 1 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Bapenda, Dinas PU
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Optimalisasi ekosistem pajak daerah berbasis digital		- 2026 (Riset) - 2027 (Inovasi) - 2028 (Riset) - 2029 (Evaluasi)	- 2026 (Riset) - 2027 (Inovasi) - 2028 (Riset) - 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan ekosistem pajak daerah dan model pemetaan digitalisasi pajak daerah	
- Inovasi sistem smart tax monitoring & intelligence							- Terlaksananya inovasi sistem smart tax monitoring & intelligence	
- Kontribusi infrastruktur baru (pelabuhan, jalan, kawasan bisnis) terhadap PAD							- Tersusunnya dokumen hasil kajian pengaruh kesediaan infrastruktur baru terhadap PAD	
- Efektivitas peningkatan indeks daya saing daerah melalui rasio pajak terhadap PDRB							- Tersusunnya dokumen hasil evaluasi peningkatan indeks daya saing daerah melalui rasio pajak terhadap PDRB	
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait	
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028			2029
Sasaran 1.2.2: Terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 2:								
Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan								
Masih terdapat tingkat kerentanan yang signifikan dalam sektor energi, air, dan pangan	Ketergantungan pasokan energi listrik	Indeks daya saing daerah: - (4,17) - Tingkat inflasi (%) - (1,52%) - Indeks ketahanan pangan - (84,98)	- 2 Riset	- 1 Riset - 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 2 Evaluasi	- Tersusunnya 3 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 2 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas PU, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian
	Rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan							
	Layanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang belum merata							
	Keterbatasan produksi pangan lokal sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Ketergantungan energi dan akselerasi EBT untuk sektor pangan			- 2026 (Riset)			- Tersedianya dokumen hasil kajian daya saing ekonomi melalui efisiensi energi pada produksi pangan dan cold chain		
- Pemerataan akses air bersih untuk ketahanan pangan perkotaan			- 2026 (Riset)			- Tersusunnya dokumen hasil kajian peta kbutuhan infastruktur air baku untuk pangan dan prototipe sistem irigasi hemat air kota		
- Inovasi teknologi pertanian perkotaan (Urban Farming 4.0)			- 2027 (Inovasi)			- Terlaksananya model urban farming efisien untuk replikasi di seluruh kecamatan		
- Penganekaragaman pangan berbasis komoditas lokal			- 2027 (Riset)			- Tersusunnya dokumen hasil kajian diversifikasi pangan lokal untuk pasar perkotaan		
- Reformasi investasi pangan & skema pembiayaan inovatif			- 2028 (Inovasi)			- Terlaksananya skema kebijakan investasi pangan yang meningkatkan kemandirian fiskal		
- Efektivitas peningkatan inflasi daerah			- 2029 (Evaluasi)			- Tersusunnya dokumen hasil kajian inflasi daerah Kota Makassar		
- Indkes ketahanan pangan			- 2029 (Evaluasi)			- Tersusunnya dokumen hasil kajian indeks ketahanan pangan		
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja								
Sasaran 1.2.3: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Makassar								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 2:								
Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Belum optimalnya kinerja investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Ketidakpastian pertumbuhan, minimnya stabilitas kebijakan, dan keterbatasan dukungan infrastruktur sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kontribusi Kota Makassar terhadap total investasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan	Indeks daya saing daerah: - (4,17) - Persentase peningkatan nilai investasi daerah (%) – (8,75)	- 1 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Riset	1 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 1 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama DPMPSTSP, Dinas Kominfo
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Ekosistem investasi Kota Makassar - Percepatan pelayanan perizinan ramah investasi terintegrasi - Reformasi dan digitalisasi tata kelola investasi - Efektivitas peningkatan nilai nilai investasi daerah			- 2026 (Riset)	- 2027 (Inovasi)	- 2028 (Riset)	- 2029 (Evaluasi)	- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan faktor pendukung dan penghambat investasi serta daya tarik sektoral - Terlaksananya model percepatan pelayanan perizinan ramah investasi terintegrasi - Tersusunnya dokumen hasil kajian model tata kelola investasi digital Makassar - Tersusunnya dokumen hasil kajian evaluasi pengukuran peningkatan nilai nilai investasi daerah	
Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing								
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan								
Belum optimalnya kualitas pendidikan	Masih rendahnya jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar minimum kemampuan literasi (21,71% Tahun 2023) Masih lemahnya kualitas guru pada beberapa satuan pendidikan Harapan lama sekolah yang hanya menempatkan Kota Makassar pada peringkat 15 dari 514 Kab/Kota di Indonesia (Tahun 2023)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM): - (85,46) - Indeks pendidikan – (82,03)	- 3 Riset	- 3 Inovasi	- 3 Riset	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 6 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Pendidikan, BKPSDMD, Dinas PU

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
	Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (21,91% Tahun 2023)							
	Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dibandingkan daerah lain (73,78% atau kategori memenuhi standar Tahun 2023)							
	Menurunnya angka penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja menurut pendidikan perguruan tinggi							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Analisis kompetensi guru dan kebutuhan pengembangan profesional		- 2026 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan standar kompetensi guru	
- Pemetaan layanan pendidikan dasar dan aksesibilitas		- 2026 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemerataan fasilitas, jarak ke sekolah dan kondisi Sarpras	
- Efektivitas pelaksanaan program bantuan seragam gratis		-2026 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian implementasi program bantuan seragam gratis	
- Implementasi pengembangan kompetensi guru		- 2027 (Inovasi)					- Terlaksananya inovasi pengembangan kompetensi guru	
- Implementasi pengembangan layanan pendidikan dasar dan aksesibilitas		- 2027 (Inovasi)					- Terlaksananya inovasi pengembangan layanan dan aksesibilitas pendidikan	
- Efektivitas pelaksanaan program bantuan seragam gratis		- 2027 (Inovasi)					- Terlaksananya model pendistribusian bantuan seragam gratis	
- Analisis pengaruh kompetensi guru terhadap peningkatan daya tanggap peserta didik		- 2028 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian dampak kompetensi guru terhadap peningkatan daya tanggap peserta didik	
- Analisis pengaruh kualitas layanan pendidikan dasar dan aksesibilitas terhadap kepuasan peserta didik		- 2028 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian dampak kualitas layanan pendidikan dasar dan aksesibilitas terhadap kepuasan peserta didik	
- Efektivitas pengembangan program bantuan seragam gratis		-2028 (Riset)					- Tersusunnya dokumen hasil kajian pengembangan program bantuan seragam gratis	
							- Tersusunnya dokumen hasil survei indeks pendidikan sebagai pengungkit IPM	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Survei indeks pendidikan sebagai pengungkit IPM Kota Makassar			- 2029 (Evaluasi)				Kota Makassar	
Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing								
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan								
Belum optimalnya kualitas kesehatan	Belum maksimalnya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) pada ksala Provinsi Sulsel	Indeks Pembangunan Manusia (IPM): - (85,46) - Usia Harapan Hidup (Tahun) – (75,51)	- 2 Riset - 1 Inovasi	- 1 Riset - 2 Inovasi	- 2 Riset - 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 5 dokumen riset - Terlaksananya 4 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Kesehatan, RSUD, Kelurahan
	Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan akibat terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun), terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4), atau terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun) meningkatnya penemuan kasus Tuberkulosis (TB)							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Penurunan AKI melalui deteksi dini kehamilan berisiko			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penurunan AKI melalui deteksi dini kehamilan berisiko sekaligus model layanan kehamilan berisiko tinggi, integrasi rujukan cepat - Terlaksananya model percepatan penemuan kasus TB dan pemutusan mata rantai penularan - Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub - Terlaksananya model layanan kehamilan berisiko - Tersusunnya dokumen hasil kajian efektivitas penerapan model percepatan penemuan kasus TB dan pemutusan mata rantai penularan - Terlaksanananya model penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai	
- Eliminasi Tuberkulosis dengan Model Case Finding Digital			- 2026 (Inovasi)					
- Penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub			- 2026 (Riset)					
- Implementasi model layanan kehamilan berisiko tinggi, integrasi rujukan cepat			- 2027 (Inovasi)					
- Efektivitas penerapan model percepatan penemuan kasus TB dan pemutusan mata rantai penularan			- 2027 (Riset)					
- Penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub			- 2027 (Inovasi)					

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Implementasi model penguatan Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub - Efektivitas penurunan AKI melalui deteksi dini kehamilan berisiko secara terintegrasi - Peningkatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub - Survei Usia Harapan Hidup (UHH)			- 2028 (Inovasi)				integrated primary health care hub - Terlaksananya model pengembangan penurunan AKI melalui deteksi dini kehamilan berisiko secara terintegrasi - Tersusunnya dokumen hasil kajian penurunan AKI terintegrasi - Tersusunnya dokumen hasil kajian peningkatan Puskesmas dan Posyandu sebagai integrated primary health care hub - Tersusunnya dokumen hasil survei Usia Harapan Hidup (UHH)	
Misi 2: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing								
Sasaran 2.1.3: Meningkatkan daya beli masyarakat								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 3: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan								
Belum optimalnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya angka kemiskinan menjadi 5,07% pada Tahun 2023 (meskipun mengalami penurunan yang tidak signifikan pada Tahun 2024 menjadi 4,97%) Kualitas sumber daya manusia masih rendah sehingga pekerja harus bekerja dengan upah murah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM): - (85,46) - Pengeluaran per kapita (Juta rupiah per kapita/tahun) - (19,301)	- 1 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 1 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Sosial, Diskop UKM, Dinas PU, Distaru, PDAM
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Simplikasi regulasi investasi berbasis analisis beban administratif - Pemodelan pusat keunggulan (Center of Excellence) - Inovasi platform pendampingan UMKM berbasis kecerdasan buatan - Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengeluaran per kapita			- 2026 (Riset)	- 2027 (Inovasi)	- 2028 (Inovasi)	- 2029 (Evaluasi)	- Tersusunnya dokumen hasil kajian simplikasi regulasi investasi berbasis analisis beban administratif - Terlaksananya pemodelan pusat keunggulan - Terlaksananya platform pendampingan UMKM berbasis AI - Tersusunnya dokumen evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pengeluaran per kapita	
Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan								
Sasaran 3.1.1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi								
Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Rendahnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan	Pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur sehingga mengakibatkan banjir dan genangan Pembangunan rumah swadaya yang tidak terkendali sehingga rumah tidak layak huni masih mencapai 8.140 rumah tangga Kondisi akses air minum tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan. Dari total 238.610 Sambungan Rumah (SR) perpipaan, hanya 64,58% atau 84.757 unit yang memenuhi aspek kualitas air minum Masih ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang belum mendapatkan layanan air perpipaan Tantangan di bidang sanitasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat serta kemampuan ekonomi untuk mengikuti penyedotan lumpur tinja secara berkala maksimal 3 tahun sekali dan kurangnya pemeliharaan ipal Kawasan maupun Ipal Komunal Hanya 68,3% dari 161 Ipal yang berfungsi sehingga akses sanitasi aman hanya 8,45%)	Indeks layanan infrastruktur: - (78,69) - Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan – (37,17) - Indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan (51,86) - Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%) – (10%)	- 2 Riset	- 1 Riset - 2 Inovasi	- 1 Riset - 1 Inovasi	3 Evaluasi	- Tersusunnya 4 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 3 dokumen evaluasi	
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan terintegrasi berbasis teknologi, data spasial, dan pemodelan pembiayaan			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pengembangan infrastruktur perkotaan	
- Pendanaan dan kapasitas kelembagaan untuk perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan pendanaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan	
- Konektivitas dan transportasi terintegrasi (TOD & low emission mobility)			- 2027 (Inovasi)				- Terlaksananya model konektivitas dan transportasi secara terintegrasi	
- Pengendalian pemanfaatan ruang dan percepatan RDTR digital			- 2027 (Riset)				- Tersusunnya dokumen riset hasil kajian pengendalian pemanfaatan ruang dan percepatan RDTR digital	
- Penataan permukiman kumuh & pemetaan rumah tidak layak huni			- 2027 (Inovasi)				- Terlaksananya model penataan permukiman kumuh & pemetaan rumah	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Pengelolaan IPAL komunal dan revitalisasi infrastruktur sanitasi - Pemodelan optimalisasi pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi dan lingkungan - Survei Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan - Survei Indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan - Survei Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)			- 2028 (Riset)	- 2028 (Inovasi)	- 2029 (Evaluasi)	- 2029 (Evaluasi)	tidak layak huni - Tersusunnya dokumen hasil kajian model pengelolaan IPAL komunal dan revitalisasi infrastruktur sanitasi - Terlaksananya model optimalisasi pengembangan infrastruktur air minum, sanitasi, dan lingkungan - Tersusunnya dokumen hasil survei Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan - Tersusunnya dokumen hasil survei Indeks layanan infrastruktur keciptakaryaan - Tersusunnya dokumen hasil survei persentase ketersediaan dokumen RDTR	
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya penguasaan IPTEK								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 4: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan								
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik di Kota Makassar yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024) Layanan publik digital masih dihadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem	Indeks inovasi daerah: - (77,59) Indeks kapabilitas inovasi - (4,51)	- 2 Riset	- 2 Inovasi	- 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Kominfo, BKPSDMD
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Integrasi dan interoperabilitas sistem layanan publik - Kesiapan infrastruktur dan keamanan sistem - Implementasi pengembangan dashboard indeks inovasi daerah dan indeks kapabilitas inovasi - Implementasi model pelatihan transportasi digital untuk ASN khususnya inovator			- 2026 (Riset)	- 2026 (Riset)	- 2027 (Inovasi)	- 2027 (Inovasi)	- Tersusunnya dokumen hasil kajian model integrasi dan interoperabilitas sistem layanan publik - Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan kesiapan infrastruktur dan keamanan sistem - Terlaksananya model pengembangan dashboard indeks inovasi daerah dan indeks kapabilitas inovasi - Terlaksananya model pelatihan transportasi digital untuk ASN khususnya inovator	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Pemanfaatan TIK untuk layanan publik ramah warga - Pengukuran indeks kapabilitas inovasi			- 2028 (Inovasi)				- Terlaksananya model optimalisasi pemanfaatan TIK untuk layanan publik ramah warga - Tersusunnya dokumen hasil survei indkes kapabilitas inovasi	
			- 2029 (Evaluasi)					
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kuantitas inovasi seluruh bidang pembangunan								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 5: Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal								
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik di Kota Makassar yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024) Layanan publik digital masih diperhadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem	Indeks inovasi daerah: - (77,59) - Persentase peningkatan inovasi pembangunan daerah (%) – (103 Inovasi)	- 2 Riset	- 2 Inovasi	- 1 Riset	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 3 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama seluruh OPD
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Potensi inovasi sektor seni dan ekonomi kreatif untuk pariwisata - Penguatan regulasi transformasi digital dan inovasi daerah - Pengembangan pusat inovasi dan laboratorium inovasi daerah - Pemanfaatan inovasi dalam pembangunan daerah - Kepuasan dan pengalaman pengguna terhadap layanan - Survei peningkatan inovasi yang berdampak terhadap pembangunan daerah			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan dan pengembangan potensi inovasi sektor seni dan ekonomi kreatif untuk pariwisata - Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan regulasi transformasi digital dan inovasi daerah	
			- 2026 (Riset)					
			- 2027 (Inovasi)				- Terlaksananya pengembangan pusat inovasi dan laboratorium inovasi daerah - Terlaksananya model pemanfaatan inovasi dalam pembangunan daerah	
			- 2027 (Inovasi)					
			- 2028 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian kepuasan dan pengalaman pengguna terhadap layanan - Tersusunnya dokumen hasil survei peningkatan inovasi yang berdampak terhadap pembangunan daerah	
			- 2029 (Evaluasi)					
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.2.1: Meningkatnya jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 5: Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik di Kota Makassar yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024)	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB (%): - (2,23%) - Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara (Orang) – (5.626.657 Orang) - Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) – (1,63 Hari)	- 1 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Riset	- 1 Riset	- Tersusunnya 3 dokumen riset - Terlaksananya 1 inovasi	BRIDA bersama Dinas Pariwisata, Diskop UKM, Disperindag, Dinas Kominfo
	Layanan publik digital masih diperhadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Kurasi daya tarik wisata dan pemetaannya dalam basis data terpadu - Revitalisasi kawasan wisata kota berbasis perilaku pengunjung - Pengembangan paket wisata kuliner tematik dan model konektivitas destinasi - Dampak digitalisasi terhadap PDRB sektor kuliner dan kunjungan wisatawan			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan daya tarik wisata dalam basis data terpadu - Terlaksananya model pengembangan kawasan wisata kota berbasis perilaku pengunjung - Terlaksananya model pengembangan paket wisata kuliner tematik dan model konektivitas destinasi - Tersusunnya dokumen hasil kajian penguuran dampak digitalisasi terhadap PDRB sektor kuliner dan kunjungan wisatawan	
			- 2027 Inovasi)					
			- 2028 (Inovasi)					
			- 2029 (Riset)					
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.2.2: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian budaya								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 5: Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal								
Pelayanan publik belum maksimal menerapkan layanan berbasis digital	Layanan publik yang berbasis digital baru mencapai 49% dari layanan publik online yang tersedia (Tahun 2024)	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB (%): - (2,23%) - Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam warisan budaya tak benda (%) – (33,3%) - Persentase cagar budaya	- 1 Riset - 2 Inovasi	- 2 Inovasi	- 2 Riset	- 1 Riset	- Tersusunnya 4 dokumen riset - Terlaksananya 4 inovasi	BRIDA bersama Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfo, Disperindag, Diskop UKM
	Layanan publik digital masih diperhadapkan pada kendala integrasi dan interoperabilitas sistem							

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
		yang dilindungi dan dimanfaatkan (%) – (12)						
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Kebutuhan digitalisasi layanan kebudayaan dan pariwisata			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian kebutuhan digitalisasi layanan kebudayaan dan pariwisata - Terlaksananya model pengembangan Makassar Cultural & Tourism Data Hub - Terlaksananya model inventarisasi & digitalisasi warisan budaya tak benda - Terlaksananya model pengembangan platform partisipasi budaya berbasis komunitas - Tersusunnya dokumen kajian model pemberdayaan generasi muda dalam pelestarian budaya - Tersusunnya dokumen hasil kajian dampak ekonomi industri kreatif berbasis budaya lokal	
- Pengembangan Makassar Cultural & Tourism Data Hub			- 2027 (Inovasi)					
- Inventarisasi & digitalisasi warisan budaya tak benda			- 2027 (Inovasi)					
- Pengembangan platform partisipasi budaya berbasis komunitas			- 2028 (Riset)					
- Model pemberdayaan generasi muda dalam pelestarian budaya			- 2028 (Riset)					
- Dampak ekonomi industri kreatif berbasis budaya lokal			- 2029 (Riset)					
Misi 4: Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata								
Sasaran 4.2.3: Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 5: Meningkatkan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal								
Masih rendahnya koperasi yang memenuhi kriteria aktif	Lemahnya manajemen koperasi, seperti kurangnya partisipasi anggota atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB (%):- (2,23%) - Jumlah industri ekonomi kreatif yang aktif – (4.515) - Persentase industri ekonomi kreatif yang memanfaatkan platofrm digital (%) – (12,44%)	- 1 Riset	- 1 Riset	- 2 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Diskop UKM, Disperindag, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Ekosistem dan manajemen koperasi			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan ekosistem dan manajemen koperasi	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Kapasitas SDM kreatif dan desain model pengembangannya - Model digitalisasi ekonomi kreatif - Model pengembangan jejaring dan kemitraan ekonomi kreatif - Evaluasi pengaruh kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB			- 2027 (Riset) - 2028 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian model pengembangan kapasitas SDM kreatif - Terlaksananya model digitalisasi ekonomi kreatif - Terlaksananya model pengembangan jejaring dan kemitraan ekonomi kreatif - Tersusunnya dokumen hasil evaluasi pengaruh kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap PDRB	
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertriban umum								
Sasaran 5.1.1: Meningkatnya akuntabilitas, integritas, dan adaptivitas pemerintahan daerah								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 6: Transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital								
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang belum adaptif dan integratif	Menurunnya Indeks survei penilaian integritas Kota Makassar dari tahun sebelumnya menjadi 62,33 (Tahun 2024) sehingga Pemerintah Kota Makassar secara umum memiliki keberadaan korupsi dan risiko korupsi yang tinggi	Indeks reformasi birokrasi: - (79,97%) - Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah – (69,75) - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (%) – (4,02%) - Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK – (87,48%)	- 2 Riset	- 1 Riset - 1 Inovasi	- 2 Inovasi	- 2 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 2 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Inspektorat, Bagian Ortala, Dinas Kominfo
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang belum berjalan optimal (Nilai IRB 76,78 atau kategori baik pada Tahun 2024) karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya berAKHLAK belum optimal, dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan							
	Penurunan Indeks Maturitas SPIP (Hanya 3,100 pada Tahun 2024) karena pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, manajemen risiko pemerintah Kota Makassar juga belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan							

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
	Penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar selama kurun waktu 3 tahun terakhir (3,21 pada Tahun 2024) Keterlambatan adopsi teknologi digital dalam sistem pemerintahan dan kurangnya integrasi data serta sistem antar-perangkat daerah (hanya 21 dari 43 atau sekitar 49% layanan publik daring pada Tahun 2024)							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan dan pengembangan reformasi birokrasi dan integritas - Tersusunnya dokumen hasil kajian penerapan digitalisasi pemerintahan - Terlaksananya model penguatan pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko - Terlaksananya model penguatan kapabilitas dan budaya digital ASN - Terlaksananya model pengintegrasian layanan dan peningkatan indeks pelayanan publik - Tersusunnya dokumen hasil kajian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Tersusunnya dokumen hasil survei indeks SPBE	
- Reformasi birokrasi dan integritas			- 2026 (Riset)					
- Efektivitas penerapan digitalisasi pemerintahan (SPBE dan Super Apps)			- 2027 (Riset)					
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko			- 2027 (Inovasi)					
- Penguatan kapabilitas dan budaya digital ASN			- 2028 (Inovasi)					
- Integrasi layanan dan peningkatan indeks pelayanan publik			- 2028 (Inovasi)					
- Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			- 2029 (Evaluasi)					
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			- 2029 (Evaluasi)					
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertriban umum								
Sasaran 5.2.1: Meningkatkan kualitas keamanan masyarakat								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 7: Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi								
Sistem hukum dan keamanan ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin	Masih tingginya jumlah tindak kriminalitas (4.195) kasus pada Tahun 2023 dan angka kriminalitas sebesar 287 tindakan kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar) karena arus urbanisasi yang belum sepenuhnya terkendali serta belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: - (75) - Persentase tindak kriminal yang ditangani (%) - (55,03%)	- 2 Riset	- 1 Riset - 1 Inovasi	- 1 Riset - 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 4 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Satpol PP, Kesbangpol, Dinas DP3A, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
kepastian hukum dan rasa aman masyarakat	penanganan pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda							
	Masih rendahnya keterwakilan perempuan terpilih terhadap anggota DPRD Kota Makassar (Hanya 26% yang seharusnya 30% menurut aturan secara nasional) yang diakibatkan faktor struktural, kultural, dan institusional							
	Masih rendahnya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD (Tahun 2022 tidak ada satu pun Perda inisiatif DPRD, sementara Tahun 2023 hanya 5 dari 10 Perda Inisiatif yang diundangkan							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Pemetaan pola kriminalitas berbasis data spasial - Efektivitas sistem keamanan lingkungan berbasis RT/RW - Survei indeks kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar - Model inovasi hukum berbasis komunitas dan media digital - Penyusunan dan penguatan produk hukum daerah model pelaporan warga terintegrasi - Model penguatan harmonisasi, kolaborasi, dan ruang publik aman - Pengukuran persentase tindak kriminal yang ditangani			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan pola kriminalitas berbasis data spasial - Tersusunnya dokumen hasil kajian sistem keamanan lingkungan berbasis RT/RW - Tersusunnya dokumen hasil kajian survei indeks kesadaran hukum masyarakat - Terlaksananya model pengembangan inovasi hukum berbasis komunitas dan media digital - Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan produk hukum daeran dan model pelaporan warga secara terintegrasi - Terlaksananya model penguatan harmonisasi, kolaborasi, kolaborasi, dan ruang publik aman - Tersusunnya dokumen hasil kajian p Pengukuran persentase tindak kriminal yang ditangani	
			- 2026 (Riset)					
			- 2027 (Riset)					
			- 2027 (Inovasi)					
			- 2028 (Riset)					
			- 2028 (Inovasi)					
			- 2029 (Evaluasi)					
Misi 5: Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertriban umum								
Sasaran 5.2.2: Meningkatnya kualitas toleransi dalam bermasyarakat								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 7: Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi								

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
Masih rendahnya implementasi beragama masalah dan kurang berkembangnya kebudayaan maju	Masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Makassar (4,363 pada Tahun 2024 dan masuk kategori 10 kota dengan toleransi terendah)	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum: - (75) - Indeks kota toleran – (4,688)	- 1 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 1 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama BPKAD, Dinas Sosial, Kesbangpol
	Kurangnya alokasi anggaran dalam mendukung beragama masalah							
	Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Diagnostik toleran dan potensi konflik sosial - Model sistem deteksi dini konflik berbasis teknologi - Model fasilitasi kegiatan keagamaan yang inklusif - Survei indeks kota toleran			- 2026 (Riset) - 2027 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan faktor penyebab rendahnya toleran dan tingginya potensi konflik - Terlaksananya model sistem deteksi dini konflik berbasis teknologi - Terlaksananya model fasilitasi kegiatan keagamaan yang inklusif - Tersusunnya dokumen hasil survei indeks kota toleran	
Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga								
Sasaran 6.1.1: Menurunnya ketimpangan gender								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 8:								
Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan								
Masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda	Masih tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (2.030 kasus perceraian dan 504 kasus kekerasan pada Tahun 2023)	Indeks pembangunan keluarga: - (63,14) - Indeks ketimpangan gender – (0,179)	- 2 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas P3A, Bagian Hukum, Seluruh Kecamatan
	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional (Hak sipil dan kebebasan dengan nilai 47,32 dan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 39,64)							
	Indeks Ketimpangan Gender (IGD) berada di bawah angka nasional dan provinsi (0,188). Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah dan keterwakilan							

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
	perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Pemetaan ketimpangan gender			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan ketimpangan gender	
- Efektivitas penanganan KDRT dan perceraian			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penanganan KDRT dan perceraian	
- Model layanan bantuan hukum terintegrasi			- 2027 (Inovasi)				- Terlaksananya model layanan bantuan hukum secara terintegrasi	
- Model monitoring kekerasan berbasis gender			- 2028 (Inovasi)				- Terlaksananya model monitoring kekerasan berbasis gender	
- Survei indeks ketimpangan gender			- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil survei indeks ketimpangan gender	
Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga								
Sasaran 6.1.2: Meningkatnya kualitas perlindungan anak								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 8:								
Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan								
Masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan perlindungan anak, pembangunan pemuda	Masih tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (2.030 kasus perceraian dan 504 kasus kekerasan pada Tahun 2023) Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional (Hak sipil dan kebebasan dengan nilai 47,32 dan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 39,64) Indeks Ketimpangan Gender (IGD) berada di bawah angka nasional dan provinsi (0,188). Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%	Indeks pembangunan keluarga: - (63,14) Indeks perlindungan anak - (69,44)	- 1 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 1 Evaluasi	- Tersusunnya 1 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 1 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas P3A, Dinas Sosial
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Penguatan sistem perlindungan anak berbasis hak			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan sistem perlindungan anak berbasis hak	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Model pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak			- 2027 (Inovasi)				- Terlaksananya inovasi model pencegahan kekerasan anak dan eksploitasi anak	
- Model peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan anak			- 2028 (Inovasi)				- Terlaksananya inovasi model peningklatan partisipasi dan pendidikan anak	
- Survei indeks perlindungan anak			- 2029 (Evaluasi)				- Tersusunnya dokumen hasil survei indeks perlindungan anak	
Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga								
Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 8:								
Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan								
Masih tingginya ketimpangan gender serta masih belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda	Masih tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (2.030 kasus perceraian dan 504 kasus kekerasan pada Tahun 2023) Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional (Hak sipil dan kebebasan dengan nilai 47,32 dan klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan nilai 39,64) Indeks Ketimpangan Gender (IGD) berada di bawah angka nasional dan provinsi (0,188). Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%	Indeks pembangunan keluarga: - (63,14) - Indeks pembangunan pemuda – (59,00) - Indeks pembangunan keolahragaan – (0,497)	- 2 Riset	- 1 Evaluasi	- 1 Inovasi	- 2 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 2 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dispora, Diskop UKM, Disnaker
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Efektivitas pembangunan pemuda berbasis daya saing			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian efektivitas pembangunan pemuda berbasis daya saing	
- Pemetaan kesiapan infrastruktur dan ekosistem keolahragaan			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan kesiapan infrastruktur dan ekosistem keolahragaan	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Model penguatan prestasi dan talenta olahraga - Model pengembangan kewirausahaan dan peluang kerja layak bagi pemuda - Survei indeks pembangunan pemuda - Survei indeks pembangunan keolahragaan			- 2027 (Inovasi)	- 2028 (Inovasi)	- 2029 (Evaluasi)	- 2029 (Evaluasi)	- Terlaksananya model penguatan prestasi dan talenta olahraga - Terlaksananya inovasi model pengembangan kewirausahaan dan peluang kerja layak bagi pemuda - Tersusunnya dokumen hasil survei indeks pembangunan pemuda - Tersusunnya dokumen hasil survei indeks pembangunan keolahragaan	
Misi 6: Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga								
Sasaran 6.2.1: Menurunnya disparitas pendapatan Sasaran 6.2.2: Meningkatnya perlindungan bagi penyandang disabilitas								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 8: Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan								
Pendapatan perkapita yang tidak merata	Terdapat tiga lapangan usaha utama (sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengolahan, dan sektor konstruksi) yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar telah konsisten menciptakan lapangan pekerjaan, namun sebagian besar posisi berada ditingkat buruh dengan upah minimum yang rendah Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi Beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan	Tingkat kemiskinan (%): - (3,62%-3,03%) - Gini rasio – (0,366) - Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) – (41,81%)	- 2 Riset	- 1 Inovasi	- 1 Inovasi	- 2 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 2 inovasi - Tersusunnya 2 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Sosial, Bappeda, Bagian Hukum

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
	upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Pemetaan kesenjangan upah dan struktur pekerjaan di sektor PDRB			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian pemetaan kesenjangan upah dan struktur pekerjaan di sektor PDRB - Tersusunnya dokumen hasil kajian terkait pengembangan sistem profiling penyandang disabilitas untuk penempatan tenaga kerja - Terlaksananya inovasi model pengembangan jaminan sosial bagi buruh dan pekerja rentan - Terlaksananya model pendampingan dan bantuan hukum secara terintegrasi bagi kelompok rentan - Tersusunnya dokumen hasil survei gini rasio - Tersusunnya dokumen hasil survei persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	
- Pengembangan sistem profiling penyandang disabilitas untuk penempatan tenaga kerja			- 2026 (Riset)					
- Model pengembangan jaminan sosial bagi buruh dan pekerja rentan			- 2027 (Inovasi)					
- Pengembangan model pendampingan dan bantuan hukum terintegrasi bagi kelompok rentan			- 2028 (Inovasi)					
- Survei gini rasio			- 2029 (Evaluasi)					
- Survei persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal			- 2029 (Evaluasi)					
Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 9: Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim								
Rendahnya kualitas lingkungan hidup Kota Makassar	Terjadinya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi secara pesat	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH): - (66,17) - Indeks kualitas air – (73,95) - Indeks kualitas udara – (75,22) - Indeks kualitas tumpahan lahan (36,06) - Timbuan sampah yang terolah difasilitasi pengolahan sampah – (6%)	- 2 Riset	- 2 Inovasi	- 1 Inovasi	- 3 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 3 inovasi - Tersusunnya 3 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas PU, DLH, Bappeda, Distaru
	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun menjadi 74,92 (Tahun 2024)							
	Belum maksimalnya pengelolaan sampah (rata-rata hanya 2,01% sampah yang terolah di fasilitas, dan menurunnya jumlah bank sampah aktif)							
	Massifnya pembangunan infrastruktur mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir							
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Penguatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular			- 2026 (Riset)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan pengelolaan sampah berbasis	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Pengendalian pencemaran udara dan air berbasis sensor real-time - Implementasi model pertumbuhan kota dan dampaknya terhadap lingkungan - Model pengembangan ruang terbuka hijau adaptif perubahan iklim - Optimalisasi bank sampah dan TPS3R - Indeks kualitas air - Indeks kualitas udara - Indeks kualitas tumpahan lahan - Timbuan sampah yang terolah difasilitasi pengolahan sampah		- 2026 (Riset) - 2027 (Inovasi) - 2027 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2029 (Evaluasi) - 2029 (Evaluasi) - 2029 (Evaluasi) - 2029 (Evaluasi)					ekonomi sirkular - Tersusunnya dokumen hasil kajian pengendalian pencemaran udara dan air berbasis sensor real-time - Terlaksananya model pertumbuhan kota dan dampaknya terhadap lingkungan - Terlaksananya model pengembangan ruang terbuka hijau adaptif perubahan iklim - Terlaksananya model optimalisasi bank sampah dan TPS3R - Tersusunnya dokumen hasil pengukuran indeks kualitas air - Tersusunnya dokumen hasil pengukuran kualitas udara - Tersusunnya dokumen hasil pengukuran indeks kualitas tumpahan lahan - Tersusunnya dokumen hasil kajian timbunan sampah yang terolah difasilitasi pengolahan sampah	
Misi 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
Sasaran 7.2.1: Meningkatnya kapasitas penanganan bencana dan adaptasi perubahan iklim								
Program Walikota Terpilih (9 Program Strategis) 9: Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim								
Masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan biru	Masih lemahnya industri pengolahan maritim Belum optimalnya pengelolaan lingkungan laut Penanganan sampah yang belum terintegrasi Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kualitas air yang perlu ditingkatkan	Indeks risiko bencana: - (110) - Indeks ketahanan daerah – (0,47) - Penurunan intensitas emisi GRK (%) – (32,46)	- 2 Riset	- 2 Inovasi	- 3 Inovasi	- 2 Evaluasi	- Tersusunnya 2 dokumen riset - Terlaksananya 4 inovasi - Tersusunnya 2 dokumen evaluasi	BRIDA bersama Dinas Perikanan dan Kelautan, DLH, Dinas PU, Dinas Kominfo
Kegiatan/Sub Kegiatan:								
- Penguatan industri pengolahan maritim berbasis ekonomi biru - Kualitas lingkungan laut dan pencegahan pencemaran - Model penanganan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir			- 2026 (Riset) - 2026 (Riset) - 2027 (Inovasi)				- Tersusunnya dokumen hasil kajian penguatan industri pengolahan maritim berbasis ekonomi biru - Tersusunnya dokumen hasil kajian kualitas lingkungan laut dan pencemaran - Terlaksananya model pengembangan	

Permasalahan		Indikator Kinerja Utama	Target (Tahun)				Sasaran Akhir	Perangkat Daerah Terkait
Masalah Pokok	Akar Masalah		2026	2027	2028	2029		
- Model pengembangan infrastruktur untuk ketahanan banjir dan adaptasi iklim - Model pengembangan ketangguhan sosial dan edukasi iklim berbasis komunitas - Model pengurangan emisi GRK melalui transportasi rendah karbon - Model pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi adaptif - Survei indeks ketahanan daerah - Survei penurunan intensitas emisi (GRK)			- 2027 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2028 (Inovasi) - 2029 (Evaluasi) - 2029 (Evaluasi)				sistem sensor <i>smart bin</i> untuk pemantauan volume sampah secara real-time	
							- Terlaksananya model RTH adaptif iklim sebagai penyerap karbon kota (urban carbon sink model)	
							- Terlaksananya model pengembangan ketangguhan sosial dan edukasi iklim berbasis komunitas	
							- Terlaksananya model pengurangan emisi GRK melalui transportasi rendah karbon	
							- Terlaksananya model pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi adaptif	
							- Tersusunnya dokumen hasil pengukuran indeks ketahanan daerah	
							- Tersusunnya dokumen hasil pengukuran penurunan intensitas emisi (GRK)	

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

B. Program dan Target Tahunan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Program Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah diarahkan untuk menjadikan riset bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak solusi dan daya saing daerah. Melalui program ini, pemerintah daerah memperkuat tata kelola riset dan inovasi mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, pendanaan, sampai kemitraan multipihak, sehingga dapat terus dikembangkan dan permasalahan prioritas seperti banjir, kemacetan, pengangguran, kemiskinan, kualitas layanan dasar, serta kerentanan lingkungan dapat ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Ekosistem riset dan inovasi yang dimaksud mencakup keterhubungan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Secara substansi, program ini mencakup beberapa rumpun kegiatan yakni penguatan regulasi dan perencanaan riset daerah (*roadmap* dan agenda riset prioritas), pengembangan infrastruktur data dan laboratorium hidup (*living lab*), fasilitasi riset terapan dan inovasi yang langsung menjawab kebutuhan daerah, inkubasi dan hilirisasi produk unggulan daerah, serta penguatan budaya riset dan inovasi di kalangan OPD dan masyarakat. Di sisi lain, program ini juga memastikan bahwa hasil riset dan inovasi terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga rekomendasi ilmiah bertransformasi menjadi program dan kegiatan nyata di lapangan, bukan berhenti pada laporan.

Target tahunan program disusun secara bertahap dan berjenjang. Pada tahun-tahun awal, fokus diarahkan pada penyusunan kebijakan dan *roadmap* riset dan inovasi daerah, pemetaan permasalahan prioritas, pembentukan atau penguatan kelembagaan riset (misalnya BRIDA) serta inventarisasi dan integrasi data yang relevan. Pada fase berikutnya, target tahunan bergeser ke peningkatan jumlah dan kualitas riset terapan yang langsung menysasar isu prioritas (misalnya riset banjir perkotaan, transportasi, sanitasi, UMKM, *smart island*), pengembangan *pilot project* di

lokasi sasaran, dan mulai bergulirnya skema pendanaan inovatif seperti matching fund atau kemitraan dengan sektor swasta.

Memasuki tahun-tahun selanjutnya, target tahunan ditingkatkan pada aspek hilirisasi dan replikasi. Hal ini tercermin dari jumlah inovasi yang diadopsi menjadi kebijakan atau program OPD, jumlah produk unggulan daerah yang berhasil dikembangkan hingga tahap komersial atau layanan publik, serta meluasnya kemitraan riset dan inovasi lintas sektor. Pada tahap ini, indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya riset yang dihasilkan, tetapi juga dari dampak yang nyata terhadap penurunan permasalahan prioritas (misalnya berkurangnya titik genangan, membaiknya akses transport, meningkatnya pendapatan pelaku usaha, atau membaiknya akses sanitasi dan layanan dasar).

Pada akhirnya, melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang terencana dan bertahap dengan target tahunan yang jelas, daerah diharapkan mampu membangun siklus kebijakan yang lebih cerdas seperti masalah prioritas diidentifikasi berbasis data, dijawab melalui riset dan inovasi, diujicobakan melalui pilot project, diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program, kemudian dievaluasi kembali berdasarkan bukti. Siklus inilah yang menjadikan penyelesaian permasalahan prioritas daerah tidak bersifat sporadis dan reaktif, tetapi berjalan secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 7. 2 Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Kota Makassar
Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset infrastruktur (transportasi, drainase, sanitasi, perumahan, smart island) yang fokus pada solusi banjir, kemacetan dan ketimpangan layanan.	Tersusunnya Roadmap riset infrastruktur	2025–2026	Tersedia landasan kebijakan riset infrastruktur untuk penanganan permasalahan prioritas kota.	Lead: BRIDA, Bappeda. Support: Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan pemodelan jaringan jalan, drainase dan tata ruang bagi OPD teknis serta fasilitasi riset terapan integrasi tata guna lahan, drainase dan transportasi.	Jumlah pelatihan/peserta Jumlah riset terapan yang dihasilkan.	2025–2028	OPD teknis mampu menggunakan hasil riset dan model untuk merancang infrastruktur yang adil dan adaptif.	Lead: BRIDA, BKPSDM. Support: Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, perguruan tinggi.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk SLR dan pemodelan banjir/genangan serta perencanaan transport publik (RILLAJ, TATRALOK).	Jumlah riset kolaboratif yang mendukung penanganan banjir dan kemacetan.	2026–2029	Basis pengetahuan ilmiah yang kuat untuk menetapkan lokasi dan jenis intervensi infrastruktur prioritas.	Lead: BRIDA. Support: Dinas PU, Dinas Perhubungan, perguruan tinggi.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Kompetisi desain infrastruktur hijau (taman resapan, bio swale, green corridor) dan merancang solusi transport (rute angkutan umum, parkir, wayfinding).	Jumlah desain/solusi yang diajukan Jumlah inovasi yang diadopsi.	2025–2029	Muncul solusi kreatif dari profesional dan komunitas untuk mengurangi banjir, kemacetan dan meningkatkan kualitas ruang.	Lead: Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. Support: BRIDA, asosiasi profesi, komunitas IT.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset ke dalam revisi RTRW, RDTR, RILLAJ dan program penanganan permukiman kumuh serta penyelenggaraan forum sinkronisasi tahunan riset, perencanaan dan penganggaran.	Jumlah dokumen yang mengacu hasil riset Jumlah forum sinkronisasi dan tindak lanjutnya.	2026–2029	Pembangunan infrastruktur dan pengaturan ruang kota konsisten dengan bukti ilmiah dan mengurangi kesenjangan wilayah.	Lead: Bappeda, BRIDA. Support: Dinas PU, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup.
	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi prinsip terwujudnya sistem infrastruktur kota yang tangguh iklim, berbasis ekosistem, dan menjamin akses sanitasi yang aman dan inklusif bagi seluruh warga dalam agenda riset dan program infrastruktur serta benchmarking ke kota yang berhasil mengelola banjir dan transport publik.	Jumlah program/kebijakan yang mengadopsi prinsip global Jumlah kegiatan benchmarking/kerja sama teknis.	2025–2029	Makassar bergerak menuju kota yang tangguh iklim dan berkeadilan akses infrastruktur.	Lead: Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup. Support: BRIDA, Bappeda, Dinas Perhubungan, bagian kerja sama.

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk pulau-pulau kecil dan kawasan heritage.	Ditetapkannya roadmap riset pariwisata dan ekonomi kreatif	2025–2026	Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif terarah untuk mendorong ekonomi lokal dan lapangan kerja.	Lead: Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Support: BRIDA, Bappeda.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan pengelola destinasi, kurator dan pelaku seni dalam penggunaan data dan riset pasar serta pendampingan komunitas kreatif.	- Jumlah pelatihan dan peserta - Jumlah destinasi yang didampingi.	2025–2028	Pengelola destinasi mampu mengelola berbasis data pengunjung dan preferensi pasar sehingga lebih kompetitif.	Lead: Dinas Pariwisata. Support: Dinas Kebudayaan, BRIDA.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset pengalaman pengunjung, pola belanja wisatawan dan pelestarian budaya serta kerja sama dengan platform digital promosi.	- Jumlah riset kolaboratif - Jumlah kampanye digital dan peningkatan kunjungan.	2026–2029	Terbentuk jejaring inovasi yang menghubungkan riset, komunitas seni dan pelaku wisata.	Lead: Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Support: BRIDA, pelaku industri, perguruan tinggi.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan festival inovasi seni dan budaya bertema solusi kota serta program creative grant bagi seniman dan komunitas.	- Jumlah festival/event - Jumlah karya yang mengangkat isu prioritas.	2025–2029	Seni dan budaya menjadi medium edukasi dan advokasi penyelesaian masalah prioritas kota (sampah, banjir, ruang publik).	Lead: Dinas Kebudayaan. Support: Dinas Pariwisata, BRIDA, komunitas.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi hasil riset dan data pengunjung ke dalam perencanaan infrastruktur destinasi (aksesibilitas, transportasi, sanitasi, ruang publik).	Jumlah destinasi yang infrastrukturnya disesuaikan berdasarkan riset.	2026–2029	Koridor wisata berkembang selaras dengan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan warga lokal.	Lead: Bappeda, Dinas Pariwisata. Support: Dinas Perhubungan, Dinas PU, Dinas Perkim.
	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Benchmarking ke kota kreatif dunia dan pengembangan paket wisata tematik (<i>smart island, eco tourism, heritage</i>).	- Jumlah kegiatan benchmarking - Jumlah paket wisata tematik yang dikembangkan.	2025–2029	Makassar diakui sebagai pusat inovasi budaya dan pariwisata di tingkat regional/nasional.	Lead: Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Support: BRIDA, bagian kerja sama.
Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum (SPBE, reformasi birokrasi, layanan terpadu, pengawasan internal) serta penguatan arsitektur data layanan publik.	Ditetapkannya roadmap riset tata kelola dan ketertiban umum	2025–2026	Tersedia arah kebijakan riset inovasi tata kelola sebagai dasar peningkatan kualitas layanan, integritas dan ketertiban umum.	Lead: BRIDA, Bappeda, Bagian Organisasi. Support: Inspektorat, Diskominfo, Satpol PP, Dukcapil.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan PPRB-SPBE, manajemen kinerja berbasis data, audit berbasis risiko, dan desain ulang proses bisnis layanan publik.	Jumlah pelatihan/peserta Jumlah prototipe perbaikan proses layanan.	2025–2028	ASN/OPD mampu menerapkan perbaikan layanan berbasis data dan inovasi proses.	Lead: BRIDA, BKPSDM. Support: Inspektorat, Bagian Organisasi,

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
						Diskominfo, OPD layanan publik.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Kolaborasi dengan perguruan tinggi/mitra teknologi untuk riset kepuasan layanan, analitik pengaduan warga, dan inovasi penegakan perda berbasis teknologi.	Jumlah riset kolaboratif Jumlah solusi digital/analitik yang diujicoba.	2026–2029	Basis bukti dan teknologi mendukung layanan publik cepat, transparan, dan penegakan ketertiban yang presisi.	Lead: BRIDA, Diskominfo. Support: Inspektorat, Satpol PP, perguruan tinggi, mitra swasta.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Kompetisi/ajang inovasi layanan publik dan ketertiban umum	Jumlah inovasi yang diajukan Jumlah inovasi yang diadopsi OPD.	2025–2029	Budaya inovasi layanan dan integritas tumbuh di kalangan ASN.	Lead: Bagian Organisasi, BRIDA. Support: Inspektorat, Diskominfo, seluruh OPD.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi rekomendasi riset tata kelola ke dalam RKPD/Renja OPD dan forum sinkronisasi tahunan inovasi layanan anggaran pengawasan.	Persentase program tata kelola yang mengacu pada hasil riset Jumlah forum & tindak lanjut.	2026–2029	Program reformasi birokrasi dan layanan publik konsisten dengan bukti dan lebih efektif.	Lead: Bappeda, BRIDA. Support: Inspektorat, Bagian Organisasi, Diskominfo.
	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi praktik global open government, GovTech, dan anti-corruption compliance serta benchmarking ke kota dengan layanan digital unggul.	Jumlah kebijakan/program yang mengadopsi praktik global Jumlah benchmarking/kerja sama teknis.	2025–2029	Tata kelola Makassar lebih adaptif, akuntabel, dan berdaya saing.	Lead: Diskominfo, Inspektorat, Bappeda. Support: BRIDA, Bagian Kerja Sama, Bagian Organisasi.
Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset inklusi sosial (Perlindungan perempuan dan anak, disabilitas, pemuda dan olahraga), penguatan data terpilah gender, disabilitas, dan standar layanan ramah anak/disabilitas.	Ditetapkannya roadmap riset inklusi sosial Berfungsinya basis data terpilah.	2025–2026	Arah kebijakan riset inklusi sosial tersedia sebagai dasar intervensi perlindungan dan pemberdayaan.	Lead: DP3A, BRIDA, Bappeda. Support: Dinsos, Disdik, Dispora, Diskominfo.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan layanan responsif gender dan disabilitas, manajemen kasus kekerasan, desain fasilitas universal, serta penguatan pelatih/komunitas olahraga berbasis data.	Jumlah pelatihan/peserta Jumlah SOP/alat ukur layanan yang diterapkan.	2025–2028	Layanan Perlindungan perempuan dan anak - disabilitas lebih responsif dan program kepemudaan-olahraga lebih tepat sasaran.	Lead: DP3A, BKPSDM. Support: Dinsos, Dispora, Disdik, perguruan tinggi.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Kolaborasi kampus/LSM/komunitas disabilitas untuk riset akses layanan, desain ruang publik	Jumlah riset kolaboratif Jumlah pilot program inklusi.	2026–2029	Terbentuk jejaring inovasi inklusi sosial yang melahirkan model layanan dan ruang publik ramah semua.	Lead: DP3A, BRIDA. Support: Dinsos, Dispora, Disdik, komunitas/LSM.

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
		inklusif, serta model pemberdayaan pemuda.				
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Festival/kompetisi inovasi sosial dan olahraga inklusif Kampanye kota ramah anak dan disabilitas.	Jumlah event/partisipasi Jumlah inovasi kampanye/program yang diadopsi.	2025–2029	Budaya inklusi sosial dan anti-kekerasan menguat di masyarakat dan ASN.	Lead: DP3A, Dispora. Support: Dinsos, Disdik, BRIDA, komunitas.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi rekomendasi riset ke program kota layak anak, perlindungan disabilitas, pemberdayaan pemuda dan pengembangan sarana olahraga.	Persentase program inklusi yang mengacu pada hasil riset Jumlah forum koordinasi dan tindak lanjut.	2026–2029	Intervensi PPA-disabilitas-pemuda lebih terarah dan terukur dampaknya.	Lead: Bappeda, DP3A. Support: Dispora, Dinsos, Disdik, BRIDA.
	Elemen Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Penyelarasan agenda dengan SDGs dan benchmarking kota ramah anak/disabilitas.	Jumlah agenda yang diselaraskan Jumlah benchmarking/kerja sama.	2025–2029	Makassar bergerak menuju kota inklusif dengan ekosistem pemuda dan olahraga yang sehat.	Lead: DP3A, Dispora, Bappeda. Support: BRIDA, Bagian Kerja Sama.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi bencana	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset lingkungan dan kebencanaan (sampah, kualitas air/udara, RTH, banjir-genangan, pesisir/laut) dan penguatan basis data risiko	Ditetapkannya roadmap riset lingkungan bencana Berfungsinya basis data risiko dan lingkungan.	2025–2026	Landasan riset dan data tersedia untuk intervensi lingkungan dan mitigasi berbasis bukti.	Lead: DLH, BRIDA, Bappeda. Support: Dinas PU, Disdamkar/BPBD bila ada, Dishub, Dinas Perkim, Diskominfo.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan inventarisasi emisi, auditing bank sampah, pemodelan genangan/banjir, serta penerapan Nature-Based Solutions.	Jumlah pelatihan/peserta Jumlah kajian teknis terapan.	2025–2028	OPD mampu menerapkan pendekatan mitigasi dan pengelolaan lingkungan modern.	Lead: BRIDA, BKPSDM, DLH. Support: Dinas PU, perguruan tinggi.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Riset kolaboratif dengan kampus/komunitas untuk inovasi pengurangan sampah dari sumber, rehabilitasi ekosistem, dan sistem peringatan dini banjir/pesisir.	Jumlah riset kolaboratif Jumlah pilot teknologi/komunitas.	2026–2029	Terbentuk portofolio inovasi lingkungan dan mitigasi yang siap direplikasi.	Lead: DLH, BRIDA. Support: Dinas PU, perguruan tinggi, komunitas lingkungan.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Lomba inovasi lingkungan & kampanye perilaku (zero waste, urban farming, citizen science kualitas air/udara).	Jumlah inovasi/partisipasi Jumlah inovasi yang diadopsi.	2025–2029	Perubahan perilaku dan partisipasi publik meningkat untuk menjaga lingkungan kota.	Lead: DLH. Support: BRIDA, Disdik, komunitas.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi rekomendasi riset lingkungan bencana ke RKPD/Renja, program pengurangan sampah, penguatan RTH, dan penanganan genangan berbasis peta risiko.	Persentase program lingkungan/mitigasi yang mengacu hasil riset Jumlah forum sinkronisasi.	2026–2029	Program lingkungan dan mitigasi lebih konsisten, efektif, dan terukur dampaknya.	Lead: Bappeda, DLH. Support: BRIDA, Dinas PU, Dinas Perkim.

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen Penyelesaian dengan Perkembangan Global	Penyelesaian agenda dengan SDGs dan prinsip kota tangguh iklim, benchmarking pengelolaan sampah ke kota rujukan.	Jumlah kebijakan/program yang mengadopsi prinsip global Jumlah benchmarking/kerja sama.	2025–2029	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup membaik dan kapasitas ketangguhan bencana kota meningkat.	Lead: DLH, Dinas PU, Bappeda. Support: BRIDA, Bagian Kerja Sama.
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset dan inovasi ekonomi lokal serta pengembangan basis data ekonomi daerah untuk mendukung penyelesaian pengangguran dan kemiskinan.	- Ditetapkannya roadmap riset ekonomi daerah - Berfungsinya portal ekonomi daerah.	2025–2026	Tersedia arah kebijakan riset ekonomi dan infrastruktur data yang menjadi dasar program penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.	Lead: BRIDA, Bappeda. Support: Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Diskominfo.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan penyusunan agenda riset berbasis kebutuhan pelaku usaha dan fasilitasi riset terapan hilirisasi produk unggulan daerah.	- Jumlah OPD/mitra yang mengikuti pelatihan - Jumlah riset terapan yang berjalan.	2025–2027	Pemerintah dan mitra memiliki kapasitas merancang dan mengelola riset yang menjawab kebutuhan ekonomi riil kota.	Lead: BRIDA, BKPSDM. Support: Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Perdagangan, perguruan tinggi.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Pembentukan Makassar Innovation dan Business Hub dan pelaksanaan riset terapan dan pengembangan produk/jasa yang dilakukan oleh startup /UMKM penyelesaian masalah kota.	- Terbentuknya hub inovasi - Jumlah startup/UMKM inovatif yang diinkubasi.	2026–2029	Terbentuk jejaring kemitraan triple helix yang melahirkan usaha baru dan solusi untuk masalah ekonomi dan pengangguran.	Lead: BRIDA. Support: Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Tenaga Kerja, KADIN, perguruan tinggi, mitra swasta.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi ekonomi daerah dan pemberian penghargaan 'Inovasi Ekonomi Makassar'.	- Jumlah proposal inovasi yang masuk - Jumlah inovasi yang diadopsi OPD/pelaku usaha.	2025–2029	Terbangun budaya inovasi di kalangan ASN, pelaku usaha, dan komunitas dalam menyelesaikan masalah ekonomi prioritas.	Lead: BRIDA. Support: Dinas Koperasi & UMKM, Diskominfo, Bagian Organisasi.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi rekomendasi riset ekonomi ke dalam RKPd, Renstra dan Renja OPD serta penyelenggaraan forum policy dialogue ekonomi tahunan.	- Persentase program ekonomi yang mengacu pada hasil riset - Jumlah forum kebijakan yang dilaksanakan.	2026–2029	Program dan anggaran ekonomi prioritas tersusun konsisten dengan bukti dan kebutuhan masyarakat.	Lead: Bappeda. Support: BRIDA dan OPD ekonomi terkait.
	Elemen Penyelesaian dengan Perkembangan Global	Benchmarking kebijakan inovasi ekonomi ke kota maju dan penyelesaian agenda riset dengan tren ekonomi hijau, ekonomi digital, dan SDGs.	- Jumlah kegiatan benchmarking - Jumlah agenda riset yang diselenggarakan dengan agenda global.	2025–2029	Ekosistem inovasi ekonomi daerah adaptif terhadap perubahan global dan meningkatkan daya saing Makassar.	Lead: BRIDA, Bappeda. Support: Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, mitra internasional.
	Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan roadmap riset pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta	- Ditetapkannya roadmap riset SDM	2025–2026	Tersedia arah kebijakan pengembangan SDM yang fokus pada pengurangan	Lead: BRIDA, Bappeda. Support: Dinas Pendidikan, Dinas

Program Prioritas	Elemen/Sub Elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
berkualitas dan berdaya saing		pengembangan basis data profil kompetensi SDM per wilayah.	- Berfungsinya dashboard profil SDM.		pengangguran, peningkatan keterampilan dan perlindungan kelompok rentan.	Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Diskominfo.
	Elemen Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi	Pelatihan perencanaan berbasis data bagi perencana sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitasi riset kesenjangan keterampilan atas kebutuhan industri lokal.	- Jumlah ASN yang dilatih - Jumlah riset kesenjangan keterampilan yang selesai.	2025–2027	OPD mampu merancang program peningkatan kualitas SDM yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja kota.	Lead: BRIDA, BKPSDM. Support: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi.
	Elemen Kemitraan Riset dan Inovasi	Pengembangan kemitraan kampus, sekolah, industri untuk upskilling guru dan siswa di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dan ekonomi digital.	- Jumlah MoU kemitraan - Jumlah peserta program.	2026–2029	Terbangun jejaring pengembangan SDM yang relevan dengan sektor unggulan Makassar.	Lead: Dinas Pendidikan. Support: Dinas Tenaga Kerja, perguruan tinggi, dunia usaha.
	Elemen Budaya Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan kompetisi karya ilmiah pelajar dan mahasiswa tentang solusi banjir, sampah, transportasi, dan masalah sosial kota.	- Jumlah karya ilmiah yang masuk - Jumlah karya yang ditindaklanjuti.	2025–2029	Tumbuh generasi muda yang kritis dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan prioritas daerah.	Lead: Dinas Pendidikan. Support: BRIDA, perguruan tinggi.
	Elemen Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah	Integrasi rekomendasi riset SDM ke dalam program beasiswa, pelatihan vokasi dan program pengurangan pengangguran.	- Persentase program SDM yang mengacu pada hasil riset.	2026–2029	Program pengembangan SDM menjadi lebih terarah, tidak tumpang tindih dan efektif mengurangi pengangguran.	Lead: Bappeda. Support: Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BRIDA.
	Elemen Penyesuaian dengan Perkembangan Global	Penyesuaian kurikulum lokal dengan kompetensi abad 21 dan industri 4.0 serta partisipasi dalam jejaring kota pendidikan dan jejaring global lainnya.	- Jumlah satuan pendidikan yang menyesuaikan kurikulum - Jumlah jejaring global yang diikuti.	2025–2029	SDM Makassar berdaya saing global sekaligus mampu menjawab tantangan lokal.	Lead: Dinas Pendidikan. Support: BRIDA, bagian kerja sama, perguruan tinggi.

Sumber: Hasil Analisis Tim Riset, 2025.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029. Adapun mekanisme penyusunan RIPJ PID ini adalah sebagai berikut:

1. Gap Analisis hanya dilihat pada penjabaran misi Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Makassar dengan aktivitas Kelitbangan yang dilakukan oleh BRIDA Kota Makassar. Dengan demikian, program yang belum dilakukan Kelitbangan, kemudian ditindaklanjuti melalui kajian yang mendalam sehingga mampu melahirkan rencana aksi yang lebih terarah.
2. Kajian percepatan program pembangunan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah dianalisis dengan menggunakan pendekatan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa:

1. Pentingnya komitmen dan konsistensi dari seluruh elemen terkait (stakeholders) dalam menyelenggarakan rencana program yang telah dikaji oleh tim riset.
2. Perlunya dukungan pimpinan dalam menyiapkan infrastruktur sebagai pendukung atas program yang telah disusun oleh tim riset.
3. Perlunya dukungan dari pimpinan untuk menyiapkan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (anggaran) yang memadai agar program yang telah disusun oleh tim riset dapat terealisasi secara efektif.

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

